BERITA DAERAH
BUPATI KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2018-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2018-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 -2021;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi.
8. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

9. Sumber ...

9. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak hygienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator Universal Acces untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Indikator Universal Acces untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

18. Indikator ...

18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

28. Evaluasi ...

28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL TAHUN 2018-2021

Pasal 2

RAD-AMPL Tahun 2018-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030.

Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2018-2021 berfungsi sebagai:

a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;
d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
e. acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2017 dan Tahun 2021.

Pasal 4 ...

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2018-2021 yang disusun berdasarkan RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2019 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD sampai dengan Tahun 2021.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL TAHUN 2018-2021

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 dengan dana di luar APBD Kabupaten Kutai Timur maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV ...

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

TAHUN 2018-2021

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

(4) Kepala OPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(6) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.

(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.

(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

(9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.

(10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.

(11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 6

SAMBUTAN



Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD - AMPL) Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (Lima) Tahun. Dengan perannya sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah, RAD-AMPL ini diharapkan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL yang lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. AMPL sendiri merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menggerakkan dan meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata, meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya RAD AMPL diharapkan dapat memberikan hasil nyata bagi kabupaten dalam meningkatkan cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target RPJMD 2016-2021 Gerbang Desa Madu (Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu) Kabupaten Kutai Timur , target RPJMN 2015-2019 dan target SDGs 2030 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan produktivitas masyarakat yang lebih baik. Mengingat penyediaan layanan dasar termasuk air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan AMPL yang ada di setiap OPD diharapkan akan lebih baik dengan tersusunnya RAD AMPL ini. Kita berharap pada tahun 2021 pemenuhan target RPJMN 2015-2019 dan khususnya visi Gerbang Madu daerah Kabupaten Kutai Timur akan dapat dipenuhi sesuai dengan SPM dan target yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya kami berharap seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pencapaian RAD AMPL Tahun 2018 - 2021 ini dapat menjalankan dan senantiasa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 - 2021 dapat menyelesaikan Dokumen Penyusun RAD AMPL Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018- 2021.

Adapun tujuan dari Tim Penyusun Dokumen RAD AMPL ini adalah untuk memenuhi salah satu instrument kebijakan sebagai dokumen aksi komitmen daerah terhadap penyediaan Air Minum Penyehatan Lingkungan . Dalam Tim Penyusun Dokumen RAD AMPL ini, penyusun banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan tidak lupa disampaikan kepada:

1. Bapak. Ir. H. Ismunandar, ST,MT selaku Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan-kebijakan yang sangat bermanfaat bagi komitmen Rencana Aksi Daerah terhadap Program Ar Minum dan Penyehatan Lingkungan;
2. Bapak. H. Kasmidi Bulang ST, MM selaku Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah mengarahkan dalam pokja AMPL dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah terhadap Program Ar Minum dan Penyehatan Lingkungan;
3. Bapak. Drs.H. Irwansyah, M.Si selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah mengarahkan dalam pokja AMPL dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah terhadap Program Ar Minum dan Penyehatan Lingkungan;
4. Pokja AMPL Kabupaten Kutai Timur selaku pembina dalam penyusunan RAD AMPL Tahun 2018-2021;
5. Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah banyak memberi dukungan informasi dan kerja sama dalam proses Penyusunan Dokumen RAD AMPL Tahun 2018-2021;
6. Seluruh Tim Penyusun RAD AMPL yang sudah berpatisipasi dalam memberikan segenap ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung Penyusunan Dokumen RAD AMPL Tahun 2018-2021

Dokumen RAD AMPL ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak, meskipun disadari bahwa laporan ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun Tim Penyusunnya. Karenanya dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini.

Akhirnya, semoga Dokumen RAD AMPL ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Sangatta, ...

Tim Penyusun;
Ketua
Ka. Bappeda Kab.Kutai Timur

Ir. H Sumarjana. MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505121987101001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2018 - 2021

DAFTAR ISI

Sambutan i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

Bab. I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Fungsi RAD AMPL 4
1.3. Pengertian 4
1.4. Maksud dan Tujuan RAD AMPL 5
1.5. Ruang Lingkup RAD AMPL 5
1.6. Sistematika RAD AMPL 7

Bab. II Kondisi Umum Pembangunan Daerah

2.1. Gambaran Umum Pembangunan Daerah 1
2.2. Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi 7
2.3. Akses Terhadap Air Minum yang Layak 37
2.4 Sistem Pelayanan Perpipaan (PDAM) 43
2.5 Sistem Pelayanan Non Perpipaan (PDAM) 50
2.6 Akses Terhadap Sanitasi Yang Layak 51
2.7. Target Pencapaian Akses Air Minum dan Sanitasi 64
2.8. Permasalahan dan Tantangan Sektor AMPL 68

Bab. III Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target

3.1. Isu Strategis Sektor AMPL Tahun 2018-2021 1

3.2 Arah Kebijakan AMPL Tahun 2018-2021 3

3.3 Strategi Pencapaian Target AMPL Tahun 2018-2021..... 8

Bab. IV Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL Tahun 2018 -2021

4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah..... 1

4.2. Perumusan Program dan Kegiatan AMPL 2016 – 2021 2

Bab. V Kebutuhan Investasi

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi 1

5.2 Rencana Pembiayaan 4

Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi

6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL..... 1

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 3

Bab. VII Penutup

Daftar Istilah/Singkatan v

DAFTAR ISITILAH/SINGAKATAN

BIDANG AIR MINUM

Air Baku : Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Air Bersih : Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 416 tahun 1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Air Minum : Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat dan dapat langsung diminum.

Air Minum : Menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air Minum : Menurut Sutrisno (1991:1) air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Air Tanah : Air tanah (*ground water*) adalah cadangan air yang bersumber dari air presipitasi dan merembes menjadi air infiltasi berada di bawah permukaan litosfer tertampung dalam cekungan-cekungan dan mengalir membentuk sungai bawah tanah dan muncul sebagai mata air.

Air Tanah Bebas : Air tanah yang tidak dibatasi oleh dua lapisan kedap air atau semi kedap air.

Air Tanah Dangkal : Air tanah bebas yang terdapat dalam tanah dengan kedalaman muka air kurang atau sama dengan dua puluh meter.

Air Tanah Dalam : Air tanah yang terdapat di dalam tanah yang kedalaman muka airnya lebih besar dari dua puluh meter atau air tanah yang terdapat di dalam akifer tertekan dimana akifer ini berada dalam kedalaman lebih dari dua puluh meter.

Air Permukaan : Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Air permukaan meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi.

AMPL : Air Minum dan PenyehatanLingkungan

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bangunan Penyadap : Bangunan penyadap (*Intake*) adalah bangunan penangkapair

		atau tempat air masuk sungai, danau, situ, atau sumber air lainnya.
BLM	:	Bantuan Langsung Masyarakat.
BPSPAMS	:	Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
CPMU	:	*Central Project Management Unit*
CSR	:	*Corporate SocialResponsibilities*
Debit Minimum	:	Debit terkecil yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat pedesaan.
DPMU	:	*District Project Management Unit*
Fasilitator	:	Tenaga Pendamping Program Pamsimas di masyarakat
Hidran Umum	:	Jenis pelayanan pelanggan sistem air minum perpipaan atau non perpipaan dengan sambungan per kelompok pelanggan dan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum, dengan cara pengambilan oleh masing-masing pelanggan ke pusat penampungan.
HIK	:	Hibah Insentif Kabupaten/Kota
Jaringan Pipa Transmisi Air Baku	:	Ruas pipa pembawa air dari sumber air sampai unit produksi.
Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	:	Ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai reservoir atau batas distribusi.
Jaringan Pipa Distribusi	:	Ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan.
Kem. PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negri
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mata Air	:	Air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hamper tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas/kualitasnya sama dengan keadaan air dalam.
MDGs	:	*Millennium Development Goals*
Pakem	:	Panitia Kemitraan
Penyediaan Air Minum	:	Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
PMD	:	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PPM	:	Penanganan Pengaduan Masyarakat
PPMU	:	*Provincial Project Management Unit*
Pokja	:	Kelompok Kerja
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
Reservoir	:	Tempat penyimpan air untuk sementara sebelum di distribusikan kepada pelanggan atau konsumen.
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKM	:	Rencana Kerja Masyarakat
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sambungan Langganan	:	Jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melaui meter air dan instalasi pipanya di dalam

rumah.

Sanitasi	:	Usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan, terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SBS	:	Stop Buang Air Besar Sembarangan
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
SPAL	:	SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) adalah perlengkapan pengelolaan air limbah yang berupa pipa atau pun selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan.
Sumur Gali	:	Satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah- rumah perorangan sebagai air minum dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah.
Unit Air Baku	:	Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
Unit Produksi	:	Sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
Unit Distribusi	:	Sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan.

BIDANG SANITASI

IPAL	:	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (*wastewater treatment plant*, WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain
IPLT	:	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah sarana yang berfungsi mengolah lumpur tinja yang berasal dari tangki septik yang secara periodik dikuras. Pengolahan lumpur tinja di IPLT ditujukan untuk mematikan bakteri dan virus serta telur cacing yang berasal dari tangki septik.

KSM (Kelompok Swadaya Berbasis Masyarakat)	:	Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)	:	SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan. Menyusul kesuksesan pilot program di enam kota di tahun 2003-2004, mulai tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dalam mendukung replikasi dan scaling-up pendekatan fasilitas sanitasi terdesentralisasi berbasis masyarakat (decentralized wastewater treatment systems – DEWATS) secara nasional melalui program SANIMAS ini.
STBM	:	Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah aksi terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan diantaranya adalah diare, serta meningkatkan perilaku higienitas dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.
TPS	:	TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengelolaan, dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu (menurut UU no 18 tahun 2008).
TPSPT	:	TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yaitu tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah (menurut UU no 18 tahun 2008).
TPA	:	TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (menurut UU no 18 tahun 2008).
TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah - Reuse Reduce Recycle)	:	Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. (Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012)
Air limbah	:	Semua jenis air buangan yang mengandung kotoran manusia, binatang atau tumbuhan. Air buangan tersebut yang mengandung buangan industri dan buangan kimia dapat juga disebut air limbah = wastewater = sewage
Cubluk	:	Suatu istilah yang digunakan utk lubang didalam tanah dengan dinding yang rembes air untuk menampung tinja dan air seni dari jamban atau kakus = leaching pit

Jamban atau kakus	:	Istilah macam fasilitas sanitasi yang sangat sederhana, dapat terdiri dari pelat jongkok dan lubang dibawahnya (langsung atau di dalam tanah). Dalam bahasa jawa jumbleng, cubluk dalam bahasa sunda
Sanitasi	:	Usaha untuk mendapatkan kondisi yang sehat dalam pengaturan pembuangan kotoran manusia atau adalah cara pembuangan yang memenuhi aspek-aspek penyehatan lingkungan

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penduduk dunia berkomitmen untuk memenuhi target *Sustainable Development Goals*, dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun ***(Leave No One Behind)*** merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain; Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, Pemerintah melalui program pembangunan nasional *"Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019"*, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya target akses air minum dan sanitasi tersebut dalam RPJMN, maka Pemerintah wajib menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan termasuk kebijakan dan strategi untuk mencapai target akses universal dibidang air minum dan sanitasi. Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015-2019 mendatang. Serta Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): Rencana Aksi Daerah SDGs. Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010.

Penerapan RAD AMPL 2018-2021 diharapkan dapat memberikan hasil nyata bagi Kutai Timur yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target 6 (*Clean Water*

and Sanitation) SDGs 2018 -2030 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat lebih baik. Sebagaimana tercantum pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah /Kota, bahwa penyediaan layanan dasar termasuk air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai pelayanan publik yang mendasar, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bahwa *universal access* pada prinsipnya adalah pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam UU 23/2014 sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM nya.

Untuk mendukung percepatan pemerintah kabupaten/kotadalam menyediakan 100% layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2019 dan target ke- 6 (*Clean Water and Sanitation)* SDGs 2016 -2030, dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Dengan demikian belanja daerah tersebut mutlak harus diprioritaskan apabila diikaitkan dengan target nasional akses universal tahun 2019, maka pemerintah harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi di tingkat .

Masa depan kita semua berharap dapat mengatasi persoalan-persoalan yang pelayanan air minum dan sanitasi. Melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menekan angka kesakitan terkait sehingga dapat menurunkan biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Peningkatan akses pada air minum aman dan sanitasi yang memadai secara langsung

dapat mengurang jumlah pasien rumah sakit di setiap daerah, karena kualitas kesehatan masyarakatnya yang membaik. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan meningkat, yang tercermin pada peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masyarakat yang memiliki akses baik pada air minum dan sanitasi cenderung memiliki kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik. Sementara di sektor ekonomi, pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Jadi kita tidak hanya bicara soal akses, melainkan lebih luas lagi, yaitu masa depan bangsa.

Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat menuju 100% akses, pemerintah perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan *(implementatif)*. Pencapaian *Universal Access* harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke . Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya. Pemerintah diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke diorientasikan untuk pemenuhan SPM air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrumen kolaborasi berbagai *stakeholders* untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat

dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi yang sedang menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra SKPD mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

1.2. FUNGSI RAD AMPL

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai Instrumen acuan bagi pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Sebagai Instrumen operasional kebijakan bagi pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun); Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target, jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
3. Instrumen untuk membantu memastikan peningkatan anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

1.3. PENGERTIAN

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan peyehatan lingkungan untuk periode 5 (Lima) tahun tetapi disesuaikan dengan tahun penyusunan dan berakhir di masa periode Kepala Daerah.

RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta mengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam bidang AMPL.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Mengingat salah satu fungsi RAD-AMPL sebagai saluran komunikasi internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka maksud dari penyusunan RAD AMPL 2018-2021 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

1.5. RUANG LINGKUP RAD AMPL

RAD AMPL berisikan analisa permasalahan dan isu strategi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas , serta indikasi kebutuhan investasi daerah (Pemerintah/APBD, Masyarakat, Swasta) dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun berbasis masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target SPM dan Pembangunan Nasional.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi jaringan perpipaan, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau

tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase; Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos; Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	*Improved*/Layak	*Unimproved**)/Tidak layak
Air Minum	- *House connection* (Sambungan rumah (SR) - Standpost/pipe (hidran) - *Borehole* (sumur bor) - *Protected spring or well* (sumur terlindungi) - *Collected rain water* (air hujan) - *Water disinfected at the point of use*	- *Unprotected well* (sumur tak terlindungi) - *Unprotected spring* (mata air tak terlindungi) - *Vendor-provided water* (Air dari penjual/pedagang) - *Botlled water* (Air kemasan) - *Water provided by tanker truck* (air dari *tanker truck*)
Sanitasi	- *Sewer connection (sewer)* - *Septic tank* - *Pour flush* (closet duduk) - *Simple pit latrine* (cubluk) - *Ventilated Improved Pit-latrine* (cubluk dengan ventilasi udara)	- *Service or bucket latrines* - *Public latrines* - *Latrines with an open pit*

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal
Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RAD AMPL

Sistematika penyusunan RAD AMPL adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

BAB Ini berisi Latar Belakang, Pengertian, Fungsi RAD AMPL, Maksud dan Tujuan RAD AMPL, Ruang Lingkup RAD AMPL, Sistematika RAD AMPL

Bab. II Kondisi Umum Pembangunan Daerah, Permasalahan dan Tantangan

Bab ini mengemukakan kondisi umum pembangunan Kutai Timur berkaitan dengan status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi berdasarkan indikator SDGs, SPM, RPJMN, dan RPJMD. serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang tekait dengan pencapaian target AMPL sesuai indikator SDGs, SPM, RPJMN, RPJMD.

Bab. III Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target

Bab ini mengemukakan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama 2018-2021 dalam upaya pencapaian target AMPL 2021. Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan Nasional sebagaimana yang dituliskan dalam peta jalan (*Roadmap*)nasional percepatan pencapaian RPJMN dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program, dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

Bab. IV Program dan Kegiatan

Bab ini mengemukakan uraian tujuan, sasasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

Bab. V Kebutuhan Investasi

Bab ini berisi tentang estimasi kebutuhan investasi dan sumber dana baik dari APBN, APBD Prop, APBD, CSR dan dana hibah dalam pelaksanaan penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di daerah sebagai komitmen dan acuan dalam pencapaian kinerja daerah terhadap bidang AMPL.

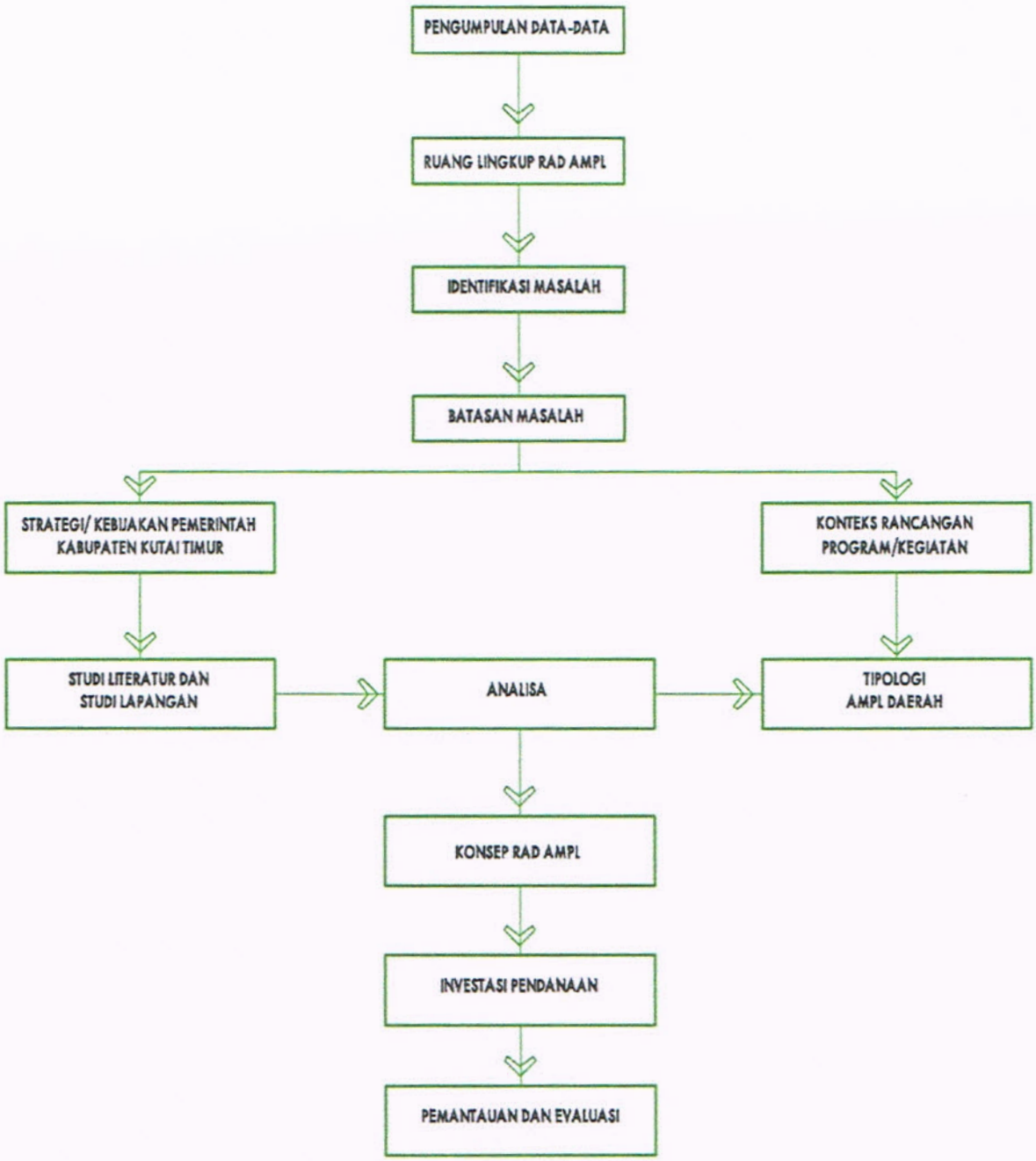
Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi

Bab ini berisi mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL. menjelaskan tanggung jawab masing – masing Organisasi Perangkat

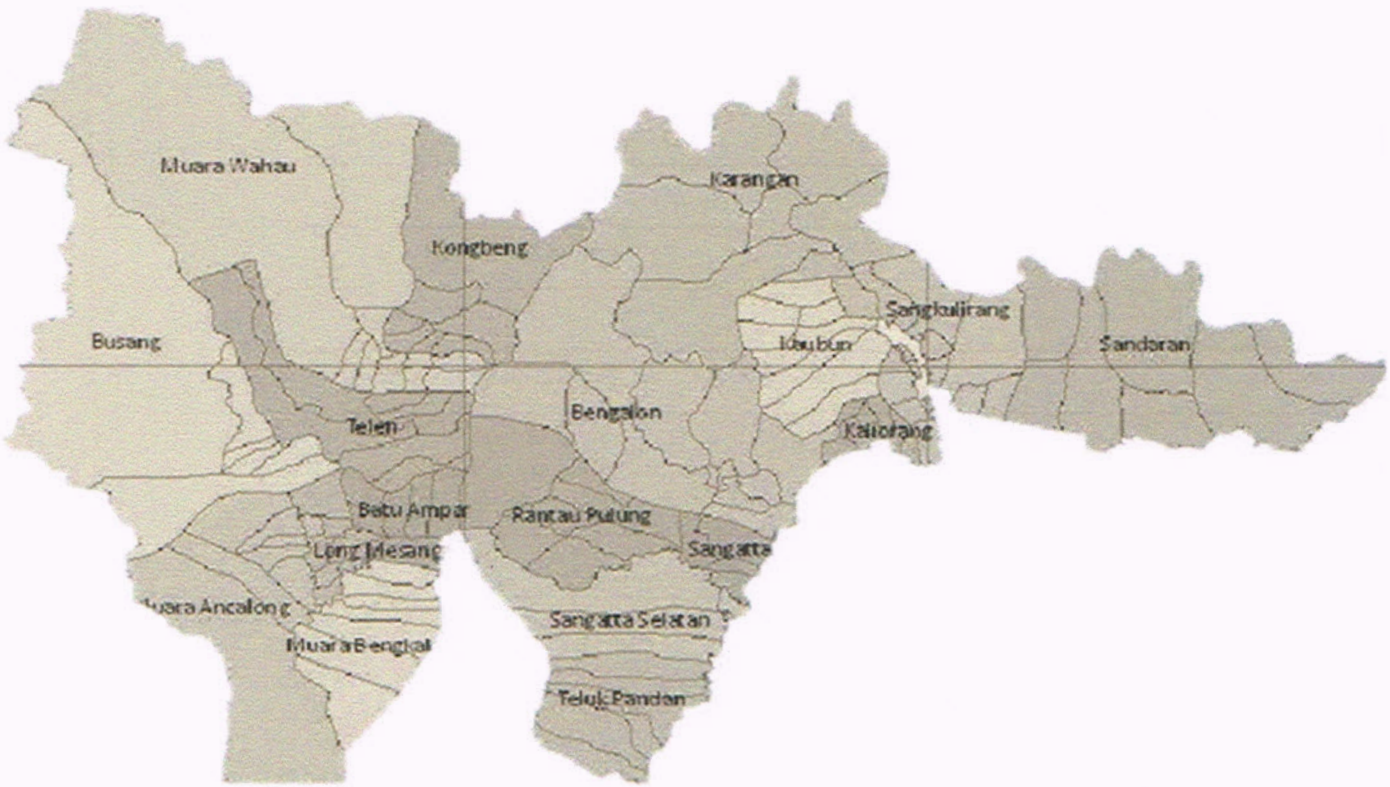
Daerah (OPD), waktu pelaksanaan dan langkah tindak lanjutnya. Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD AMPL dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Bab. VII Penutup

Bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.



BAB II KONDISI UMUM PEMBANGUNAN DAERAH, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

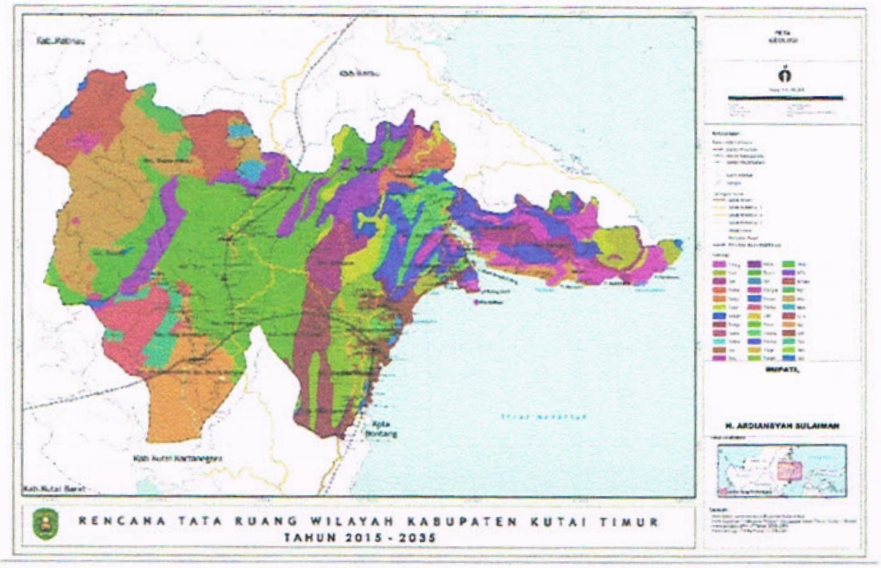


2.1 GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Gambar 2-1
Peta Kabupaten Kutai Timur

Secara geografis letaknya berada pada 115° 56'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39 Lintang Utara. 115°58'26"-118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara.



Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Berdasarkan posisi diatas, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan 3 kabupaten dan 1 kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Selain berbatasan dengan wilayah daratan, Kabupaten Kutai Timur juga berbatasan langsung dengan lautan. Batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara
c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Malinau.

Kondisi ini dapat dijadikan sebagai modal pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, melihat potensi yang cukup strategis bagi perekonomian karena posisi tersebut mendukung interaksi wilayah-wilayah desa/kecamatan di Kabupaten

Kutai Timur dengan wilayah luar. Potensi dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Kalimantan Utara - Tanjung Redeb ke Samarinda - Balikpapan - Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan kedalam Kabupaten Kutai Timur.
b. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 290,1 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi tersebut berada pada jalur transportasi laut internasional.

2.1.2. Luas Wilayah

Suatu daerah dengan wilayah yang luas harus dilihat sebagai potensi bukan sebagai hambatan. Banyak yang bisa dilakukan dengan wilayah yang luas tersebut. Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 133 desa, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Batu Timbau Ulu, Desa Manubar dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Kernyanyan, desa Teluk Baru dan Desa Masalap Raya, daerah Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 2 kelurahan dan 139 desa, Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km^2 atau sekitar 24% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.2. Kependudukan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur memiliki 2 kelurahan dan 139 desa yang tersebar pada 18 kecamatan. Dari 1139 desa terdapat 8 desa (5,76%) berstatus Mandiri, 119 Desa (85,61%) berstatus Berkembang, dan 12 desa (8,63%) berstatus Tertinggal.

Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari pembagian wilayah maka dari desa mandiri ada 4 desa yang memenuhi wilayah perkotaan yaitu: desa Sangatta Utara, desa Singa Gembara, desa Swarga Bara, kelurahan Teluk Lingga berada di kecamatan Sangatta Utara. Satu desa lainnya terletak di kecamatan Sangatta Selatan yaitu desa Sangatta Selatan dan kelurahan Singa Geweh. Maka 4 desa dan 2 kelurahan tersebut merupakan wilayah Perkotaan.

Pedesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Pembagian wilayah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki memenuhi kriteria wilayah pedesaan masing-masing yaitu:

1. Kecamatan Muara Ancalong memiliki 9 Desa, terdiri dari 2 Desa Tertinggal dan 7 Desa Berkembang
2. Kecamatan Busang memiliki 6 Desa, terdiri dari 1 Desa Tertinggal dan 5 Desa Berkembang
3. Kecamatan Long Masengat memiliki 7 Desa, terdiri dari 7 Desa Berkembang
4. Kecamatan Muara Wahau memiliki 10 Desa, terdiri dari 1 Desa Mandiri dan 9 Desa Berkembang
5. Kecamatan Telen memiliki 8 Desa, terdiri dari 1 Desa Tertinggal dan 7 Desa Berkembang
6. Kecamatan Kongbeng memiliki 7 Desa, terdiri dari 7 Desa Berkembang
7. Kecamatan Muara Bengkal memiliki 6 Desa , terdiri dari 1 Desa Tertinggal dan 5 Desa Berkembang
8. Kecamatan Batu Ampar memiliki 7 Desa, terdiri dari 3 Desa Tertinggal dan 3 Desa Berkembang
9. Kecamatan Bengalon memiliki 11 Desa, terdiri dari 2 Desa Tertinggal dan 9 Desa Berkembang
10. Kecamatan Teluk Pandan memiliki 6 Desa, terdiri dari 4 Desa Berkembang dan 2 Desa Mandiri
11. Kecamatan Rantau Pulung memiliki 9 Desa, terdiri dari 9 Desa Berkembang
12. Kecamatan Sangatta Selatan memiliki 3 Desa, terdiri dari 2 Desa Berkembang
13. Kecamatan Kaliorang memiliki 7 Desa, terdiri dari 7 Desa Berkembang

14. Kecamatan Sangkulirang memiliki 15 Desa, terdiri dari 1 Desa Tertinggal dan 13 Desa Berkembang dan 1 Desa Mandiri.
15. Kecamatan Sandaran memiliki 9 Desa, terdiri dari 1 Desa Tertinggal dan 8 Desa Berkembang
16. Kecamatan Kaubun memiliki 8 Desa, terdiri dari 1 Desa Tertinggal dan 7 Desa Berkembang
17. Kecamatan Karangan memiliki 7 Desa, terdiri dari 1 Desa tertinggal dan 6 Desa Berkembang.

Diaram Lingkaran 2.1
Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017



Sumber: Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur 2017

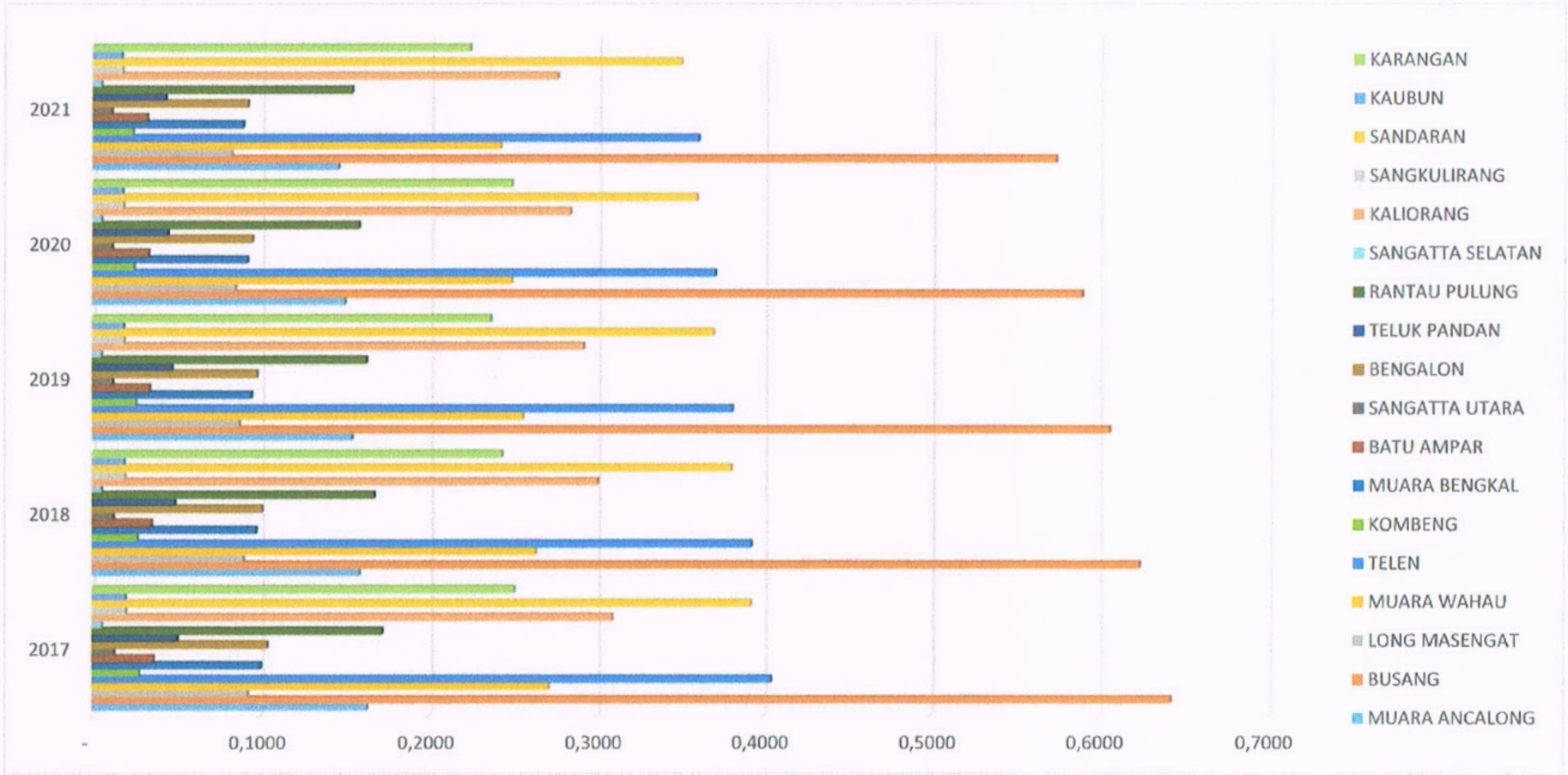
Diagram Lingkaran. 2.2
Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017



	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	GABUNGAN
PERKOTAAN	75.742	63.190	138.932
PEDESAAN	152.084	127.609	279.693

Sumber: Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur 2017

Diagram Bar. 2.3
Proyeksi Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2021



Sumber: Capil Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan Perhitungan Proyeksi Tim Penyusunan RAD AMPL Tahun 2018-2021

Tabel. 2.1
Proyeksi Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	2017		KEPADATAN (JIWA/KM2)	2018		KEPADATAN (JIWA/KM2)	2019		KEPADATAN (JIWA/KM2)	2020		KEPADATAN (JIWA/KM2)	2021		KEPADATAN (JIWA/KM2)
			TOTAL (Jiwa)	TOTAL (RT)		TOTAL (Jiwa)	TOTAL (RT)		TOTAL (Jiwa)	TOTAL (RT)		TOTAL (Jiwa)	TOTAL (RT)		TOTAL (Jiwa)	TOTAL (RT)	
1	MUARA ANCALONG	2.739,30	13.377	3.925	0,2048	17.282	4.321	0,1585	17.781	4.445	0,1541	18.280	4.570	0,1499	18.780	4.695	0,1459
2	BUSANG	3.721,62	6.181	1.705	0,6021	5.962	1.491	0,6242	6.132	1.533	0,6069	6.302	1.576	0,5905	6.472	1.618	0,5750
3	LONG MESANGAT	526,98	7.549	2.219	0,0698	5.856	1.464	0,0900	6.023	1.506	0,0875	6.190	1.548	0,0851	6.356	1.589	0,0829
4	MUARA WAHAU	5.724,32	28.014	9.016	0,2043	21.742	5.436	0,2633	22.372	5.593	0,2559	23.002	5.751	0,2489	23.631	5.908	0,2422
5	TELEN	3.129,61	11.475	3.581	0,2727	7.971	1.993	0,3926	8.202	2.051	0,3816	8.433	2.108	0,3711	8.665	2.166	0,3612
6	KOMBENG	581,27	28.444	8.330	0,0204	21.604	5.401	0,0269	22.230	5.558	0,0261	23.483	5.871	0,0248	24.109	6.027	0,0241
7	MUARA BENGKAL	1.522,80	14.178	4.314	0,1074	15.643	3.911	0,0973	16.094	4.024	0,0946	16.545	4.136	0,0920	16.995	4.249	0,0896
8	BATU AMPAR	204,50	7.386	2.274	0,0277	5.790	1.448	0,0353	5.955	1.489	0,0343	6.120	1.530	0,0334	6.285	1.571	0,0325
9	SANGATTA UTARA	1.262,59	120.955	30.239	0,0104	100.427	25.107	0,0126	103.458	25.865	0,0122	106.489	26.622	0,0119	109.521	27.380	0,0115
10	BENGALON	3.196,24	42.602	13.012	0,0750	31.696	7.924	0,1008	32.671	8.168	0,0978	33.646	8.412	0,0950	34.620	8.655	0,0923
11	TELUK PANDAN	831,00	16.178	5.297	0,0514	16.992	4.248	0,0489	17.505	4.376	0,0475	18.531	4.633	0,0448	19.044	4.761	0,0436
12	RANTAU PULUNG	1.660,85	11.001	3.355	0,1510	9.939	2.485	0,1671	10.224	2.556	0,1624	10.509	2.627	0,1580	10.795	2.699	0,1539
13	SANGATTA SELATAN	143,82	31.585	9.643	0,0046	25.281	6.320	0,0057	26.037	6.509	0,0055	26.793	6.698	0,0054	27.549	6.887	0,0052
14	KALIORANG	3.322,58	14.448	4.371	0,2300	11.060	2.765	0,3004	11.382	2.846	0,2919	11.704	2.926	0,2839	12.025	3.006	0,2763
15	SANGKULIRANG	438,91	22.906	7.083	0,0192	22.389	5.597	0,0196	23.042	5.761	0,0190	23.695	5.924	0,0185	24.349	6.087	0,0180
16	SANDARAN	3.419,30	12.245	3.952	0,2792	8.974	2.244	0,3810	9.234	2.309	0,3703	9.494	2.374	0,3602	9.754	2.439	0,3506
17	KAUBUN	257,45	15.725	4.827	0,0164	13.388	3.347	0,0192	13.791	3.448	0,0187	14.194	3.549	0,0181	14.598	3.650	0,0176
18	KARANGAN	3.064,36	14.376	4.603	0,2132	12.590	3.148	0,2434	12.949	3.237	0,2366	12.308	3.077	0,2490	13.668	3.417	0,2242
KABUPATEN KUTAI TIMUR			**418.625**	**121.746**	**2,5595**	**354.586**	**88.647**	**2,9870**	**365.082**	**91.271**	**2,9031**	**375.718**	**93.930**	**2,8405**	**387.216**	**96.804**	**2,7468**

Sumber: Capil 2017 dan Analisa Proyeksi Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021

2.2. STATUS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI

Tujuan ke-6 Pembangunan *Sustainable Development Goals* menyebutkan bahwa Air yang bersih dan mudah diakses bagi semua adalah bagian penting dari dunia tempat kita ingin hidup dan ada cukup air segar di planet ini untuk mencapainya. Namun, karena ekonomi yang buruk atau infrastruktur yang buruk, jutaan orang termasuk anak-anak meninggal setiap tahun karena penyakit yang terkait dengan pasokan air yang tidak memadai, sanitasi dan kebersihan.

Kelangkaan air, kualitas air yang buruk dan sanitasi yang tidak memadai berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, pilihan mata pencaharian dan peluang pendidikan bagi keluarga miskin di seluruh dunia. Maka Indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian target ke- 6 (*Clean Water and Sanitation)* SDGs 2016 -2030 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan:
   a. Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;
   b. Porporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak pedesaan.
2. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi Layak, Perkotaan dan Pedesaan:
   a. Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan
   b. Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak pedesaan

Dalam Tujuan ke-6 (*Clean Water and Sanitation)* SDGs 2016 -2030, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, *standpipes*, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti, sebagai berikut:

1. Air limbah permukiman : toilet guyur/toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung

dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos

2. Drainase Lingkungan : saluran drainase pemukiman perkotaan dan saluran drainase pemukiman pedesaan.
3. Persampahan : Kelompok kelembagaan masyarakat pengelolaan sampah, pengelolaan sampah TPS 3R.

Selanjutnya, SPM air minum 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Sedangkan SPM sanitasi 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (dengan target SPM 5%).

2.2.1 CAPAIAN KINERJA DAERAH TERHADAP PELAYANAN BIDANG AIR MINUM

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum Wilayah Administrasi

No	Indikator	Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum Wilayah Administrasi Per Tahun (%)				
		2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
	Cakupan Penduduk (%)dengan akses air minum yang layak	**16,66%**	**24,36%**	**26,69%**	**30,63%**	**36,43%**
	PERKOTAAN	**31,01%**	**44,89%**	**44,89%**	**60,09%**	**67,69%**
1	Sangatta Utara - IPA Kabo Jaya - IPA Bukit Pelangi - IPA Kudungga	36,49	51,41	55,18	66,5	75,32
2	Sangatta Selatan	9,89	19,47	21,54	26,00	28,10
	PEDESAAN	**7,05%**	**10,86%**	**10,86%**	**14,67%**	**19,44%**
1	Bengalon 1.1 IPA Bengalon 1.2. IPA Pembantu Sekerate 1.3. Tepian Langsat	4,45	8,12	12,79	13,94	15,45 9,30

2	Muara Wahau					
	2.1. IPA Muara Wahau	12,67	17,42	17,78	26,18	27,82
	2.2. IPA Pembantu Muara Wahau					
3	Kongbeng	6,67	8,03	10,33	9,28	9,81
4	Muara Bengkal	14,37	20,96	21,58	39,78	41,22
5	Muara Ancalong					
	5.1. IPA Muara Ancalong	15,5	21,72	30,66	41,74	45,03
	5.2. IPA Pembantu Senyiur					
6	Teluk Pandan	2,33	4,48	6,33	6,94	7,23
7	Batu Ampar					
	7.1. Batu Ampar	28,41	40,31	42,49	37,18	37,04
	7.2. Himbah Lestari					14,36
	7.3. Mugi Rahayu					7,55
	7.4. Telaga					5,93
8	Long Masengat	9,91	13,35	16,19	16,17	16,77
9	Karangan					
	9.1. Karangan	4,15	7,53	9,36		10,11
	9.2. Mukti Lestari					5,84
10	Telan	11,71	17,68	18,96	17,6	19,29
11	Busang	16,78	27,99	35,3	34,4	36,4
12	Kaubun	3,99	6,76	7,51	7,34	8,28
13	Rantau Pulung					
	13.1. Mukti Jaya & Rantau Makmur	0	6,79	8,29	9,47	14,24
	13.2. Tepian Makmur					7,67
14	Kaliorang					
	14.1. Bukit Makmur	0	0	0	0	20,31
15	Sangkulirang					
	15.1. Kolek	0	0	0	0	1,85
16	Sandaran					
	16.1. Sandaran & Manubar	0	2,35	2,38	2,32	2,50
	16.2. Tanjung Mangkaliat					7,94

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL, PDAM, PAMDES Tahun 2013-2017

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum Wilayah Teknis

No	Indikator	Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum Wilayah Teknis Per Tahun (%)				
		2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
	Cakupan Penduduk (%)dengan akses air minum yang layak	**29,06%**	**40,71%**	**43,26%**	**51,87%**	**57,79%**
	PERKOTAAN	**32,61%**	**47,00%**	**50,57%**	**60,09%**	**67,69%**
1	Sangatta Utara - IPA Kabo Jaya - IPA Bukit Pelangi - IPA Kudungga	36,49	51,41	54,74	66,5	75,32
2	Sangatta Selatan	13,01	24,95	29,42	30,98	33,48
	PEDESAAN	**22,02%**	**29,86%**	**32,06%**	**39,79%**	**45,26%**
1	Bengalon					
	1.1 IPA Bengalon	8,95	15,38	20,65	24,38	27,12
	1.2. IPA Pembantu Sekerate					
	1.3. Tepian Langsat					
2	Muara Wahau					
	2.1. IPA Muara Wahau	18,33	25,42	29,31	39,19	41,93
	2.2. IPA Pembantu Muara Wahau					
3	Kongbeng	27,29	31,52	38,49	38,3	40,22
4	Muara Bengkal	30,2	41,97	46,32	80,58	83,70
5	Muara Ancalong					
	5.1. IPA Muara Ancalong	39,93	54,32	37,35	57,2	61,94
	5.2. IPA Pembantu Senyiur					
6	Teluk Pandan	8,47	14,71	12,23	19,94	20,72
7	Batu Ampar					
	7.1. Batu Ampar	62,68	83,35	89	93,19	96,51
	7.2. Himbah Lestari					85,71
	7.3. Mugi Rahayu					54,23
	7.4. Telaga					66,67
8	Long Masengat	29,15	39,02	44,91	49,07	50,93
9	Karangan					
	9.1. Karangan	18,96	34,61	40,32	48,38	51,76
	9.2. Mukti Lestari					66,67
10	Telan	37,58	55,82	64,98	53,5	56,68
11	Busang	36,01	60,79	67,47	73,17	77,08
12	Kaubun	17,44	26,03	36,33	27,93	31,40
13	Rantau Pulung					
	13.1. Mukti Jaya & Rantau Makmur	0	16,2	20,91	22,67	35,11
	13.2. Tepian Makmur					7,67
14	Kaliorang					
	14.1. Bukit Makmur					74,20
15	Sangkulirang					
	15.1. Kolek					62,91
16	Sandaran					
	16.1. Sandaran & Manubar	0	6,18	7,34	6,14	6,78
	16.2. Tanjung Mangkaliat					85,71

Tabel. 2.4
Pencapain Cakupan Pelayanan PDAM dan Non PDAM Tahun 2017

NO.	CABANG/ UNIT	KAPASITAS TERPASANG	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
						SL	JIWA	ADMINISTRASI	TEKNIS
A	**PERKOTAAN**								
1	SANGATTA UTARA :		120.955	SANGATTA UTARA	56.520	14.559	90.948	75,19	75,19
	- IPA KABO JAYA	280		TELUK LINGGA	27.588				
	- IPA BUKIT PELANGI	10		SINGA GEMBARA	20.497				
	- IPA KUDUNGGA	50		SWARGA BARA	16.350				
				BUKIT PELANGI					
2	SANGATTA SELATAN	20	26.509	SANGATTA SELATAN	17.977	1.479	8.874	33,48	33,48
				SINGA GEWEH	8.532				
	SUB JUMLAH	**360**	**147.464**		**147.464**	**16.038**	**99.822**	**67,69**	**67,69**
B	**PEDESAAN**								
1	SANGATTA SELATAN		5.076	SANGKIMA	3.327				
				TELUK SINGKAMA	1.749				
2	BENGALON :								
	1. BENGALON	20	42.602	SEPASO	9.289	1.097	6.582	15,45	27,12
				SEPASO TIMUR	4.799				
				SEPASO BARAT	6.954				
	2. SEKERAT	10		SEKERAT	3.231				
				TEPIAN LANGSAT	4.619	660	3.960	9,30	85,73
3	MUARA WAHAU :		28.014						
	1. WAHAU I	5		MUARA WAHAU	7.728	1.299	7.794	27,82	41,93
	2. WAHAU II	10		NEHES LIANG BING	4.089				
				WANASARI	4.253				
				WAHAU BARU	2.519				
4	KONGBENG	5	28.444	MIAU BARU	6.937	465	2.790	9,81	40,22
5	MUARA BENGKAL	25	14.178	MUARA BENGKAL ULU	2.062	974	5.844	41,22	83,70
				BENUA BARU	4.920				

6	MUARA ANCALONG :	15	13.377	KELINJAU ILIR	1.589	1.004	6.024	45,03	61,94
				KELINJAU ULU	4.050				
	1. SENYIUR	10		SENYIUR	4.087				
7	TELUK PANDAN	5	16.178	TELUK PANDAN	4.135	195	1.170	7,23	20,72
				KANDOLO	1.513				
8	BATU AMPAR	5	7.386	BATU TIMBAU	2.835	456	2.736	37,04	96,51
				HIMBAH LESTARI	1.237	177	1.060	14,36	85,71
				MUGI RAHAYU	1.029	93	558	7,55	54,23
				TELAGA	657	73	438	5,93	66,67
9	LONG MESANGAT	10	7.549	SUMBER SARI	1.922	211	1.266	16,77	50,93
				MUKTI UTAMA	564				
10	KARANGAN	5	14.376	KARANGAN DALAM	1.025	242	1.452	10,10	51,76
				KARANGAN ILIR	1.780				
				MUKTI LESTARI	1.259	140	839	5,84	66,67
11	TELEN	10	11.475	JUK AYAK	1.615	369	2.214	19,29	56,68
				MUARA PANTUN	2.291				
12	BUSANG	10	6.181	LONG PEJENG	1.090	375	2.250	36,40	77,08
				LONG LEES	1.120				
				LONG NYELONG	709				
13	KAUBUN	5	15.725	BUMI ETAM	4.146	217	1.302	8,28	31,40
14	RANTAU PULUNG	5	11.001	MUKTI JAYA	3.194	261	1.566	14,24	35,11
				RANTAU MAKMUR	1.266				
				TEPIAN MAKMUR	1.658	184	1.105	10,05	66,67
15	KALIORANG	50	14.448	BUKIT MAKMUR	3.954	8	48	0,33	1,21
16	SANGKULIRANG		22.906	KOLEK	674	212	424	1,85	62,91
17	SANDARAN	5	12.245	SANDARAN	1.115	51	306	2,50	6,78
				MANUBAR	3.397				
				TANJUNG MANGKALIAT	1.134	162	972	7,94	85,71
SUB JUMLAH		**210**	**271.161**		**116.445**	**8.925**	**52.701**	**19,44**	**45,26**
TOTAL JUMLAH		**570**	**418.625**		**263.909**	**24.963**	**152.523**	**36,43**	**57,79**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, PDAM, PAMDES Tahun 2013-2017

Status capaian kinerja pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap target pencapaian wilayah pelayanan daerah dengan menggunakan indikator target SPM pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. 57,79% (24.963 SL) rumah tangga atau 152.523 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan perdesaan dari 263.909 Jiwa Penduduk wilayah Pelayanan Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari:
   a. 67,69% (16.038 SL) rumah tangga atau 99.822 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dari 24.578 SL atau 147.646 jiwa penduduk wilayah pelayanan perkotaan;
   b. 45,26 % (8.925 SL) rumah tangga atau 52.701 Jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan dari 45.194 SL atau 116.445 Jiwa jumlah penduduk pelayanan wilayah pedesaan.
2. Cakupan pelayanan air minum dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terdiri dari PDAM, PAMDES, dan PAMSIMAS:
   a. Melalui PDAM melayani bidang air minum kepada masyarakat pada wilayah pelayanan zona Perkotaan yaitu: Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, pelayanan zona Pedesaan yaitu: Kec. Bengalon (Sepaso, Sepaso Timur, Sepaso Barat, Sekerate), Kec. Muara Wahau (Nehes Liang Bing, Wanasari, Wahau Baru, Muara Wahau, Jak Luay), Kongbeng (Miaw Baru), Kec.Muara Bengkal (Muara Bengkal Ulu, Benua Baru), Kec. Muara Ancalong (Kelinjau Ilir, Kelinjau Ulu, Senyiur), Kec. Teluk Pandan (Teluk Pandan, Kandolo,) Kec. Batu Ampar (Batu Timbau), Kec. Long Masengat (Sumber Sari, Mukti Utama), Kec. Karangan (Karangan Dalam, Karagan Ilir), Kec. Telen (Juk Alak, Muara Pantun), Kec. Busang (Long Pejeng, Long Lees, Long Nyelong), Kec. Kaubun (Bumi Etam), Kec. Rantau Pulung (Mukti Jaya, Rantau Makmur), Kec. Sandaran (sandaran dan Manubar).
   b. Melalui Program Peduli Desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada APBD 2017 mengadakan kegiatan peningkatan dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) di 11 (Sebelas) desa. 11 Desa tersebut adalah Himba Lestari, Mugi Rahayu, Jak Kolek, Kombeng Indah, Long Melah, Tanjung Mangkaliat, Lestari Telaga, Tepian Langsat dan Tepan Makmur.
   c. Melalui Pamsimas

      Melalui program berbasis masyarakat, pemerintah kabupaten Kutai Timur mengadakan kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat dimulai pada tahun 2017. Melalui APBD Kabupaten Kutai Timur, pada Tahun 2017 program PAMSIMAS III sudah melayani 9 Desa untuk akses air minum layak di pedesaan. Adapun 9 Desa tersebut

adalah Desa Sika Makmur, Desa Tanah Abang, Desa Rantau Panjang, Desa Long Segar, Desa Long Noran, Desa Manunggal Jaya, Desa Sempayau, Desa Martadinata dan Desa Danau Redan

Diagram 2.4
Persentase Perbandingan Pencapaian Pelayanan Teknis Air Minum Layak Tahun 2017





Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, PDAM, PAMDES Tahun 2013-2017

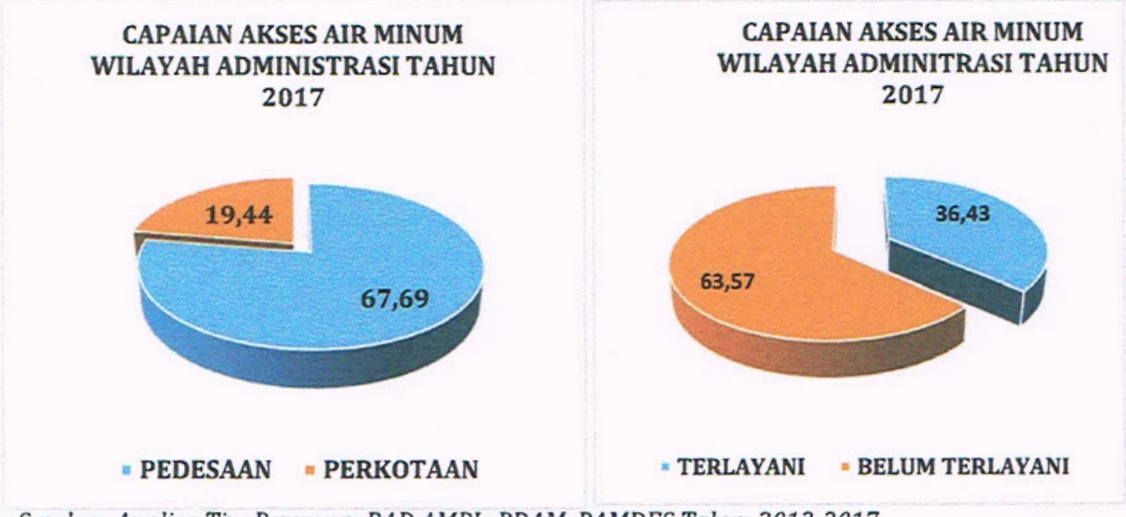
Keberadaan sistem sanitasi yang layak di lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara umum jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terlindung di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 51,58 % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak yang juga dan pada tahun 2013 hanya sebesar 29,09 % rumah tangga yang mengakses air minum terlindung dari seluruh desa di kabupaten Kutai Timur.

Dilihat dari tabel. 2.4 diatas kondisi kelayakan air minum dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017, terlihat bahwa rumah tangga untuk wilayah perkotaan desa yang memiliki akses air minum yang baik yaitu Kota Sangatta Utara 75,19% (14.599 SL atau 90.948 Jiwa) dari 120.955 Jiwa . Untuk wilayah pedesaan yang memiliki akses air minum yang baik , yaitu: desa Batu Timbau 96,51 % (456 SL atau 2.736 jiwa)dari 2835 jiwa, desa Tanjung Mangkaliat 85,71 % (162 SL atau 972 Jiwa) dari 1134 Jiwa, desa Himba Lestari 85,71 % (177 SL atau 1060 Jiwa) dari 1.237 Jiwa, kecamatan Muara Bengkal 83,70 % (974 SL atau 5844 Jiwa)dari 14.178 jiwa, kecamatan Busang 77 ,08 % (375 SL atau 2250 jiwa) dari 6.181 jiwa, dan desa Kolek 62,91% (212 SL atau 424 jiwa) dari 674 jiwa.

Sedangkan Apabila di lihat pada grafik tabel 2.4 diatas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kecamatan dan desa yang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk wilayah perkotaan memiliki akses air minum pada desa Sangatta Selatan dan Desa Singa Geweh 33,48% (1.479 SL atau 8.874 jiwa) dari 4419 SL atau 26.509 Jiwa. Untuk wilayah pedesaan terdapat 26 desa dibawah 60 % terhadap akses air minum layak yaitu tiga terendah pada desa Bukit Makmur 1,21% (8 SL atau 48 jiwa)dari 3954 jiwa, desa Sandaran dan desa Manubar 6,78% (51 SL atau 306 jiwa) dari 4512 jiwa, desa Teluk Pandan dan desa Kandolo 20,72% (195 SL atau 1.170 jiwa). Tetapi dari 141 desa terdapat 95 desa yang belum mendapatkan pelayanan air minum layak dar pemerintah daerah pada tahun 2017.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan ada yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan ada pula yang dikelola oleh Pemerintah setempat. Sistem perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Sistem perpipaan yang dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, adalah berupa jaringan perpipaan yang dibangun melalui SPAM IKK maupun melalui paket program PAMSIMAS yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui fasilitator PAMSIMAS, dan PAMDES yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat melalui fasilitator PAMDES. Untuk pengelolaan sistem non perpipaan, pada umumnya dikelola secara individu oleh masyarakat dan sarananya dalam bentuk sumur gali, sistem penampungan air hujan, sumur bor dan lain-lain.

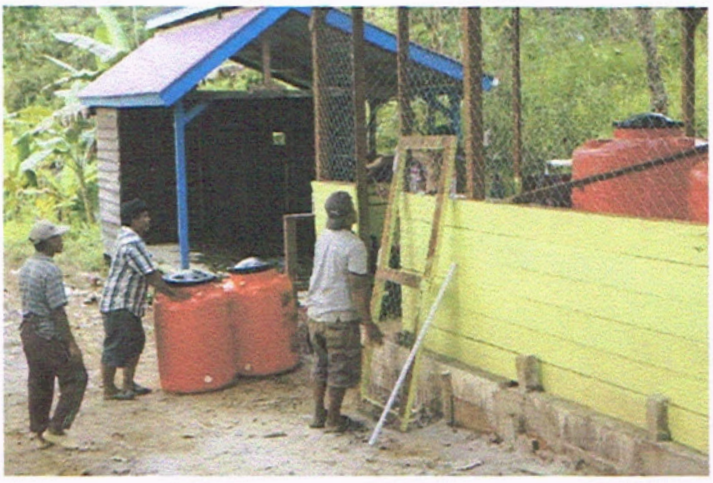
Diagram 2.5
Persentase Wilayah Pelayanan Air Minum Rumah Tangga PDAM dan Non-PDAM terhadap seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017



Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL, PDAM, PAMDES Tahun 2013-2017

Status capaian kinerja pelayanan air minum pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap seluruh wilayah kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan indikator target SPM pada tahun 2017 adalah 36 % (24.963 SL atau 152.523 jiwa) akses layak dan 44.350 SL atau 266.102 jiwa yang belum mendapatkan pelayanan air minum dari pemerintah kabupaten Kutai Timur.

Gambar 2.2
Pelayanan Air minum Program Pamdes Tahun 2016-2017





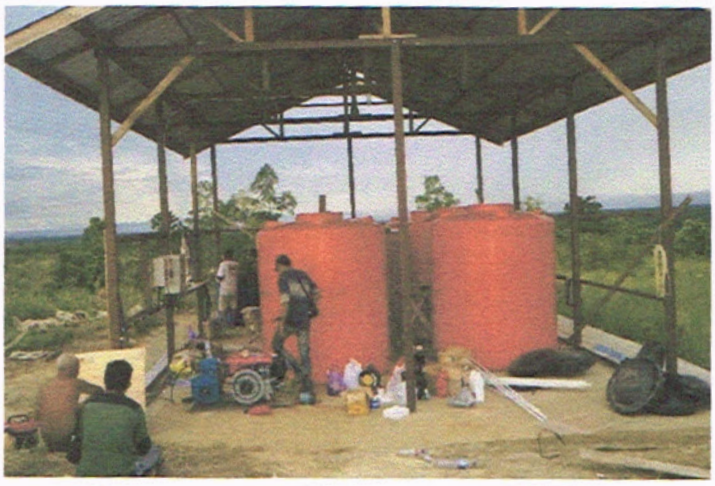


Desa Himba Lestari
Sumber: Dokumentasi 2016-2017 (Pamdesa)





Desa Jak Luay
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)





Desa Kolek
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)





Desa Kombeng Indah
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)



Desa Long Melah
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)





Desa Mugi Rahayu
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)







Desa Mukti Lestari
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)



Desa Tepian Makmur
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)











Desa Tepian Langsat
Sumber: Dokumentasi 2016/2017 (Pamdes)

Gambar 2.2
Pelayanan Air minum Program PAMSIMAS Tahun 2017

No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
1	Sika Makmur	Long Mesangat	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • RKM-I = Rp.349.740.000 (setelah audit BPKP)	Intake PMA, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 37 - RKM-II (100%) dalam proses perencanaan



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
2	Tanah Abang	Long Mesangat	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • RKM-I = Rp.349.029.000 (setelah audit BPKP)	Intake Sumur Gali, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 25 - RKM-II (100%) dalam proses perencanaan



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
3	Rantau Panjang	Telen	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • RKM-I = Rp.349.371.900 (setelah audit BPKP)	Intake Sungai, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 25 - RKM-II (DAK Penugasan) = Rp.224.756.000 - RKM-III (100%) = Rp.149.493.000



Sumber: Analisa PAMSIMAS Tahun 2017

No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
4	Long Segar	Telen	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • RKM-I = Rp.349.807.000 (setelah audit BPKP)	Intake Sungai, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 31 - RKM-II (DAK Penugasan) = Rp.185.955.000 - RKM-III (100%) = Rp.68.314.000



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
5	Long Noran	Telen	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • RKM-I = Rp.346.913.300 (setelah audit BPKP)	Intake Sungai, Reservoir, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 24 - RKM-II (100%) = Rp.453.127.000



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
6	Manunggal Jaya	Rantau Pulung	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • Non-sharing APBDes, APBDP TA.2017 • RKM-I = Rp.599.754.000 (setelah audit BPKP)	Intake Embung, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 2 - RKM-II (100%) = Rp.369.421.000



Sumber: Analisa PAMSIMAS Tahun 2017

No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
7	Sempayau	Sangkulirang	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • CSR PT.GAM = Rp.314.920.000 • Total RKM-I = Rp.498.790.000 (setelah audit BPKP)	Intake Sumur Bor, Menara Air, Perpipaan	Sarana CTPS, Jamban Sekolah	Berfungsi, tidak maksimal	- SR 100% (230 KK) - Bantuan CSR : Sumur Bor, Menara Air dan Pipa Distribusi Utama



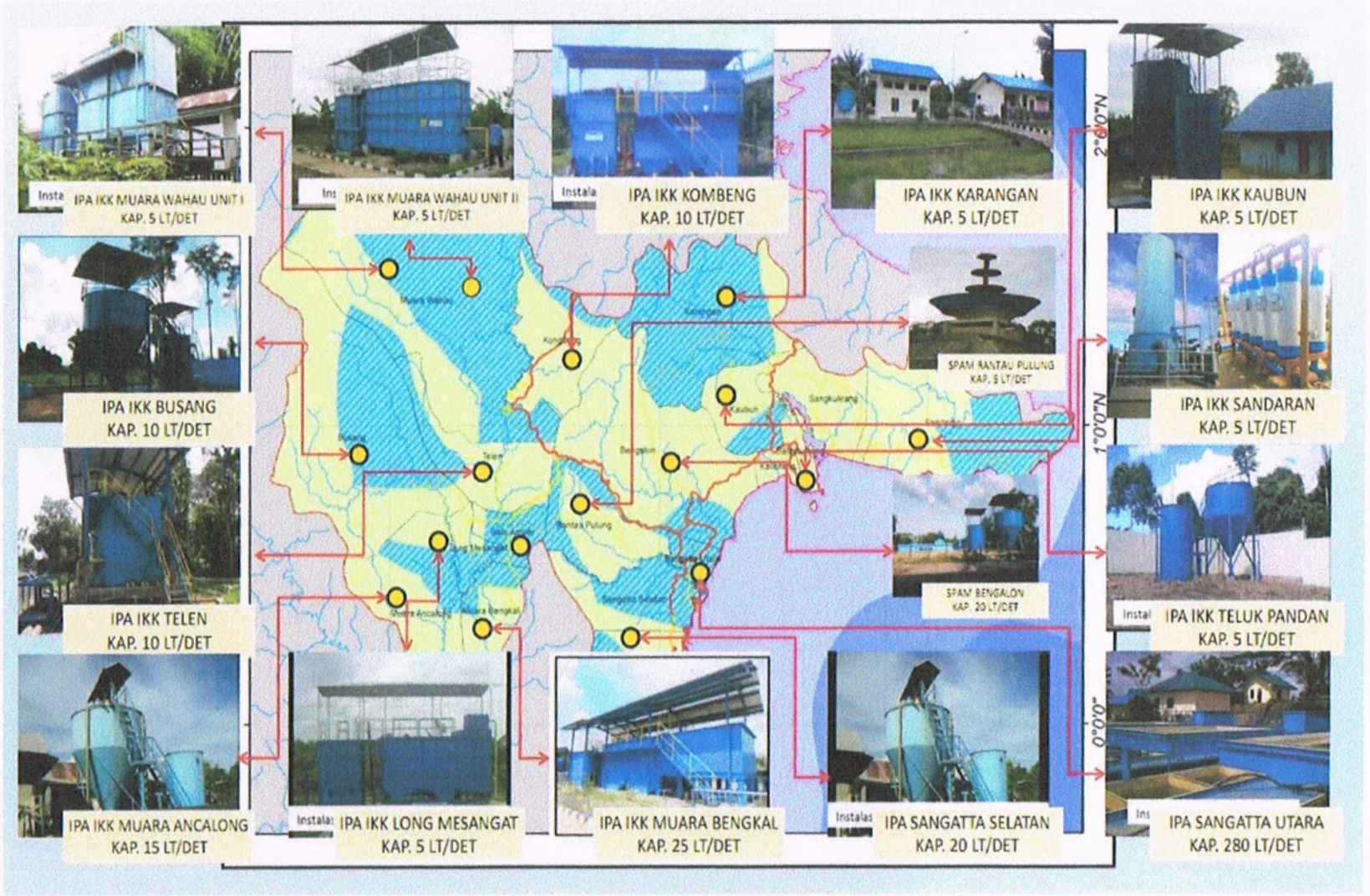
No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
8	Martadinata	Teluk Pandan	Reguler APBD, APBDes, InCash, InKind. Total Rp.200jt (telah diaudit BPK)	Intake Sumur Bor, Reservoir	Sarana CTPS	Belum Berfungsi	- SR = 0 - RKM-II (100%) = Rp.712.302.000



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terba-ngun	Keber fungsian	Keterangan
9	Danau Redan	Teluk Pandan	Reguler APBD, APBDes, InCash, InKind. Total Rp.305.000.000 (telah diaudit BPK)	Intake Mata Air, Perpipaan	Sarana CTPS	Belum Berfungsi	- Instalasi pipa belum sampai titik layan. SR = 0 - RKM-II (DAK Penugasan) = Rp.451.560.000 - RKM-III (100%) = Rp.280.688.000



Sumber: Analisa PAMSIMAS Tahun 2017



Sumber: Analisa PDAM Tahun 2018

Gambar 2.2
Pelayanan Air minum Program PAMSIMAS Tahun 2017

No	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keber fungsian	Keterangan
1	Sika Makmur	Long Mesangat	•Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. •RKM-I = Rp.349.740.000 (setelah audit BPKP)	Intake PMA, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 37 - RKM-II (100%) dalam proses perencanaan



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keber fungsian	Keterangan
2	Tanah Abang	Long Mesangat	•Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. •RKM-I = Rp.349.029.000 (setelah audit BPKP)	Intake Sumur Gali, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 25 - RKM-II (100%) dalam proses perencanaan



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keber fungsian	Keterangan
3	Rantau Panjang	Telen	•Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. •RKM-I = Rp.349.371.900 (setelah audit BPKP)	Intake Sungai, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 25 - RKM-II (DAK Penugasan) = Rp.224.756.000 - RKM-III (100%) = Rp.149.493.000



Sumber: Analisa PAMSIMAS Tahun 2017

No	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keberfungsian	Keterangan
4	Long Segar	Telen	•Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. •RKM-I = Rp.349.807.000 (setelah audit BPKP)	Intake Sungai, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 31 - RKM-II (DAK Penugasan) = Rp.185.955.000 - RKM-III (100%) = Rp.68.314.000



No	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keberfungsian	Keterangan
5	Long Noran	Telen	•Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. •RKM-I = Rp.346.913.300 (setelah audit BPKP)	Intake Sungai, Reservoir, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 24 - RKM-II (100%) = Rp.453.127.000



No	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keberfungsian	Keterangan
6	Manunggal Jaya	Rantau Pulung	•Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. •Non-sharing APBDes, APBDP TA.2017 •RKM-I = Rp.599.754.000 (setelah audit BPKP)	Intake Embung, Menara Air, Bak Pengolah, Perpipaan, KU	Sarana CTPS	Berfungsi, tidak maksimal	- Realisasi SR = 2 - RKM-II (100%) = Rp.369.421.000



Sumber: Analisa PAMSIMAS Tahun 2017

No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keberfungsian	Keterangan
7	Sempayau	Sangkulirang	• Reguler APBN, APBDes, InCash, InKind. • CSR PT.GAM = Rp.314.920.000 • Total RKM-I = Rp.498.790.000 (setelah audit BPKP)	Intake Sumur Bor, Menara Air, Perpipaan	Sarana CTPS, Jamban Sekolah	Berfungsi, tidak maksimal	- SR 100% (230 KK) - Bantuan CSR : Sumur Bor, Menara Air dan Pipa Distribusi Utama



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keberfungsian	Keterangan
8	Martadinata	Teluk Pandan	Reguler APBD, APBDes, InCash, InKind. Total Rp.200jt (telah diaudit BPK)	Intake Sumur Bor, Reservoir	Sarana CTPS	Belum Berfungsi	- SR = 0 - RKM-II (100%) = Rp.712.302.000



No.	Desa	Kecamatan	Realisasi Pendanaan	SAM Terbangun	SAN Terbangun	Keberfungsian	Keterangan
9	Danau Redan	Teluk Pandan	Reguler APBD, APBDes, InCash, InKind. Total Rp.305.000.000 (telah diaudit BPK)	Intake Mata Air, Perpipaan	Sarana CTPS	Belum Berfungsi	- Instalasi pipa belum sampai titik layan, SR = 0 - RKM-II (DAK Penugasan) = Rp.451.560.000 - RKM-III (100%) = Rp.280.688.000



Sumber: Analisa PAMSIMAS Tahun 2017

2.2.2 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH TERHADAP BIDANG SANITASI

Tabel. 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan Sanitasi Tahun 2014

NO.	KECAMATAN/DESA	URAIAN		JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
		IPAL (UNIT)	SEPTITANCK (KK)				SL	JIWA	ADMINIS TRASI (%)	TEKNIS (%)
	PERKOTAAN									
1	SANGATTA UTARA :									
		5		130.268	SANGATTA UTARA	59.368	5	250	0,19	0,42
					TELUK LINGGA		-	-		
2	SANGATTA SELATAN :									
				26.066	SANGATTA SELATAN		-	-		
					SINGA GEWEH					
	SUB JUMLAH	**5**	**-**	**156.334**		**59.368,00**	**5**	**250**	**0,16**	**0,42**
	PEDESAAN									
1	SANGATTA SELATAN :									
				7.337	SANGKIMA		-	-		
					TELUK SINGKAMA					
2	BENGALON:									
		2		39.221	SEPASO	10.579	2	100	0,25	0,95
					TEPIAN BARU		-	-		
3	SANGKULIRANG:									

		2		20.560	BENUA BARU ILIR	6.079	2	100	0,49	1,65
4	SANDARAN:									
				9.693	SANDARAN					
5	RANTAU PULUNG:									
				9.104	BENUA BARU ILIR		-	-		
6	KALIORANG:									
				13.056	KALIORANG		-	-		
7	MUARA WAHAU:									
				26.624	MUARA WAHAU		-	-		
					NEHES LIANG BING		-	-		
8	KONGBENG:									
				25.184	KONGBENG		-	-		
9	TELEN:									
				9.706	TELEN		-	-		
10	MUARA BENGKAL:									
				16.604	MUARA BENGKAL		-	-		
11	MUARA ANCALONG:									
				15.470	MUARA ANCALONG		-	-		
12	BUSANG:									
				6.066	BUSANG		-	-		
13	TELUK PANDAN									
				18.754	TELUK PANDAN		-	-		
14	KAUBUN									

				12.595	KAUBUN		-	-		
15	KARANGAN									
				13.067	KARANGAN		-	-		
16	LONG MASENGAT									
				7.399	LONG MASENGAT		-	-		
17	BATU AMPAR:									
				5.924	BATU AMPAR		-	-		
SUB JUMLAH		**4**		**256.364**		**16.658**	**4**	**200**	**0,08**	**1,20**
TOTAL JUMLAH		**9**		**412.698**		**76.026**	**9**	**54**	**0,013**	**0,07**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL TAHUN 2018-2021, DAK Tahun 2014

Tabel. 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Sanitasi Tahun 2015

NO.	KECAMATAN/DESA	URAIAN		JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
		IPAL (UNIT)	SEPTITANCK (KK)				SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)
	PERKOTAAN									
1	SANGATTA UTARA :									
		21		128.763	SANGATTA UTARA	58.426	21	1.050	0,82	1,80
					TELUK LINGGA					
2	SANGATTA SELATAN :									
				25.368	SANGATTA SELATAN					
					SINGA GEWEH					

	SUB JUMLAH	**21**		**154.131**		**58.426**	**21**	**1.050**	**0,68**	**1,80**
	PEDESAAN									
1	SANGATTA SELATAN :									
				7.237	SANGKIMA					
					TELUK SINGKAMA					
2	BENGALON:									
		18		38.808	SEPASO	10.041	18	900	2,32	8,96
					TEPIAN BARU					
3	SANGKULIRANG:									
		2		20.457	BENUA BARU ILIR	5.690	2	100	0,49	1,76
4	SANDARAN:									
				9.825	SANDARAN					
5	RANTAU PULUNG:									
				9.732	BENUA BARU ILIR					
6	KALIORANG:									
				13.573	KALIORANG					
7	MUARA WAHAU:									
				26.868	MUARA WAHAU					
					NEHES LIANG BING					
8	KONGBENG:									
				24.923	KONGBENG					
9	TELEN:									
				9.801	TELEN					
10	MUARA BENGKAL:									

		2		16.035	MUARA BENGKAL	16.035	2	100	0,62	0,62
11	MUARA ANCALONG:									
				14.821	MUARA ANCALONG		-	-		
12	BUSANG:									
				6.418	BUSANG		-	-		
13	TELUK PANDAN									
				19.693	TELUK PANDAN		-	-		
14	KAUBUN									
				12.700	KAUBUN		-	-		
15	KARANGAN									
				13.450	KARANGAN		-	-		
16	LONG MASENGAT									
				7.836	LONG MASENGAT		-	-		
17	BATU AMPAR:									
				6.151	BATU AMPAR		-	-		
SUB JUMLAH		**22**	**-**	**258.328**		**31.766**	**22**	**1.100**	**0,43**	**3,46**
TOTAL JUMLAH		**43**	**-**	**412.459**		**90.192**	**43**	**2.150**	**0,52**	**2,38**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL TAHUN 2018-2021, DAK Tahun 2014-2015

Tabel. 2.7
Capaian Kinerja Pelayanan Sanitasi Tahun 2016

NO.	KECAMATAN/DESA	URAIAN		JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
		IPAL (JIWA)	SEPTITANCK (KK)				SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)
	PERKOTAAN									
1	SANGATTA UTARA :									
	SANGATTA UTARA	21		119.855	SANGATTA UTARA	56.330	21	1.050	0,88	1,86
	TELUK LINGGA				TELUK LINGGA	27.061	-			-
2	SANGATTA SELATAN :									
	SANGATTA SELATAN			26.381	SANGATTA SELATAN		-			
					SINGA GEWEH					
	SUB JUMLAH	**21**	-	**146.236**	-	**83.391**	**21**	**1.050**	**0,72**	**1,26**
	PEDESAAN									
1	SANGATTA SELATAN :									
				5.048	SANGKIMA					
					TELUK SANGKIMA					
1	BENGALON:									
	SEPASO	18		43.086	SEPASO	9.310	18	900	2,09	9,67
	TEPIAN BARU				TEPIAN BARU		-			
2	SANGKULIRANG:									
	BENUA BARU ILIR	2		22.831	BENUA BARU ILIR	5.308	2	100	0,44	1,88
3	SANDARAN:									

				12.146	SANDARAN					
4	RANTAU PULUNG:									
				10.956	BENUA BARU ILIR		-			
5	KALIORANG:									
				14.445	KALIORANG		-			
6	MUARA WAHAU:									
	MUARA WAHAU			26.426	MUARA WAHAU		-			
	NEHES LIANG BING				NEHES LIANG BING		-			
7	KONGBENG:									
				27.997	KONGBENG		-			
8	TELEN:									
				11.625	TELEN		-			
9	MUARA BENGKAL:									
		2		13.832	MUARA BENGKAL	13.832	2	100	0,72	0,72
10	MUARA ANCALONG:									
				13.067	MUARA ANCALONG		-	-		
11	BUSANG:									
				6.174	BUSANG		-	-		
12	TELUK PANDAN									
				16.506	TELUK PANDAN		-	-		
13	KAUBUN									
				15.700	KAUBUN		-	-		

14	KARANGAN									
				14.550	KARANGAN		-	-		
15	LONG MASENGAT									
				7.682	LONG MASENGAT		-	-		
16	BATU AMPAR:									
				7.246	BATU AMPAR		-	-		
SUB JUMLAH		**22**	**-**	**269.317**	**-**	**28.450**	**22**	**1.100**	**0,41**	**3,87**
TOTAL JUMLAH		**43**		**415.553**	**-**	**111.841**	**43**	**2.150**	**0,52**	**1,92**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL TAHUN 2018-2021, DAK Tahun 2014-2015 (TIDAK ADA PELAKSANAAN DAK TAHUN 2016)

Tabel. 2.8
Capaian Kinerja Pelayanan Sanitasi Tahun 2017

NO.	KECAMATAN/DESA	URAIAN		JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
		IPAL (JIWA)	SEPTITANCK (KK)				SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)
	PERKOTAAN									
1	SANGATTA UTARA :									
		31		120.955	SANGATTA UTARA	56.520	31	1.550	1,28	2,74
		5			TELUK LINGGA	27.588	5	250	0,21	0,91
2	SANGATTA SELATAN :									
		5		26.509	SANGATTA SELATAN	17.977	5	250	0,94	1,39
					SINGA GEWEH					

	SUB JUMLAH	**41**	**-**	**147.464**	**-**	**102.085**	**41**	**2.050**	**1,39**	**2,01**
	PEDESAAN									
3	SANGATTA SELATAN :									
				5.076	SANGKIMA					
					TELUK SINGKAMA					
1	BENGALON:									
		23		42.602	SEPASO	9.289	23	1.150	2,70	12,38
					TEPIAN BARU	3.722	-	-		-
2	SANGKULIRANG:									
		7		22.906	BENUA BARU ILIR	5.318	7	350	1,53	6,58
3	SANDARAN:									
				12.245	SANDARAN					
4	RANTAU PULUNG:									
				11.001	BENUA BARU ILIR		-	-		
5	KALIORANG:									
				14.448	KALIORANG		-	-		
6	MUARA WAHAU:									
				28.014	MUARA WAHAU		-	-		
					NEHES LIANG BING		-	-		
7	KONGBENG:									
				28.444	KONGBENG		-	-		
8	TELEN:									
				11.475	TELEN		-	-		

9	MUARA BENGKAL:									
		2		14.178	MUARA BENGKAL	14.178	2	100	0,71	0,71
10	MUARA ANCALONG:									
				13.377	MUARA ANCALONG		-	-		
11	BUSANG:									
				6.181	BUSANG		-	-		
12	TELUK PANDAN									
				16.178	TELUK PANDAN		-	-		
13	KAUBUN									
				15.725	KAUBUN		-	-		
14	KARANGAN									
				14.376	KARANGAN		-	-		
15	LONG MASENGAT									
				7.549	LONG MASENGAT		-	-		
16	BATU AMPAR:									
				7.386	BATU AMPAR		-	-		
SUB JUMLAH		**32**	**-**	**271.161**	**-**	**32.507**	**32**	**1.600**	**0,59**	**4,92**
TOTAL JUMLAH		**73**	**-**	**418.625**	**-**	**134.592**	**73**	**3.650**	**0,87**	**2,71**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL TAHUN 2018-2021, DAK Tahun 2014-2017

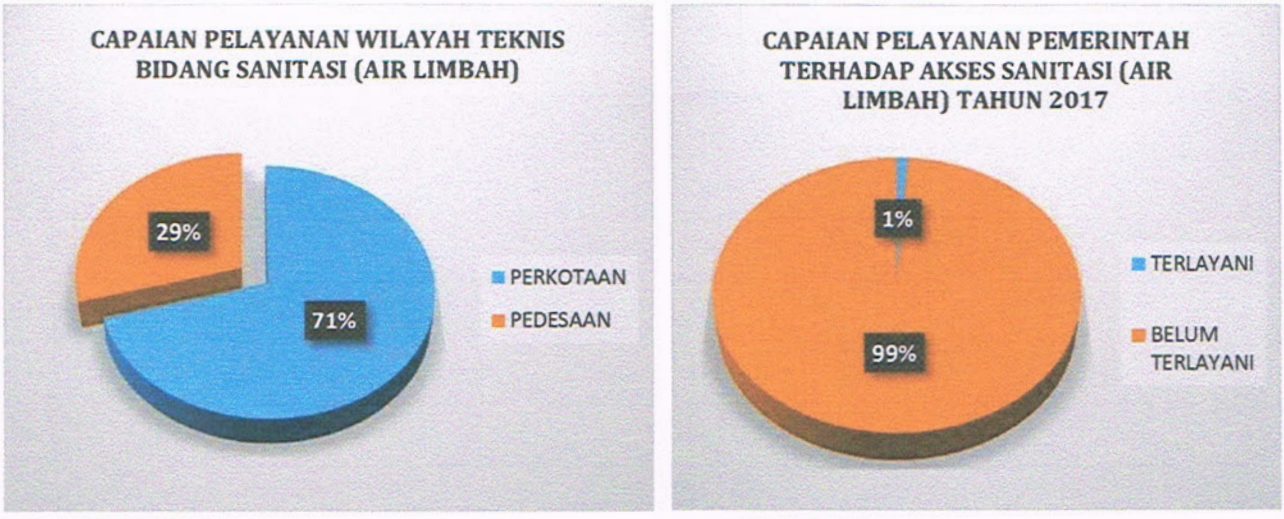
Tabel. 2.9
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Wilayah Teknis Sanitasi Tahun 2014 – 2017

NO.	KECAMATAN	CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SANITASI WILAYAH TEKNIS PER TAHUN (%)			
		2014	2015	2016	2017
	PERKOTAAN				
1	SANGATTA UTARA :				
1.1.	SANGATTA UTARA	0,42	1,80	1,86	2,74
1.2	TELUK LINGGA	-	-	-	0,91
2	SANGATTA SELATAN :				
2.1	SANGATTA SELATAN	-	-	-	1,39
2.1	SINGA GEWEH				
	SUB JUMLAH	**0,21**	**0,99**	**1,04**	**1,85**
	PEDESAAN				
1	SANGATTA SELATAN :				
1.1	SANGKIMA	-	-	-	-
2.1	SANGKIMA	-	-	-	-
2	BENGALON:				
2.1	SEPASO	0,95	8,96	9,67	12,38
2.2	TEPIAN BARU			-	-
3	SANGKULIRANG:				
3.1	BENUA BARU ILIR	1,65	1,76	1,88	6,58
4	SANDARAN:				
5	RANTAU PULUNG:				
6	KALIORANG:				
7	MUARA WAHAU:				
6.1	MUARA WAHAU	-	-	-	-
6.2	NEHES LIANG BING	-	-	-	-
8	KONGBENG:				
9	TELEN:				
10	MUARA BENGKAL:		0,62	0,72	0,71
11	MUARA ANCALONG:				
12	BUSANG:				
13	TELUK PANDAN				

14	KAUBUN				
15	KARANGAN				
16	LONG MASENGAT				
17	BATU AMPAR:				
SUB JUMLAH		**0,10**	**0,54**	**0,53**	**0,77**
TOTAL JUMLAH		**0,02**	**0,70**	**0,70**	**1,15**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMP Tahun 2018-2021, DAK 2014-2017

Diagram 2.6
Persentase Capaian Pelayanan Wilayah Teknis Pemerintah Bidang Sanitasi (Air Limbah)Tahun 2017



Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMP Tahun 2018-2021, DAK 2014-2017

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi(air limbah) pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap target pencapaian wilayah pelayanan daerah dengan menggunakan indikator target SPM pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. 1,55% (73 SL) rumah tangga atau 3650 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan dari 134.592 Jiwa Penduduk wilayah Pelayanan Kabupaten Kutai Timur , terdiri dari:
   a. 2,01% (41 SL) rumah tangga atau 2050 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dari 102.085 jiwa penduduk wilayah pelayanan perkotaan;
   b. 4,92 % (32 SL) rumah tangga atau 1.600 Jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap snitasi layak perdesaan dari 134,592 Jiwa jumlah penduduk pelayanan wilayah pedesaan.
2. Cakupan pelayanan sanitasi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terdiri dari APBN (DAK) dan PAMSIMAS:

a. Melalui APBN (DAK) 2014-2017 melayani bidang Sanitasi (Air Limbah) kepada masyarakat pada wilayah pelayanan zona Perkotaan yaitu: kota Sangatta Utara 2,74 % (1.150 jiwa) dari 56.520 jiwa, Kelurahan Teluk Lingga 0,91 % (250 jiwa) dari 27.588 jiwa dan Sangatta Selatan 1.39% (250 jiwa) dari 17.977. Sedangkan pelayanan zona Pedesaan yaitu: Kec. Bengalon Desa Sepaso 12,38 5(1150 jiwa) dari 9.289 jiwa, kec. Sangkulirang Desa Benua Baru Ilir 6,58% (350 jiwa) dari 5.318 jiwa dan kec. Muara Bengkal 0,71% (100 jiwa) dari 14.178 jiwa.

Dari tabel. 2.7 dapat dilihat bahwa pelayanan bidang sanitasi (air limbah) masih dibawah standart yang dtentukan. Untuk wilayah teknis pelayanan sanitasi (air limbah) hanya mencapai 2,71% (3.650 jiwa) dari 134.592 jiwa zona perkotaan dan pedesaan. Sedangkan untuk wilayah administrasi mencapai 0,87% (3.650 jiwa) dari 418.625 jiwa penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Menurut *World HealthOrganization* (WHO) sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan.

Sesuai UU 32/2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kutai Timur sampai dengan bulan desember Tahun 2017 berdasarkan data dari survey dinas Kesehatan dan kinerja sanitasi dinas Pekerjaan Umum, dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada zona Perkotaan mencapai 42,9% dari jumlah penduduk 4 desa mandiri, sedangkan pada zona pedasaan mencapai 57,06% dari jumlah penduduk 129 desa berkembang dan tertinggal. Program berbasis masyarkat yang dilakukan dalam upaya pencapain akses sanitasi layak oleh Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2017 yaitu Program PAMSIMAS .

2.3. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK

Sarana air minum yang termasuk dalam indikator SDGs adalah Air yang berasal dari sistem perpipaan, sumur gali terlindungi, sumur bor terlindungi, mata air terlindungi, sumur pompa tangan terlindungi dan penampungan air hujan. Sarana air minum dikatakan terlindungi apabila sarana tersebut secara fisik memenuhi syarat misalnya ada cincin sumur setinggi minimal 3 meter, ada bibir sumur setinggi 1 meter, lantai sumur kedap air dengan radius minimal 1 meter, ada katrol dan tali timba sehingga ember yang digunakan untuk mengambil air tidak diletakkan sembarang dilantai sumur (jika tidak menggunakan pompa air), dan minimal berjarak 10 meter dari sumber pencemar misalnya pembuangan akhir tinja, kandang ternak, tempat pembuangan sampah sementara, sarana pembuangan air limbah dan sumber pencemar lainnya. Berdasarkan hasil survey Dinas Kesehatan Tahun 2017 terdapat beberapa sistem penyediaan air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur, yaitu; air kemasan, ledeng sampai rumah, ledeng eceran, pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, dan air hujan. Sebagai kabupaten yang secara umum masih memiliki karakter perdesaan, akses terhadap air minum di Kabupaten Kutai Timur masih tergantung pada sistem non perpipaan dan sumur gali masih merupakan sumber utama masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan air minum. Yang juga menarik adalah munculnya primadona baru dalam penyediaan air minum masyarakat melalui air kemasan, dimana depot air minum isi ulang makin menjamur di Kabupaten Kutai Timur. Hanya saja air kemasan/isi ulang ini berdasarkan *Global Water Supply and Sanitation 2000 Report* dikategorikan sebagai sumber air minum yang tidak layak *(unimproved).* Karena harga persatuannya lebih mahal dalam penyediaannya.

Tabel 2.10
Sumber Utama Air Minum Rumah Tangga Tahun 2016

NO	KECAMANTAN	DESA	PENDUDUK	SR/KK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN														JARINGAN PERPIPAAN		PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM		
					SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DGN POMPA TANGAN		SUMUR BOR DENGAN POMPA TANGAN		MOBIL TANGKI AIR DAN TERMINAL AIR		PERLINDUNGAN MATA AIR		PENAMPUNGAN AIR HUJAN		AIR SUNGAI		PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)				
					JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (SR)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (SR)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JIWA	SL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
I.	*PERKOTAAN*																						
1	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan, Singa Geweh	*26.381*	*4.397*	56	336					1.192	7.149			6	36	1.787	10.724	1.362	8.172	8.508	1.418	32,25
2	Sangatta Utara	Sangatta Utara	*119.855*	*19.976*	5	30					2.675	16.051					4.013	24.076	12.684	79.698	79.728	13.288	66,52
SUB JUMLAH			146.236	24.373	61	366	-	-	-	-	3.867	23.200	-	-	6	36	5.800	34.800	14.046	87.870	88.236	14.706	49,385
II.	*PEDESAAN*																						
1	Sangatta Selatan	Sangkima, Singkama Lama	*5.048*	*841*		-		-		-	337	2.019					505	3.029			-	-	0,00
2	Bengalon	Bengalon	*43.086*	*7.181*	32	192	2	12	37	222	2.443	14.659	1	6	28	119	3.665	21.989	1.001	6.006	6.438	1.073	14,94
3	Rantau Pulung	Rantau Pulung	*10.956*	*1.826*	29	174		-			650	3.898			19	70	974	5.846	173	1.038	1.212	202	11,06
4	Kaliorang	Kaliorang	*14.445*	*2.408*	76	456		-			933	5.596			68	253	1.399	8.393			456	76	3,16
5	Sangkulirang	Sangkulirang	*22.831*	*3.805*	455	2.730	1	6			1.335	8.012	1	66	50	218	2.003	12.017			2.802	467	12,27
6	Sandaran	Sandaran	12.146	*2.024*		-		-			791	4.746					1.186	7.118	47	282	282	47	2,32
7	Muara Wahau	Muara Wahau	26.426	*4.404*	25	150	7	42	3	13	1.287	7.721			4		1.930	11.582	1.153	6.918	7.123	1.187	26,95
8	Kongbeng	Kongbeng	27.997	*4.666*	1	6	1	6	1	2	1.692	10.154			7	28	2.539	15.231	433	2.598	2.612	435	9,33
9	Telen	Telen	11.625	*1.938*	1	6	2	12	6	24	636	3.815					954	5.722	341	2.046	2.088	348	17,96
10	Muara Bengkal	Muara Bengkal	13.832	*2.305*	2	12		-	2	2	554	3.326					832	4.990	917	5.502	5.516	919	39,88
11	Muara Ancalong	Muara Ancalong	13.067	*2.178*	9	54	2	12			503	3.017	1	5	1	2	754	4.525	909	5.454	5.525	921	42,28
12	Busang	Busang	6.174	*1.029*	42	252		-			253	1.519					380	2.279	354	2.124	2.376	396	38,48
13	Teluk Pandan	Teluk Pandan	16.506	*2.751*	125	750		-	4	17	968	5.806	15	78	1	4	1.452	8.709	191	1.146	1.991	332	12,06
14	Kaubun	Kaubun	15.700	*2.617*		-		-			970	5.818	1	3	17	85	1.455	8.727	192	1.152	1.155	193	7,36
15	Karangan	Karangan	14.550	*2.425*		-		-			878	5.266					1.316	7.898	231	1.386	1.386	231	9,53
16	Long Mesangat	Long Mesangat	7.682	*1.280*		-		-			429	2.576					644	3.864	207	1.242	1.242	207	16,17
17	Batu Ampar	Batu Ampar	7.246	*1.208*	7	42	1	6			300	1.800	1	3	3	15	450	2.701	449	2.694	2.745	458	37,88
SUB JUMLAH			269.317	44.045	804	4.824	16	96	53	280	14.621	87.728	20	161	198	794	21.932	131.592	6.598	39.588	44.949	7.492	17,74
TOTAL			415.553	68.418	865	5.190	16	96	53	280	18.488	110.928	20	161	204	830	27.732	166.392	20.644	127.458	133.185	22.198	67,13

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, PDAM, Pamdes, Dinkes Tahun 2017

Tabel 2.11
Sumber Utama Air Minum Rumah Tangga Tahun 2017

NO	KECAMANTAN	DESA	PENDUDUK	SR/KK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN														JARINGAN PERPIPAAN		PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM		
					SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DGN POMPA TANGAN		SUMUR BOR DENGAN POMPA TANGAN		MOBIL TANGKI AIR DAN TERMINAL AIR		PERLINDUNGAN MATA AIR		PENAMPUNGAN AIR HUJAN		AIR SUNGAI		PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)				
					JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (Unit)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (SR)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA (SR)	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JIWA	SL	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*			
I.	***PERKOTAAN***																						
1	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan, Singa Geweh	*26.509*	*4.418*	483	2.898									36	216	2.473	14.837	1.479	8.774	11.672	1.945	44,03
2	Sangatta Utara	Sangatta Utara	*120.955*	*20.159*	53	318											4.923	29.539	14.599	91.098	91.416	15.236	75,58
SUB JUMLAH			147.464	24.577	536	3.216	-	-	-	-	-	-	-	-	36	216	7.396	44.376	16.078	99.872	103.088	17.181	59,804
II.	***PEDESAAN***																						
1	Sangatta Selatan	Sangkima, Singkama Lama	*5.076*	*846*							846	5.076		-		-		-		-	-	-	0,00
2	Bengalon	Bengalon	*42.602*	*7.100*	326	1.956	63	378	231	1.386		-	1	6	325	1.950	4.722	28.334	1.757	10.542	14.268	2.378	33,49
3	Rantau Pulung	Rantau Pulung	*11.001*	*1.834*	248	1.488		-		-		-		-	354	2.124	1.184	7.101	402	2.412	3.900	650	35,45
4	Kaliorang	Kaliorang	*14.448*	*2.408*	49	294		-		-		-		-	491	2.946	1.870	11.220	489	2.934	3.228	538	22,34
5	Sangkulirang	Sangkulirang	*22.906*	*3.818*	1.075	6.450	1	6		-	3	18	3	18	659	3.954	2.527	15.160	212	1.272	7.746	1.291	33,82
6	Sandaran	Sandaran	12.245	*2.041*		-		-		-		-		-		-	1.828	10.967	213	1.278	1.278	213	10,44
7	Muara Wahau	Muara Wahau	28.014	*4.669*	73	438	95	570	39	234	22	132		-	77	462	2.966	17.796	1.496	8.976	10.218	1.703	36,47
8	Kongbeng	Kongbeng	28.444	*4.741*	260	1.560	89	534	3	18	2	12		-		-	3.933	23.596	456	2.736	4.848	808	17,04
9	Telen	Telen	11.475	*1.913*	5	30	28	168	155	930		-		-		-	1.356	8.133	369	2.214	3.342	557	29,12
10	Muara Bengkal	Muara Bengkal	14.178	*2.363*	48	288		-	2	12		-		-		-	1.339	8.034	974	5.844	6.144	1.024	43,33
11	Muara Ancalong	Muara Ancalong	13.377	*2.230*	97	582	8	48	1	6	9	54	8	48	6	36	1.112	6.669	1.004	6.024	6.708	1.118	50,15
12	Busang	Busang	6.181	*1.030*	255	1.530		-		-		-		-		-	400	2.401	375	2.250	3.780	630	61,16
13	Teluk Pandan	Teluk Pandan	16.178	*2.696*	1090	6.540		-	100	600	81	486	122	732	24	144	1.189	7.136	195	1.170	9.042	1.507	55,89
14	Kaubun	Kaubun	15.725	*2.621*	451	2.706		-		-		-	1	6	102	612	1.952	11.711	217	1.302	4.014	669	25,53
15	Karangan	Karangan	14.376	*2.396*		-		-		-		-		-		-	2.014	12.084	382	2.292	2.292	382	15,94
16	Long Mesangat	Long Mesangat	7.549	*1.258*		-		-		-		-		-		-	1.047	6.283	211	1.266	1.266	211	16,77
17	Batu Ampar	Batu Ampar	7.386	*1.231*		-	1	6	66	396		-	25	150	152	912	340	2.040	799	4.794	5.346	891	72,38
SUB JUMLAH			271.161	44.348	3.977	23.862	285	1.710	597	3.582	117	702	160	960	2.190	13.140	29.778	178.665	9.551	57.306	87.420	14.570	32,90
TOTAL			418.625	68.925	4.513	27.078	285	1.710	597	3.582	117	702	160	960	2.226	13.356	37.174	223.041	25.629	157.178	190.508	31.751	46,35

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, PDAM, Pamdes, Dinkes Tahun 2017

Diagram 2.7
Sumber Utama Air Minum Rumah Tangga Tahun 2017



	SUMUR GALI TERLINDUNG	SUMUR GALI POMPA TANGAN	SUMUR BOR	TANGKI AIR	MATA AIR TERLINDUNG	PENAMPUNGAN AIR HUJAN	AIR SUNGAI	PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)
PEDESAAN	3.977	285	597	117	160	152	29.778	9.551
PERKOTAAN	536	-	-	-	-	36	7.396	16.078

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, PDAM, Pamdes, Dinkes Tahun 2017

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Kutai Timur mengkonsumsi air minum bersumber dari sumur terlindung adalah sebesar 2,18% untuk zona perkotaan dan 8,97% zona pedesaan, sumur Gali Pompa sebesar 0,64% , sumur bor sebesar 1,35 %, mata air terlindungi 0,36% dan dari ledeng/sistem perpipaan sebesar 21,54 % untuk zona pedesaan, 65,42 % untuk zona perkotaan. Sehingga untuk akses air minum layak rumah tangga pada zona perkotaan 54,86 % atau 100.249 Jiwa (17.181 SL)

Namun demikian, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tidak sehat seperti: sumur tidak terlindung, mobil tangki air, penampungan air hujan dan air sungai atau mata air tidak terlindungi masih besar, masing-masing besarnya 40, 66% atau 44.592 Jiwa pada zona perkotaan dan 66,19% atau 192.507 Jiwa pada zona pedesaan.

Diagram 2.8
Persentase Akses Air Minum Rumah Tangga Tahun 2017







Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL TAHUN 2018-2021,PDAM, PAMDES, Dinkes Tahun 2017

Apabila dikategorikan pada kelayakan penyediaan air minum masyarakat berdasarkan definisi sarana air minum dan sanitasi yang layak *(improved),* maka masih terdapat 57% (39.517 SL)rumah tangga yang memperoleh air minum yang dikategorikan belum layak *(unimproved).* Penyediaan air minum yang tidak layak yaitu penyediaan air minum yang bersumber dari air kemasan, ledeng eceran (truk tangki), sumur dan mata air tak terlindung, sungai dan air hujan yang tidak diolah. Kondisi kelayakan ini baru dihitung dengan indikator kondisi sumber air baku rumah tangga berdasarkan data penduduk Capil kabupaten Kutai Timur, namun kajian dan pendalaman informasi lebih lanjut masih diperlukan. Kajian dan pendalaman informasi tersebut diperlukan karena besarnya resiko sumber air masyarakat akan terpengaruh oleh kondisi PHBS yang relatif masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap kelayakan sumber air.

Secara umum jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terlindung di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 49.385 % (14.705 SL) zona perkotaan dan 17,74 % (7.492 SL) zona pedesaan.

Dilihat dari kondisi kelayakan air minum dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017, terlihat bahwa rumah tangga memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber air minum yang layak zona perkotaan didesa Sangatta Utara 75,58 % (15. 236 SL atau 91.416 Jiwa) dan zona pedesaan di kecamatan Busang 61, 16% (630 SL atau 3.780 Jiwa) dan kecamatan Batu Ampar 72, 38% (14.570 SL atau 87.420 Jiwa).

Sedangkan rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum yang tidak layak perkotaan masih sangat besar yaitu terdapat didesa Sangatta Selatan 44,03% (1.945 SL atau 11.672) dari 4. 418 SL atau 26.509 Jiwa dan zona pedesaan memiliki rata- rata 32,90% (14.570 SL atau 87.420 Jiwa) dari 44.348 SL atau 271.161 Jiwa dan mirisnya masih ada desa sangat buruk dibawah standar pelayanan minimal (SPM) yaitu dikecamatan Sandaran 10,44 % (213 SL atau 1278 Jiwa) dari 2.041 SL atau 12.245 Jiwa, kecamatan Karangan 15,94% (382 SL atau 2.292 Jiwa) dari 14.376 Jiwa atau 2.396 SL. Apabila di lihat pada tabel 2.10 di atas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.4. SISTEM PELAYANAN PERPIPAAN (PDAM)

Pelayanan air minum di Kabupaten Kutai Timur memiliki badan pengelolaan air minum yaitu: PDAM. PDAM telah dimulai sejak awal tahun 1980 yang waktu itu masih dikelola oleh PDAM Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur dengan unit pelayanan Kecamatan Sangatta Utara (Unit Kabo, Unit Kudungga, Unit Bukit Pelangi), Kecamatan Bengalon (Unit Pembantu Sekrate), Kecamatan Muara Wahau (Unit Pembantu Wahau), Kecamatan Muara Ancalong (Unit Pembantu Senyiur) dan SPAM IKK. Pelayanan air minum sistem perpipaan di Kabupaten Kutai Timur dikelola oleh PDAM Kabupaten Kutai Timur yaitu dimulai sejak tahun 2005.

Cakupan pelayanan air minum PDAM Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 adalah sebanyak 23.262 Sambungan Rumah (SR) dengan pelayanan terhadap 418.625 jiwa atau 56,89% dari seluruh jumlah penduduk tahun 2017.

Tabel.2.12
Capaian Pelayanan PDAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

NO.	CABANG/ UNIT	KAPASITAS TERPASANG	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
						SL	JIWA	ADMINISTRASI	TEKNIS
1	SANGATTA UTARA :		120.955	SANGATTA UTARA	56.520	14.559	90.948	75,19	75,19
	- IPA KABO JAYA	280		TELUK LINGGA	27.588				
	- IPA BUKIT PELANGI	10		SINGA GEMBARA	20.497				
	- IPA KUDUNGGA	50		SWARGA BARA	16.350				
				BUKIT PELANGI					
2	SANGATTA SELATAN	20	31.585	SANGATTA SELATAN	17.977	1.479	8.874	28,10	33,48
				SINGA GEWEH	8.532				
	SUB JUMLAH	**360**	**152.540**		**147.464**	**16.038**	**99.822**	**65,44**	**67,69**
3	BENGALON :								
	1. BENGALON	20	42.602	SEPASO	9.289	1.097	6.582	15,45	27,12
				SEPASO TIMUR	4.799				

				SEPASO BARAT	6.954				
	2. SEKERAT	10		SEKERAT	3.231				
4	MUARA WAHAU :		28.014						
	1. WAHAU I	5		MUARA WAHAU	7.728	1.299	7.794	27,82	41,93
	2. WAHAU II	10		NEHES LIANG BING	4.089				
				WANASARI	4.253				
				WAHAU BARU	2.519				
5	KONGBENG	5	28.444	MIAU BARU	6.937	465	2.790	9,81	40,22
6	MUARA BENGKAL	25	14.178	MUARA BENGKAL ULU	2.062	974	5.844	41,22	83,70
				BENUA BARU	4.920				
7	MUARA ANCALONG :	15	13.377	KELINJAU ILIR	1.589	1.004	6.024	45,03	61,94
				KELINJAU ULU	4.050				
	1. SENYIUR	10		SENYIUR	4.087				
8	TELUK PANDAN	5	16.178	TELUK PANDAN	4.135	195	1.170	7,23	20,72
				KANDOLO	1.513				
9	BATU AMPAR	5	7.386	BATU TIMBAU	2.835	456	2.736	37,04	96,51
10	LONG MESANGAT	10	7.549	SUMBER SARI	1.922	211	1.266	16,77	50,93
				MUKTI UTAMA	564				
11	KARANGAN	5	14.376	KARANGAN DALAM	1.025	242	1.452	10,10	51,76
				KARANGAN ILIR	1.780				
12	TELEN	10	11.475	JUK AYAK	1.615	369	2.214	19,29	56,68
				MUARA PANTUN	2.291				
13	BUSANG	10	6.181	LONG PEJENG	1.090	375	2.250	36,40	77,08
				LONG LEES	1.120				
				LONG NYELONG	709				
14	KAUBUN	5	15.725	BUMI ETAM	4.146	217	1.302	8,28	31,40
15	RANTAU PULUNG	5	11.001	MUKTI JAYA	3.194	261	1.566	14,24	35,11
				RANTAU MAKMUR	1.266				
16	KALIORANG	50	14.448	BUKIT MAKMUR	3.954	8	48	0,33	1,21

17	SANGKULIRANG		22.906			0	0	0,00	
18	SANDARAN	5	12.245	SANDARAN	1.115	51	306	2,50	6,78
				MANUBAR	3.397				
SUB JUMLAH		**210**	**266.085**		**104.178**	**7.224**	**43.344**	**16,29**	**41,61**
TOTAL JUMLAH		**570**	**418.625**		**251.642**	**23.262**	**143.166**	**34,20**	**56,89**

Sumber: PDAM Kabupaten Kutai Timur tahun 2017

Tabel.2.13
Perkembangan Pelayanan PDAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Jumlah Sambungan Langganan Per Tahun (SR)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SANGATTA UTARA :					
	- KABO	9.620	10.563	11.148	12.625	14.389
	- KUDUNGGA	0	0	0	0	0
	- BUKIT PELANGI	0	0	0	59	170
2	SANGATTA SELATAN	718	1.084	1.244	1.362	1.479
3	- BENGALON	369	531	831	983	1.018
	- UNIT PEMBANTU SEKERAT	0	0	0	18	79
4	MUARA WAHAU	496	572	676	927	1.053
	- UNIT PEMBANTU WAHAU	187	201	214	226	246
5	KONGBENG	312	337	395	433	465
6	M.BENGKAL	526	580	598	917	974
7	M.ANCALONG	489	560	602	669	720
	- UNIT PEMBANTU SENYIUR	0	0	50	240	284
8	BATU AMPAR	377	398	418	449	456
9	LONG MESANGAT	160	172	197	207	211
10	TELUK PANDAN	110	140	183	191	195
11	KARANGAN	123	164	209	231	242
12	TELEN	250	286	317	341	369
13	BUSANG	224	283	325	354	375
14	KAUBUN	93	142	184	192	217
15	RANTAU PULUNG	0	103	139	173	261
16	KALIORANG	0	0	0	0	8
17	SANDARAN	0	38	44	47	51
JUMLAH		14.054	16.154	17.774	20.644	23.262

Sumber: PDAM Kabupaten Kutai Timur tahun 2017

Tabel.2.14
Data Sumber Air Baku Untuk Air Minum PDAM Kabupaten Kutai Timur

No.	Nama Unit	Sumber Air Baku	Kategori Pelayanan		Unit dikelola PDAM (Unit PDAM)	Kapasitas Air Baku (Liter/Detik)
			Perkotaan (Unit Kota)	Pedesaan (Unit Desa)		
1	SANGATTA UTARA :					
	- IPA KABO JAYA	Sungai Sangatta	√		√	15.000
	- IPA KUDUNGGA	Danau Pit J	√		√	800
	- IPA BUKIT PELANGI	Air Tanah / Sumur Bor	√		√	6,00
2	SANGATTA SELATAN	Sungai Masabang/Melawai	√		√	5.000
3	- BENGALON	Sungai Bengalon		√	√	12.000
	- UNIT PEMBANTU SEKERAT	Mata Air Gunung Sekerat		√	√	320
4	MUARA WAHAU	Sungai Wahau		√	√	15.500
	- UNIT PEMBANTU WAHAU	Sungai Wahau		√	√	15.500
5	KONGBENG	Sungai Wehea		√	√	12.000
6	M.BENGKAL	Sungai Muara Bengkal		√	√	15.500
7	M.ANCALONG	Sungai Muara Ancalong		√	√	15.500
	- UNIT PEMBANTU SENYIUR	Sungai Muara Ancalong		√	√	10.300
8	BATU AMPAR	Sungai Telen		√	√	10.300
9	LONG MESANGAT	Sungai Telen		√	√	10.300
10	TELUK PANDAN	Danau Telaga Bening		√	√	7,20
11	KARANGAN	Sungai Karangan		√	√	10.000
12	TELEN	Sungai Telen		√	√	10.300
13	BUSANG	Sungai Atan		√	√	8.000
14	KAUBUN	Sungai Kaubun		√	√	2.000
15	RANTAU PULUNG	Sungai Benu		√	√	2.000
16	KALIORANG	Mata Air Gunung Sekerat (GMP/PT. Aphi-Aphi)		√	√	320
17	SANDARAN	Sungai Penyarai		√	√	2.000

Sumber: PDAM Kabupaten Kutai Timur tahun 2017

Saat ini PDAM Kabupaten Kutai Timur memiliki 22 unit pengelolaan air minum yaitu :



"Sumber Air Baku"

- Mata Air Gunung Sekerat (IPA Unit Pembantu Sekerat)
- Mata Air Gunung Sekerat (GMP /PT. Aphi-Aphi) (IPA Unit Kaliorang)
- Danau Telaga Bening (IPA Unit Teluk Pandan)
- Sungai Kaubun (IPA Unit Kaubun)
- Sungai Telen (IPA Unit Telen)
- Sungai Wahau (IPA Unit Muara Wahau dan IPA Pembantu Wahau)
- Sungai Muara Bengkal (IPA Unit Muara Bengkal)
- Sungai Muara Ancalong (IPA Unit Muara Ancalong dan IPA Unit Pembantu Senyiur)
- Sungai Telen (IPA Unit Batu Ampar)
- Sungai Wehea (IPA Unit Kongbeng)
- Sungai Benu (IPA Unit Rantau Pulung)
- Sungai Penyarai (IPA Unit Sandaran)
- Sungai Sangatta (IPA Kabo)
- Sungai Masabang / Melawai (IPA Unit Sangatta Selatan)
- Danau Pit J (IPA Kudungga)
- Air Tanah / Sumur Bor (IPA Unit Bukit Pelangi)
- Sungai Kelinjau (IPA Unit Busang)
- Sungai Karangan (IPA Unit Karangan)

KAPASITAS PRODUKSI TAHUN 2017

Kapasitas Terpasang : 570 Liter/Detik

Kapasitas Realisasi : 481 Liter/Detik

KAPASITAS RESERVOIR

No.	SPAM	Reservoir (m^3)
1	IPA Kabo	2.500
2	IPA Bukit Pelangi	200
3	IPA Kudunggga	2.000
4	IPA Sangatta Selatan	100
5	IPA Bengalon	125
6	IPA Sekerat	200
7	IPA Muara Wahau	300
8	IPA Pembantu Wahau	50
9	IPA Kongbeng	100
10	IPA Muara Bengkal	500
11	IPA Muara Ancalong	100
12	IPA Senyiur	200
13	IPA Batu Ampar	250
14	IPA Long Mesangat	200
15	IPA Teluk Pandan	100
16	IPA Karangan	100
17	IPA Telen	200
18	IPA Busang	200
19	IPA Kaubun	200
20	IPA Rantau Pulung	100
21	IPA Kaliorang	500
22	IPA Sandaran	100

Saat ini WTP (Water Treatment Plan) atau IPA(Instalasi Pengelolaan Air) berfungsi sebagai mana mestinya. Dalam menunjang sistem pelayanan perpipaan oleh PDAM, disamping memiliki 2 unit IPA, PDAM juga ditunjang oleh sistem jaringan utama, jaringan sekunder dan tersier. Kondisi WTP, jaringan perpipaan dan perkembangan pelanggan SR yang dikelola oleh PDAM diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel.2.15
Kondisi Sarana dan Prasarana PDAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

No	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Volume	Keterangan
1	IPA/WTP	Liter/detik	570 liter/detik	Realisasi 481 Liter/Detik
2	Pipa Tranmisi	m		
3	Reservoir	m3	50-2500	
4	Pipa Distribusi Utama	m		
5	Pipa Distribusi Sekunder	m		
6	Sambungan Rumah	Unit	23.626 SR	
7	Hidran Umum	Unit		
8	Kran Umum	Unit	-	
9	Kapasitas Pelayanan dan Berdasarkan IPA	Jiwa	143.166	
10	Kapasitas Terpakai	Jiwa		

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL, PDAM tahun 2017

Berdasarkan data per Oktober 2017 dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Pemukiman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat terjadi beberapa kemajuan dalam

pelayanan air minum sistem perpipaan dan juga non-perpipaan yang layak. Tambahan layanan perpipaan yang merupakan hasil program PAMSIMAS dan PAMDES memberikan kontribusi peningkatan layanan sistem perpipaan sebesar 1,7%. Sehingga pelayanan sistem perpipaan yang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016 hanya sebesar 1,5%, maka sesuai data terbaru meningkat menjadi 3,2%.

Tabel.2.16
Kondisi Sarana dan Prasarana Air Minum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

No.		Uraian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Pelayanan
		Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2017	**418.625**	
A		**Sistem Perpipaan**	**161.239**	
	1	PDAM	143.166	34,2
	2	non PDAM khusus PAMSIMAS	2.244	0,5
	3	non PDAM khusus PAMDES	15.829	3,8
B		**Sistem non Perpipaan (Improved)**	**10.621**	
	1	Sumur Terlindungi	10.444	2,5
	2	Pompa Tangan	47	0,011
	3	Pompa (Sumur Bor)	101	0,024
	4	Mata Air Terlindungi	29	0,007
C		**Sistem non Perpipaan (Unimproved)**	**246.765**	
	1	Sumur /mata air tidak Terlindungi	246.372	58,853
	2	Air Sungai	7	0,002
	3	Air Hujan	365	0,087
	4	Air Kemasan/Tangki	21	0,005
		Jumlah	**418.625**	**100,0**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL, Dinas Kesehatan, PDAM , Dispemas, Pamsimas tahun 2017

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Kabupaten Kutai Timur memanfaatkan air minum dengan sistem non perpipaan mengingat belum banyak sistem perpipaan yang dibangun. Pada umumnya sumur gali ataupun sumber air lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum secara kualitas dan kuantitas sangat tergantung oleh musim. Pada musim kemarau banyak sumur yang kering dan masyarakat susah mendapatkan sumber air minum. Begitu juga dengan kualitas secara fisik dan kimia, sumur gali atau sistem non perpipaan pada umumnya kurang bagus terutama di

kecamatan Sandaran, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sangatta Selatan, dan Kecamatan Rantau Pulung.

2.5. SISTEM PELAYANAN NON PERPIPAAN (NON PDAM)

Penyediaan air minum non perpipaan (PDAM) dilakukan dengan pemberian bantuan berupa sumur-sumur gali dan MCK kepada masyarakat melalui dana LOAN World Bank yang telah di mulai sejak tahun 1996 s.d 1998. Pada tahun 2008 dan 2009, melalui program **WISLC 3** atau **PAMSIMAS**, penyediaan sarana air minum untuk masyarakat berpendapatan rendah telah dilaksanakan untuk 9 lokasi pedesaan tahun 2017 dengan cakupan pelayanan sebanyak 374 SR atau 2244 jiwa. Program **PAMSIMAS** dimaksud akan berlangsung sampai tahun 2017 dengan target sasaran melayani wilayah pedesaan atau peri urban yang belum mendapat pelayanan PAMSIMAS. Disamping melalui program **PAMSIMAS**, juga terdapat pelayanan air minum pedesaan sistem perpipaan yang dibangun melalui paket program P**AMDES**. Melalui Program Peduli Desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui APBD Tahun 2017 mengadakan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) di 11 (sebelas) desa. Sebagaimana kondisi sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.17
Kondisi Sarana dan Prasarana PAMDES Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

No	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Volume	Keterangan
1	IPA/WTP	Liter/detik	1,3-5 liter/detik	Realisasi 1,3 - 5 Liter/Detik
2	Pipa Tranmisi	m	2.896	
3	Reservoir	m3	50-2500	
4	Pipa Distribusi Utama	m	34.164	
5	Sambungan Rumah	Unit	24.411	
6	Hidran Umum	Unit		
7	Kran Umum	Unit	-	
8	Kapasitas Pelayanan dan Berdasarkan IPA	Jiwa	27.390	4565 SR
9	Kapasitas Terpakai	Jiwa	27.390	4565 4566

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL, Dispemas tahun 2017

2.6. AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK

2.6.1. AIR LIMBAH

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan sistem pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga.

Berdasarkan analisa akses sanitasi dari data survey Dinas Kesehatan dan capaian kinerja pemerintah terhadap bidang sanitasi mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur menggunakan jamban bersama sebesar 0,01% zona perkotaan dan 0,01% zona pedesaan, jamban leher angsa sebesar 72,63% zona perkotaan dan 1,23% zona pedesaan, jamban plengsengan sebesar 1,05% zona perkotaan dan 0,05 zona pedesaan, jamban cemplung sebesar 0,80% zona perkotaan dan 2,52% zona pedesaan .

Namun apabila dilihat dari kondisi sistem pembuangan akhir limbah rumah tangga terlihat bahwa hanya 42,91% zona perkotaan dan 57,06% zona pedesaan rumah tangga yang memiliki *septic tank* (SPAL)/IPAL, sedangkan sisanya memanfaatkan sungai ataupun tempat lain sebagai saluran akhir pembuangan air limbahnya sebagaimana tersaji pada grafik dibawah.

Dengan melihat kondisi tersebut, bimbingan dan penyuluhan terhadap pola hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan, sehingga kesadaran masyarakat dalam hal penggunaan tempat buang air besar yang layak dan sehat semakin baik. Dilihat berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur terlihat bahwa terdapat 3 kecamatan yang perlu menjadi perhatian serius dan diprioritaskan terkait dengan akses terhadap sanitasi yang layak. Pendekatan yang perlu dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi terkait dengan pola penyehatan lingkungan maupun penyediaan akses terhadap sanitasi bagi masyarakat.

Tabel 2.18
Jenis Jamban Rumah Tangga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

NO.	KECAMATAN/DESA	JENIS JAMBAN				JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI (SOSIALISASI)	JUMLAH PENDUDUK WIL. PELAYANAN	CAKUPAN PELAYANAN			
		JAMBAN BERSAMA	JAMBAN ANGSA	JAMBAN PLENGSENGAN	JAMBAN CEMPLUNG				SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)
	PERKOTAAN											
1	SANGATTA UTARA :											
		7	1.025	79	22	120.955	SANGATTA UTARA	56.520	1.133	6.798	5,62	12,03
	TELUK LINGGA	3	540	101	6		TELUK LINGGA	27.588	650	3.900	3,22	14,14
2	SANGATTA SELATAN :											
		-	4.195	39	92	26.509	SANGATTA SELATAN	17.977	4.326	25.956	97,91	144,38
							SINGA GEWEH					
	SUB JUMLAH	**10**	**5.760**	**219**	**120**	**147.464**	-	**102.085**	**6.109**	**36.654**	**24,86**	**35,91**
	PEDESAAN											
1	SANGATTA SELATAN :											
							SANGKIMA					
							TELUK SANGKIMA					
1	BENGALON:											
			859	3	1	42.602	SEPASO	9.289	863	5.178	12,15	55,74
			364	2	2		TEPIAN BARU	3.722	368	2.208	5,18	59,32
2	SANGKULIRANG:											
			1.493	74	1.127	22.906	SANGKULIRANG	22.906	2.694	16.164	70,57	70,57
3	SANDARAN:											
						12.245	SANDARAN					
4	RANTAU PULUNG:	1										
			820	456	168	11.001	RANTAU PULUNG	11.001	1.444	8.664	78,76	78,76
5	KALIORANG:											
			1.115	165	249	14.448	KALIORANG	14.448	1.529	9.174	63,50	63,50
6	MUARA WAHAU:											
			1.546	59	37	28.014	MUARA WAHAU	7.728	1.642	9.852	35,17	127,48
			1.816	357	271		NEHES LIANG BING	4.089	2.444	14.664	52,35	358,62
7	KONGBENG:											
			927	38	80	28.444	KONGBENG	28.444	1.045	6.270	22,04	22,04
8	TELEN:											
			1.224	50	100	11.475	TELEN	11.475	1.374	8.244	71,84	71,84
9	MUARA BENGKAL:							-				

			1.068	42	456	14.178	MUARA BENGKAL	14.178	1.566	9.396	66,27	66,27
10	MUARA ANCALONG:							-				
			851	390	183	13.377	MUARA ANCALONG	13.377	1.424	8.544	63,87	63,87
11	BUSANG:							-				
			769	12	48	6.181	BUSANG	6.181	829	4.974	80,47	80,47
12	TELUK PANDAN							-				
			2.419	7	25	16.178	TELUK PANDAN	16.178	2.451	14.706	90,90	90,90
13	KAUBUN							-				
			1.332	444	313	15.725	KAUBUN	15.725	2.089	12.534	79,71	79,71
14	KARANGAN							-				
			198	40	160	14.376	KARANGAN	14.376	398	2.388	16,61	16,61
15	LONG MASENGAT							-				
			915	48	165	7.549	LONG MASENGAT	7.549	1.128	6.768	89,65	89,65
16	BATU AMPAR:							-				
			1.004	174	98	7.549	BATU AMPAR	7.549	1.276	7.656	101,42	101,42
SUB JUMLAH		**1**	**18.720**	**2.361**	**3.483**	**266.248**	-	**208.215**	**24.564**	**147.384**	**55,36**	**70,78**
TOTAL JUMLAH		**11**	**24.480**	**2.580**	**3.603**	**413.712**	-	**310.300**	**30.673**	**184.038**	**44,48**	**59,31**

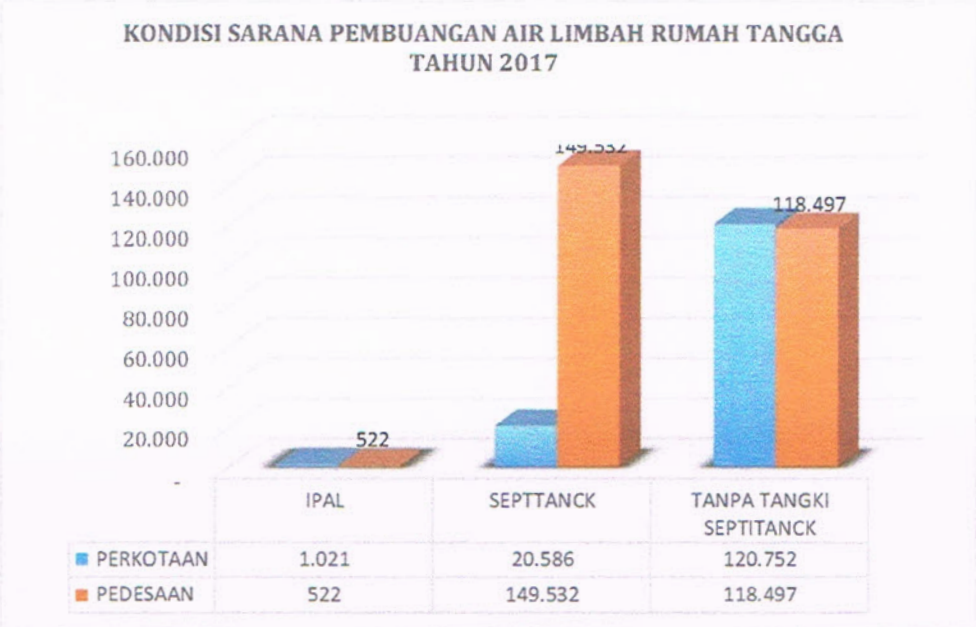
Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL 2018-2021, Diskes Tahun 2017

Tabel 2.19
Capain Akses Sanitasi (Air Limbah) Rumah Tangga Tahun 2017

NO.	KECAMATAN/DESA	URAIAN			JUMLAH PENDUDUK KAB. (JIWA)	DESA YANG TERLAYANI	JUMLAH PENDUDUK WIL PELAYANAN	IPAL				SEPTITANCK				TANPA TANGKI SEPTITANCK			
		IPAL (UNIT)	SEPTITANCK (KK)	TANPA TANGKI SEPTITANCK (KK)				SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)	SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)	SL	JIWA	ADMINISTRASI (%)	TEKNIS (%)
	PERKOTAAN																		
1	SANGATTA UTARA :																		
		521	1.133	19.638	120.955	SANGATTA UTARA	56.520	521	3.126	2,58	5,53	1.133	6.798	5,62	12,03	17.605	105.631	87,33	87,33
		250	650			TELUK LINGGA	27.588	250	1.500	1,24	5,44	650	3.900	3,22	14,14				
2	SANGATTA SELATAN :							-				-							
		250	1.648	4.168	26.509	SANGATTA SELATAN	17.977	250	1.500	5,66	8,34	1.648	9.888	37,30	55,00	2.520	15.121	57,04	57,04
						SINGA GEWEH	8.532	-				-							
	SUB JUMLAH	**1.021**	**3.431**		**147.464**	**-**	**110.617**	**1.021**	**6.126**	**4,15**	**5,54**	**3.431**	**20.586**	**13,96**	**18,61**	**20.125**	**120.752**	**81,89**	**81,89**
	PEDESAAN																		
3	SANGATTA SELATAN :																		
			239	846	5.076	SANGKIMA	3.327	-				239	1.434		43,10	488	2.928	57,68	57,68
			119	-		TELUK SINGKAMA	1.749	-				119	714		40,82				
1	BENGALON:		-	-				-				-	-						
		268	863	6.832	42.602	SEPASO	9.289	268	1.608	3,77	17,31	863	5.178	12,15	55,74	5.601	33.608	78,89	78,89
			368			TEPIAN BARU	3.722	-	-		-	368	2.208		59,32				
2	SANGKULIRANG:		-	-				-				-	-						
		252	2.694	3.566	22.906	SANGKULIRANG:	22.906	252	1.512	6,60	6,60	2.694	16.164	70,57	70,57	872	5.230	22,83	22,83
3	SANDARAN:		-	-				-				-	-						
			-	2.041	12.245	SANDARAN	12.245	-				-	-		-	2.041	12.245	100,00	100,00
4	RANTAU PULUNG:		-	-				-				-	-						
			1.444	1.834	11.001	BENUA BARU ILIR	11.001	-	-		-	1.444	8.664		78,76	390	2.337	21,24	21,24
5	KALIORANG:		-	-				-				-	-						
			1.529	2.408	14.448	KALIORANG	14.448	-	-		-	1.529	9.174		63,50	879	5.274	36,50	36,50
6	MUARA WAHAU:		-	-				-				-	-						
			1.642	4.669	28.014	MUARA WAHAU	7.728	-	-		-	1.642	9.852		127,48	583	3.498	12,49	12,49
			2.444			NEHES LIANG BING	4.089	-	-		-	2.444	14.664						
7	KONGBENG:		-	-				-				-	-						
			1.045	4.741	28.444	KONGBENG	28.444	-	-		-	1.045	6.270		22,04	3.696	22.174	77,96	77,96
8	TELEN:		-	-				-				-	-						
			1.374	1.913	11.475	TELEN	11.475	-	-		-	1.374	8.244		71,84	539	3.231	28,16	28,16
9	MUARA BENGKAL:		-	-				-				-	-						

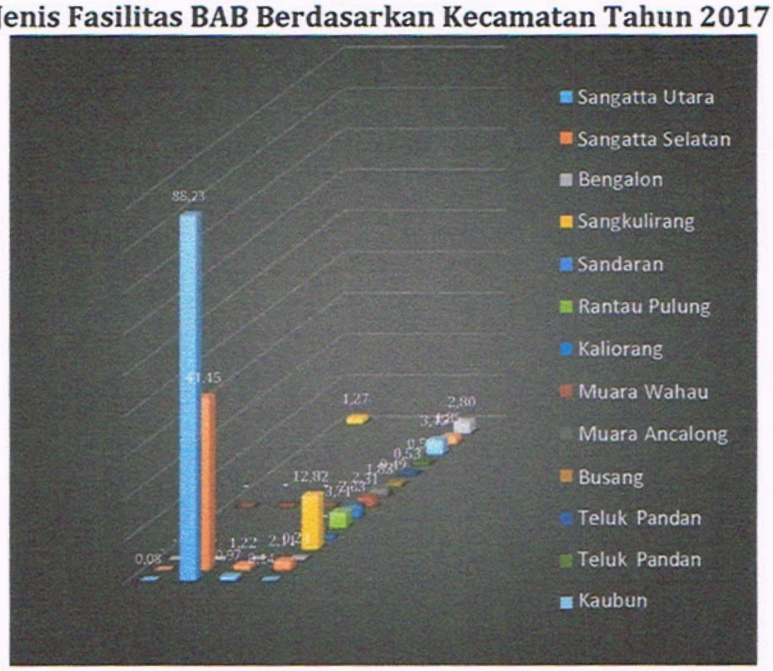
		2	1.566	2.361	14.178	MUARA BENGKAL	14.178	2	12	0,08	0,08	1.566	9.396	66,27	66,27	795	4.770	33,64	33,64
10	MUARA ANCALONG:		-	-				-				-	-						
			1.424	2.230	13.377	MUARA ANCALONG	13.377	-	-		-	1.424	8.544		63,87	806	4.833	36,13	36,13
11	BUSANG:		-	-				-				-	-						
			829	1.030	6.181	BUSANG	6.181	-	-		-	829	4.974		80,47	201	1.207	19,53	19,53
12	TELUK PANDAN		-	-				-				-	-						
			2.451	2.696	16.178	TELUK PANDAN	16.178	-	-		-	2.451	14.706		90,90	245	1.472	9,10	9,10
13	KAUBUN		-	-				-				-	-						
			2.089	2.621	15.725	KAUBUN	15.725	-	-		-	2.089	12.534		79,71	532	3.191	20,29	20,29
14	KARANGAN		-	-				-				-	-						
			398	2.396	14.376	KARANGAN	14.376	-	-		-	398	2.388		16,61	1.998	11.988	83,39	83,39
15	LONG MASENGAT		-	-				-				-	-						
			1.128	1.258	7.549	LONG MASENGAT	7.549	-	-		-	1.128	6.768		89,65	130	781	10,35	10,35
16	BATU AMPAR:		-	-				-				-	-						
			1.276		7.386	BATU AMPAR	7.386	-	-		-	1.276	7.656		103,66		-	-	-
SUB JUMLAH		**522**	**24.922**		**271.161**	-	**225.373**	**522**	**3.132**	**1,16**	**1,39**	**24.922**	**149.532**	**55,15**	**66,35**	**19.750**	**118.497**	**43,70**	**43,70**
TOTAL JUMLAH		**1.543**	**28.353**		**418.625**	-	**335.990**	**1.543**	**9.258**	**2,21**	**2,76**	**28.353**	**170.118**	**40,64**	**50,63**	**39.875**	**239.249**	**57,15**	**57,15**

Diagram 2.9
Kondisi Sarana Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Tahun 2017



	IPAL	SEPTTANCK	TANPA TANGKI SEPTITANCK
PERKOTAAN	1.021	20.586	120.752
PEDESAAN	522	149.532	118.497

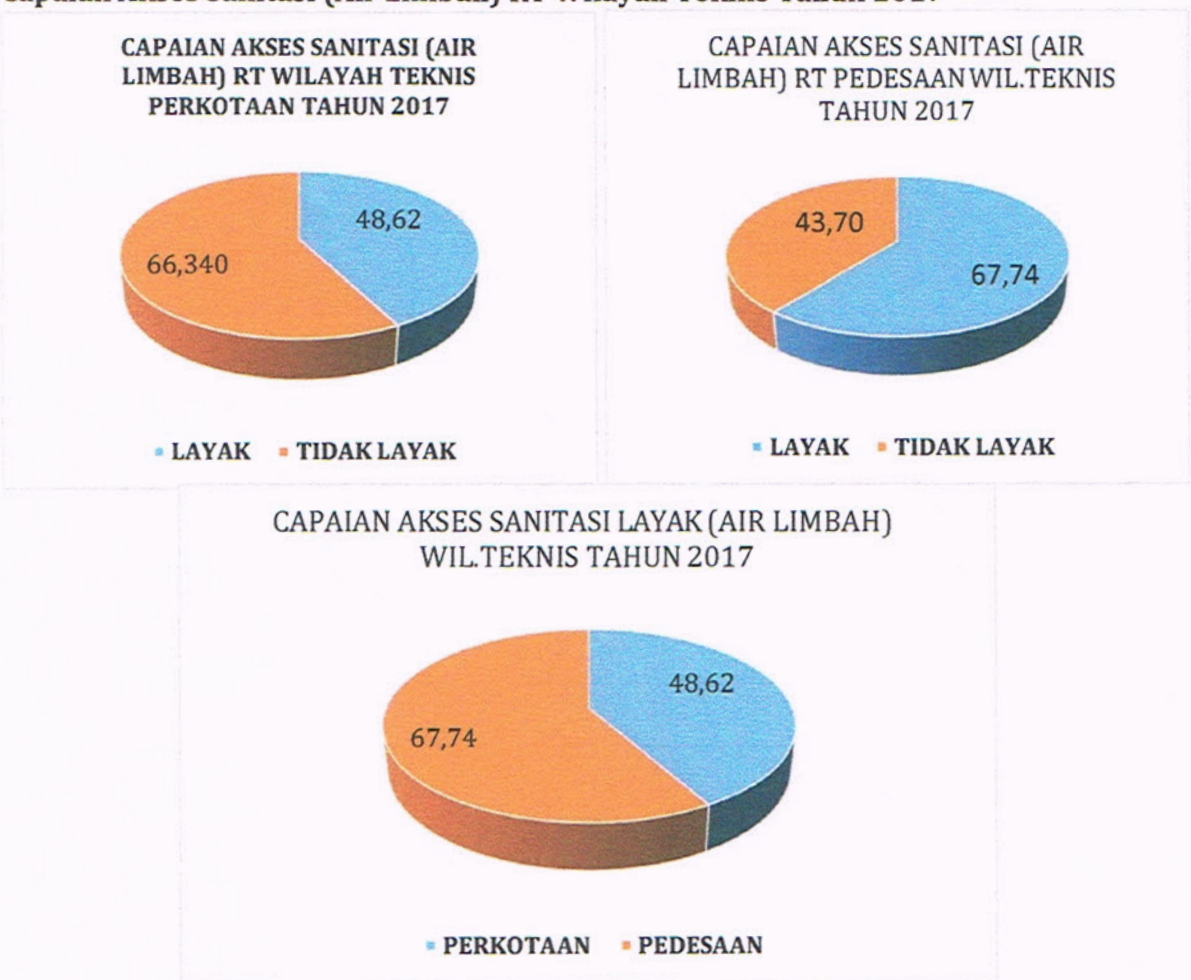
Diagram 2.10
Jenis Fasilitas BAB Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017



Apabila dilihat dari karakter kecamatan, 2 Desa dan 5 Kecamatan yang perlu menjadi perhatian serius tersebut sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini adalah desa

Sangatta Utara *(82,74% jamban tidak layak)*, desa Tepian Baru *(61,79% jamban tidak layak)*, kecamatan Kaliorang *(59,52% jamban tidak layak)*, kecamatan Kombeng *(83,29 % jamban tidak layak)*, kecamatan Muara Bengkal *(63,28% jamban tidak layak)*, kecamatan Muara Ancalong *(58,02% jamban tidak layak)*, dan kecamatan kaubun *(55,46% jamban tidak layak)*. Kecamatan tersebut terdiri dari desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri, sedangkan pada akses sanitasi juga termasuk dalam kategori kecamatan yang tertinggal dan merupakan kecamatan dengan karakter kawasan pedesaan dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana. Selain pendekatan investasi maupun kelembagaan, diperlukan juga pendekatan terhadap perilaku masyarakat, mengingat masyarakat masih menggantungkan segala aktifitasnya terhadap lingkungan sekitar, seperti sungai maupun lahan/kebun kosong di belakang rumah sebagai titik akhir pembuangan limbah mereka.

Diagram 2.11
Capaian Akses Sanitasi (Air Limbah) RT Wilayah Teknis Tahun 2017



Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, DAK, Dinkes tahun 2017

Capaian akses sanitasi (air limbah) Kabupaten Kutai Timur terhadap target pencapaian wilayah teknis (fisik & sosialisasi) daerah dengan menggunakan indikator target SPM pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan sanitasi 48,62 % (4.452 SL) rumah tangga atau 49.636 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan 57,15 % (25.444 SL) Rumah Tangga atau 152.664 jiwa dari 327.458 Jiwa Penduduk wilayah Pelayanan Kabupaten Kutai Timur , terdiri dari:
   a. 48,62 % (4.452 SL) rumah tangga atau 49.636 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dari 102.085 jiwa penduduk wilayah pelayanan perkotaan;
   b. 67,74 % (25.444 SL) rumah tangga atau 150.054 Jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan dari 225.373 Jiwa jumlah penduduk pelayanan wilayah pedesaan.

Diagram 2.12
Capaian Akses Sanitasi (Air Limbah) RT Wilayah Administrasi Tahun 2017







Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021, DAK, Dinkes tahun 2017

2. Cakupan akses sanitasi (air limbah) rumah tangga pada tahun 2017 untuk wilayah adminstrasi yaitu;
   a. 33,66 % (4.452 SL) rumah tangga atau 49.636 jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan 66,34 % (3.601 SL) Rumah Tangga atau 97.828 jiwa dari 147.646 jiwa penduduk wilayah adminstrasi perkotaan;
   b. 56,30 % (25.444 SL) rumah tangga atau 150.054 Jiwa telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan dan 56,30% (25.009 SL) Rumah Tangga ataua 150.054 dari 271.161 Jiwa jumlah penduduk wilayah administrasi pedesaan.

Pada grafik dan tabel 2.12 terlihat bahwa 33,66% rumah tangga (4.452 SL) rumah tangga atau 21.607 yang memiliki sistem pembuangan air limbah yang layak. Sedangkan rumah tangga yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah yang layak yaitu 51,68% rumah tangga (36.054 SL) Rumah Tangga atau 216.325 jiwa 418.625 jiwa penduduk administrasi daerah.

Hal ini terjadi dimana dilapangan masih ditemukannya masyarakat yang memanfaatkan tanah kosong atau sungai sebagai saluran akhir pembuangan air limbah. Kesadaran akan penyehatan lingkungan yang berawal dari keberadaan sanitasi yang layak perlu terus di tingkatkan pada masyarakat, sehingga akan menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya air yang dimiliki masyarakat. Proporsi rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun angkanya masih sangat kecil. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tangki septik.

2.6.2. SAMPAH



Masalah sampah dalam penanganan pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan meskipun saat ini kabupaten Kutai Timur memiliki TPA di kecamatan utara. Jika tidak segera dtangani Kutim dan Kecamatan Sangatta Utara, bakal menjadi masalah besar kedepannya. Masalah limbah sampah dari

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batota mencemari lingkungan, terutama sungai yang menjadi sumber air utama masyarakat tercemar, akibatnya, sungai yang awalnya jernih, bisa digunakan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, maka penangan sampah harus berwawasan lingkungan. Meskipun Kabupaten Kutai Timur sudah memiliki TPA, tetapi dalam belum bisa dioperasikan secara maksimal, karena keterbatasan dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA seperti :

- Belum memadainya jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) kontainer, gerobak,kendaraan pengangkut sampah, *dump truck;*
- Belum tersedianya alat-alat berat yang dibutuhkan (seperti *Buldozer, loader*), dan jembatan timbang



Tabel 2.20
Volume Sampah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	VOLUME SAMPAH (LITER/HARI)			VOLUME TOTAL	
			RUMAH TANGGA (1,40 LT/OR/HR)	PERDAGANGAN (0,50 LT/OR/HR)	PERKANTORAN (0,30 LT/OR/HR)	LITER / HARI	M^3/HARI
I	***PERKOTAAN***						
1	Sangatta Selatan	31.585	44.219	15.793	15.793	75.804	76
2	Sangatta Utara	120.955	169.337	60.478	60.478	290.292	290
	JUMLAH					**366.096**	**366**
II	***PEDESAAN***						
1	Bengalon	42.602	1.789.284	21.301	21.301	1.831.886	1.832
2	Rantau Pulung	11.001	462.042	5.501	5.501	473.043	473
3	Kaliorang	14.448	606.816	7.224	7.224	621.264	621
4	Sangkulirang	22.906	962.052	11.453	11.453	984.958	985

5	Sandaran	12.245	514.290	6.123	6.123	526.535	527
6	Muara Wahau	28.014	1.176.588	14.007	14.007	1.204.602	1.205
7	Kongbeng	28.444	1.194.648	14.222	14.222	1.223.092	1.223
8	Telen	11.475	481.950	5.738	5.738	493.425	493
9	Muara Bengkal	14.178	595.476	7.089	7.089	609.654	610
10	Muara Ancalong	13.377	561.834	6.689	6.689	575.211	575
11	Busang	6.181	259.602	3.091	3.091	265.783	266
12	Teluk Pandan	16.178	679.476	8.089	8.089	695.654	696
13	Kaubun	15.725	660.450	7.863	7.863	676.175	676
14	Karangan	14.376	603.792	7.188	7.188	618.168	618
15	Long Mesangat	7.549	317.058	3.775	3.775	324.607	325
16	Batu Ampar	7.386	310.212	3.693	3.693	317.598	318
	JUMLAH					**11.441.655**	**11.442**
	TOTAL					**11.807.751**	**11.808**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL tahun 2017

Tabel 2.21
Kebutuhan Sarana – Prasarana Sampah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	VOLUME SAMPAH (M^3)	PELAYANAN (%)	VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT (M^3)	SARANA PENAMPUNG/PENGANGKUT			
					TONG SAMPAH (40 L)	GEROBAK (1 M^3)	TPS (1 M^3)	TRUK 2 RIT (6 M^3)
I	***PERKOTAAN***							
1	Sangatta Selatan	76	80	61	379	61	61	5
2	Sangatta Utara	290	80	232	1.451	232	232	19
	JUMLAH				**1.830**	**293**	**293**	**24**
II	***PEDESAAN***							
1	Bengalon	1.832	35	641	27.478	641	641	53
2	Rantau Pulung	473	35	166	7.687	166	166	14
3	Kaliorang	621	35	217	10.096	217	217	18
4	Sangkulirang	985	35	345	16.006	345	345	29
5	Sandaran	527	35	184	8.556	184	184	15
6	Muara Wahau	1.205	35	422	19.575	422	422	35
7	Kongbeng	1.223	35	428	19.875	428	428	36
8	Telen	493	35	173	8.018	173	173	14
9	Muara Bengkal	610	35	213	9.907	213	213	18
10	Muara Ancalong	575	35	201	9.347	201	201	17

11	Busang	266	35	93	4.319	93	93	8
12	Teluk Pandan	696	35	243	11.304	243	243	20
13	Kaubun	676	35	237	10.988	237	237	20
14	Karangan	618	35	216	10.045	216	216	18
15	Long Mesangat	325	35	114	5.275	114	114	9
16	Batu Ampar	318	35	111	4.764	111	111	9
	JUMLAH				**183.240**	**4.005**	**4.005**	**334**
	TOTAL				**185.071**	**4.297**	**4.297**	**358**

Sumber: Analisa Tim Penyusun RAD AMPL Tahun 2018-2021

Untuk menunjang kelancaran pengelolaan sampah di Kota Sangatta, maka disamping dibutuhkan sumber daya manusia, maka harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang fungsi dan tugas pengelolaan kebersihan dan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka pertambahan kuantitas dan kualitas sampah juga meningkat. Hal ini sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, yang mana diperkirakan pada tahun 2017 jumlah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar dan sampah perkantoran akan mencapai 100,1 m^3/hari. Seperti diketahui bahwa pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah sejak tahun 2011. Sistem pelayanan sampah di Kota Sangatta terdiri atas 2 sistem yaitu ;"sistem rute" yaitu pengambilan sampah langsung di tempat (door to door), dan sistem TPS bagi daerah yang nsulit dilalui oleh kendaraan truk pengangkut sampah pada kawasankawasan permukiman padat serta pasar. Adapun metode pembuangan sampah di TPA Batota dilakukan dengan sistem *"controlled landfill"*. Sesuai dengan pedoman persampahan, maka sistem ini dipergunakan karena merupakan sistem yang berwawasan lingkungan. Sementara itu kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dengan sistem *"clean site"*, yaitu pembersihan dan pengangkutan sampah secara langsung di jalan-jalan.

Kegiatan pengelolaan persampahan Kota Sangatta yang dilaksanakan secara terencana sejak tahun 2011, dengan rincian jumlah timbulan sampah setiap tahunnya seperti tabel **2.20.** Pada tabel **2.21** dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi penambahan volume sampah di dalam Kota Sangatta. Sehingga tersedianya sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi

kebutuhan pengelolaan persampahan atau kebersihan. Dengan volume timbulan sampah dan jumlah peralatan seperti tabel **2.21** , maka dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sampah 5 tahun yang akan datang, dibutuhkan penambahan jumlah peralatan yang cukup besar. Seperti Tong Sampah, pada tahun 2017 dibutuhkan penambahan 65 % di zona Pedesaan dan 20% di zona Perkotaan dari jumlah yang ada saat ini. Demikian pula dengan jumlah gerobak. TPS dan truk yang memerlukan masing-masing 65,93 %, 65,93 % dan 62,5 %.

Masyarakat sebagai penghasil utama sampah domestik perlu ikut berperan serta dan terlibat dalam pengelolaan sampah domestik khususnya sampah rumah tangga. Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM aparatur dalam pengolahan sampah domestik serta masih rendahnya pengetahuan dalam pengolahan sampah sehingga kebanyakan masyarakat mengolah sampah secara induvidual dengan cara menimbun, membakar, bahkan sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai, pinggir jalan maupun lahan kosong. Tentu saja dengan kondisi diatas akan sulit untuk mencapai target dari mekanisme pembangunan bersih dan juga keinginan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi *Pilot Project* pengelolaan sampah kategori kota kecil.



2.7. TARGET PENCAPAIAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI

2.3.1. TARGET PENCAPAIAN AKSES INTERNASIONAL (SDGs) 2030

TARGET SDGs YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan universal terhadap **AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU** untuk semua

6.2 Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan cukup terhadap **SANITASI** dan kebersihan untuk semua.

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan **MENGURANGI PENCEMARAN DAN MENIGKATKAN PRAKTIK DAUR ULANG DAN PENGGUNAAN ULANG** yang aman dalam jumlah substansial secara global





6.4 Pada tahun 2030, meningkatkan **PENGGUNAAN AIR YANG EFISIEN** secara substansial disemua sekitar untuk semua sector dan menjamin penyediaan dan pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air.

6.5 Pada tahun 2030, menerapkan **PENGELOLAAN SUMBER DAYA YANG TERINTEGRASI**

6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan memulihkan **EKSOSISTEM TERKAIT AIR** termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, daerah resapan air serta danau.

6.b mendorong dan meningkatkan **PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL** dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi



2.3.2. TARGET PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL(SPM) AIR MINUM DAN SANITASI

Tabel. 2.22 Target Pencapaian SPM Air Minum dan Sanitasi

BIDANG	CLUSTER PELAYANAN	STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) INDIKATOR	NILAI	TAHUN PENCAPAIAN
Air Minum	Sangat Buruk Buruk Sedang Baik Sangat Baik	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpiapaan dan bukan jaringanperpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 Liter/orang/hari	40% 50% 70% 80% 100%	2021
Sanitasi	Air Limbah Permukiman/Domestik	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	60% 5%	2021

Sumber: Permen PU 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang, PP No. 2 Tahun 2018

Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

a. Air ledeng meteran;

b. Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;

c. Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemaran;

d. Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemaran, dan

e. Air Hujan.

SPM tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septic dan terlayani IPLT terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik. Sedangkan SPM tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di kab/kota. Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan indikator target SPM pada tahun 2017 berdasarkan jumlah Rumah Tangga (RT) adalah sebagai berikut:

1. 36,43% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan:
   a. 42,26 % RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;
   b. 67,69% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.
2. 48,32 % RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
   a. 33,66% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layakperkotaan;
   b. 56,30% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layakperdesaan.

Dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional pada tahun 2016, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Kutai Timur relatif melampaui rata-rata provinsi tetapi sektor sanitasi belum mencapai rata- rata provinsi dalam hal cakupan penduduk terhadap aksesair minum dan sanitasi yang layak, namun masih cukup tertinggal pada aspek cakupan penduduk terhadap sanitasi yang layak. Capaian ini juga relatif melampaui rata-rata nasional untuk akses terhadap air minum yang layak namun masih tertinggal pada akses sanitasi yang layak dibandingkan capaian nasional. Dibandingkan dengan target SPM provinsi dan target SDGs Indonesia, maka kinerja AMPL Kabupaten Kutai Timur perlu peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat memenuhi target provinsi dan memenuhi tujuan SDGs yang diharapkan. Status capaian kinerja AMPL Kabupaten Kutai Timur ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel. 2.23 Status Kinerja Air Minum dan Sanitasi

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target SPM (Provinsi)	Target SDGs (%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2014	2016	2017	2021	2030
1	**Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak**	**43,26**	**51,87**	**57,79**				**70,3**	**76,5**	**84,08**		**100**
	a. Perkotaan	50,57	60,09	67,69								100
	b. Perdesaan	32,06	39,79	45,26								100

2	**Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak**	**32,12**	**41,48**	**51,68**				**62,4**	**70**	**80**		**100**
	a. Perkotaan	41,91	36,77	66,34								100
	b. Perdesaan	22,33	46,19	43,70								100

Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah, target SPM air minum dan sanitasi masing-masing provinsi telah ditetapkan, dimana untuk pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target SPM Provinsi Kalimantan Timur yang ditargetkan mampu mencapai 70% baik untuk air minum maupun untuk air limbah.

2.3.3. TARGET KINERJA AMPL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Penetapan target kinerja AMPL 2018-2021 didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan dimana target kinerja AMPL 2018-2021 ditetapkan dengan mempertimbangkan target SPM kabupaten/kota dan hasil perhitungan/perkiraan target ke - 6 SDGs di kabupaten/kota. Target SPM air minum 2017-2021 dirumuskan untuk skala kabupaten/kota (tidak dipilah antara perkotaan dan perdesaan). Khusus untuk SPM air minum, kinerja kabupaten/kota minimal naik satu cluster pada 2017-2021. Contoh: jika cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak pada 2014 adalah 47% (cluster pelayanan = sangat buruk), maka pada 2021 minimal mencapai 50% (cluster pelayanan = buruk).

Target ke-6 SDGs (AMPL) di kabupaten/kota dihitung dengan dengan menjumlahkan proporsi penduduk dengan akses pada tahun terakhir dengan setengah dari proporsi yang akan diturunkan sampai dengan 2021. Contoh: jika proporsi penduduk dengan akses saat ini (2013) adalah 55%, maka perkiraan target SDGs 2021 adalah 55% + ½ (1-55%) atau 77.5%.

Tabel. 2.24 Perkiraan Target SPM dan Perkiraan Target SDGs

No	Indikator	Capaian (2017)	Target SPM (2021)	Target SDGs Kabupaten Kutai Timur (2030)
(a)	(b)	(f)	(g)	(h)= f +1/2 (1-f)
1	Cakupan Penduduk (%)dengan akses air minum yang layak	**57,79 %**	**100%**	**100%**
	Perkotaan	67,69 %	100%	100%
	Pedesaan	45,26 %	100%	100%
2	Cakupan Penduduk (%)dengan akses sanitasi yang layak	**51,68 %**	**100%**	**100%**
	Perkotaan	66,34 %	100%	100%
	Pedesaan	43,70 %	100%	100%

Sumber: Analisa dan Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Target AMPL 2021 Kabupaten Kutai Timur minimal adalah 70 % untuk air minum dan 65 % untuk sanitasi, dimana penetapannya didasarkan pada perhitungan dasar yang didasarkan atas kesepakatan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam RAD AMPL Kabupaten Kutai Timur 2018-2021.

2.6. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SEKTOR AMPL

Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya air yang cukup melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 36 buah dan panjang sungai terpanjang yaitu sungai ngayau mencapai 1900 km. Diantara sungai-sungai tersebut kabupaten Kutai Timur dialiri oleh Sungai Mahakam yang merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Kalimantan Timur. Sumber daya air yang potensial ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sepintas akan terasa bahwa ketersediaan air bukan menjadi masalah bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur , atau di Indonesia secara umum, mengingat keberadaan sumber-sumber air yang ada baik dalam bentuk aliran sungai maupun sumber mata air. Kondisi air yang melimpah, khususnya di Kutai Timur dengan keberadaan DAS Sungai Sangatta, sering terabaikan mengenai kelayakan sumber air minum bagi masyarakat. Padahal, melimpahnya sumber daya air bukanlah menjadi indikasi baiknya akses masyarakat terhadap air minum yang layak. Ketergantungan masyarakat terhadap sungai, salah satu contohnya di Kutai Timur , baik sebagai sumber air kebutuhan sehari-hari maupun aktifitas MCK serta saluran akhir pembuangan limbah berakibat makin beratnya beban sungai. Kondisi ini tentu saja

berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Ditambah lagi keterikatan masyarakat terhadap sungai yang mengalir di Kabupaten Kutai Timur ini.

Kondisi geografi dan topografi Kabupaten Kutai Timur yang cukup luas sehingga persebaran penduduk menjadi cukup luas dan tidak merata ditambah dengan terdapatnya daerah pesisir yang memiliki pantai air asin yang tidak bisa dikonsumsi oleh warga, belum adanya akses dan pelayanan ke lokasi lokasi permukiman terjauh dan lokasi pesisir membuat kondisi lokasi tersebut menjadi rawan air, jika warga setempat berlomba lomba mendapatkan air dengan cara mengambil air tanah secara massif maka yang terjadi adalah menurunnya permukaan tanah dan dapat menyebabkan masalah yang lebih kompleks.

Gambar. 2.23 Kondisi geografi dan topografi Kabupaten Kutai Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Tabel. 2.25
Isu Permasalahan Air Minum dan Sanitasi

ISU AIR MINUM	ISU PENYEHATAN LINGKUNGAN
a. Masih banyak penduduk yang belum terlayani air minum.	a. Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban, saluran, instalasi air limbah limbah, CTPS
b. Topografi daerah yang rawan erosi tanah mengurangi kualitas air	b. Pemahaman masyarakat akan pentingnya akses sanitasi terhadap kesehatan masih kurang.

c.	Persebaran kepadatan penduduk yang tidak merata diwilayah 18 kecamatan dengan luas wilayah 24% propinsi kalimantan timur.	c.	Persebaran kepadatan penduduk yang tidak merata diwilayah 18 kecamatan dengan luas wilayah 24% propinsi kalimantan timur.
d.	Pencemaran Sumber-sumber air baku	d.	Kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat masih rendah
e.	Sumber air baku masih mengandalkan potensi air bawah tanah dan belum mengoptimalkan sumber air baku yang lain antara lain sungai dan air hujan.	e.	Tingkat perekonomian masyarakat miskin terhadap prioritas sarana sanitasi dalam hidup
f.	Pemahaman masyarakat akan kebutuhan air minum terhadap kesehatan masih kurang	f.	Kebudayaan masyarakat perkotaan yang berada di pinggir sungai dan pedesaan yang masih tertinggal terhadap kebutuhan sanitasi

Sumber: Hasil Analisa, tahun 2013-2017

2.6.1. Permasalahan Air Minum dan Sanitasi

Permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya tak terlepas dari pola hidup dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan akses terhadap AMPL. Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam menyikapi penyehatan lingkungan guna mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, buang air besar di sungai dan kebun, kemudian diperparah lagi oleh karena sebagian besar kegiatan penambangan inkonvensional di Kabupaten Kutai Timur .

Kegiatan ini telah berdampak buruk terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), yang berdampak pada kualitas sumber daya air. Aliran sungai pun terjadi perubahan warna, ironisnya, sungai tersebut sejak turun temurun oleh sebagian masyarakat masih dijadikan sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) bagi keluarga. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular, diantaranya penyakit diare, typus, disentry dan penyakit kulit serta penyakit

lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia. Secara umum permasalahan utama sektor AMPL di Kabupaten Kutai Timur masuk dalam dua kategori besar, yakni sub sektor air minum dan sub sektor penyehatan lingkungan.

Tabel. 2.25 Permasalahan Penyediaan Air Minum

	Masalah Sekarang		Masalah Yang Akan Datang		Kondisi Ideal Yang Diharapkan		Yang Harus Dilakukan
1	Tercemarnya Sumber Air Baku oleh aktivitas masyarakat hidup dibantaran sungai.	1	Meningkatnya penyakit menular yang ditularkan atau disebabkan oleh air pencemaran air	1	Tersedianya air minum yang cukup	1	Penataan masyarakat di bantaran sungai dan penertiban perkebunan sawit di area dekat sumber air baku
2	Hilangnya sebahagian besar daerah catchment area oleh aktifitas konversi lahan	2	Terjadinya krisis air	2	Tersedianya air minum yang memenuhi standar	2	Penertiban terhadap pengrusakkan hutan
3	Air minum perpipaan belum melayani seluruh masyarakat	3	kelangkaan air minum	3	Lancarnya persediaan air minum dimasyarakat	3	Reklamasi/reboisasi
4	Berkurangnya persediaan sumber air minum	4	Kesulitan mendapatkan air minum di masyarakat	4	Adanya tim pemeriksaan uji kelayakan air minum	4	Perlindungan kawasan hutan lindung, daerah resapan dan DAS
5	Berkurangnya debit air sumur	5	Habisnya sumber air baku sehingga terganggunya distribusi air ke masyarakat	5	Sumber daya Air terjaga	5	Pemantauan / pengawasan terhadap air minum isi ulang
6	Belum terpenuhinya air minum yang layak dimasyarakat	6	Ketidaklayakan sumber air baku yang ada	6	Terpenuhinya kebutuhan air minum dimasyarakat	6	Pemberian sanksi kepada pelanggaran AMPL
7	Sulitnya mendapatkan air baku yang layak minum	7	Meningkatnya wilayah rawan air	7	Tersedianya sumber air baku yang memadai	7	Memanfaatkan fasilitas dan tempat yang ada
8	Kurangnya keterlibatan masyarakat	8	Habisnya sumber mata air/sumber air baku	8	Tersedianya sarana yang memadai	8	Dibuatnya wilayah resapan air hujan
9	Banyaknya air minum isi ulang	10	Rendahnya kualitas air	9	Sumber air minum terjaga dan parameter terjamin	9	Menjaga ekosistem lingkungan
10	Pembiayaan untuk air minum yang masih rendah		Penyediaan pelayanan air minum keseluruh wilayah berjalan lambat dan tidak merata	10	Tersalurnya air minum ke masyarakat	10	Pemerataan distribusi air minum
11	Jangkauan pelayanan air minum terhadap topografi daerah yang lereng		Tidak adanya persediaan air minum pada musim kemarau di masyarakat daerah lerang/dataran tinggi	11	Tersedianya pelayanan air minum di daerah lereng/dataran tiggi	11	penyediaan spam diwilayah rawan air
12	Persebaran penduduk yang tidak merata		Pelayanan air minum dengan jumlah penduduk tinggi di pedesaan tidak	12	Ketersediaan sumur dan kran umum	12	Mengidentifikasi SDA dan pelestarian lingkungan sekitar

	diwilayah rawan air	mendapatkan pelayanan spam air minum			
13	Keterbatasan teknologi	Sarana dan prasarana produksi pelayanan air minum tidak maksimal	13	Lengkapnya sarana dan prasarana air minum	13 Efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan air
14	Terbatasnya SDM pengolahan air baku	Kurangnya pengelolaan air minum dan pendistribusiannya kepada masyarakat		Terpenuhinya SDM pengelolaan air baku	Merekrute tenag ahli perencanaan mangement peresediaan air baku dan pengelolaan teknis air baku
15	Pendistribusian air minum yang tidak merata dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat hingga ke pedalaman	Krisis air pada masyarakat pedalaman		Air minum hingga mencapai akses seluruh masyarakat	Kerjasama pemerintah dan mayarakat
16	Sumber-sumber air yang ada baik dari sungai maupun mata air belum mendapat pengelolaan secara terpadu terutama untuk memenuhi kebutuhan air minum	Penggunaan air bawah tanah mengakibatkan penurunan permukaan tanah		Memanfaatkan dan memelihara ekosistem penyediaan sumber air baku permukaan tanah	Perlindungan sumber air baku dan Adanya kesungguhan dalam melindungi sumber air baku
17	Peraturan yang menyangkut kelestarian sumber daya air yang ada di Kabupaten Kutai Timur masih kurang di berlakukan	Ekosistem sumber air baku tercemar dan terjadinya krisis air minum		Masyarakat sadar peraturan kelestarian sumber daya air	Sosialisasi tentang pentingnya sumber air baku

Sumber: Hasil Analisa, tahun 2013-2016

Tabel. 2.26 Permasalahan Bidang Sanitasi

Masalah Sekarang	Masalah Yang Akan Datang	Kondisi Ideal Yang Diharapkan	Yang Harus Dilakukan
1 Masih relatif kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat	1 Jenis penyakit yang disebabkan lingkungan yang buruk akan bertambah	1 Industri yang menghasilkan limbah didorong untuk	1 Pemerintah tanggap dan membuat MCK percontohan
2 Masih adanya sebagian masyarakat buang air besar tidak pada tempatnya	2 Mewabahnya jenis penyakit yang menular	2 Memiliki sistem pengelolaan limbah cair yang sesuai standart	2 Penertiban TI terutama pasca penambangan
3 Pengelolaan Sampah	3 Banyaknya masyarakat terserang penyakit disentri dan kulit	3 Terjaganya Ekosistem	3 Sosialisasi tentang stándar air sehat pada masyarakat

4	MCK dikolong-kolong	4	Gotong royong di tingkat masyarakat untuk kebersihan lingkungan	4	Peran aktif masyarakat digalakan dalam penyehatan lingkungan
5	Prasarana yang telah dibangun tidak terawat	5	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat	5	Penyuluhan tentang stándar MCK
6	Buang air besar disembarang tempat/di sungai	6	Masing-masing rumah penduduk memiliki jamban	6	Reklamasi lingkungan yang rusak
		7	Adanya MCK, septitanck komunal atau septitank umum dilingkungan masyarakat kurang mampu		Menyediakan MCK, septitanck komunal atau septitank umum dilingkungan masyarakat kurang mampu
		8	Sarana yang ada terjaga dan digunakan secara maksimal		

Sumber: Hasil Analisa, tahun 2013-2016

Dari permasalahan pokok tersebut, permasalahan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Kutai Timur diklasifikasikan ke dalam aspek-aspek permasalahan, baik di sektor Air Minum maupun Penyehatan Lingkungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.1 dan 2.1.2

Tabel. 2.27 Permasalahan dan Solusi Tindakan Isu Air Minum Kabupaten Kutai Timur

No.	Aspek Berkelanjutan	Permasalahan	Tantangan	Solusi dan Tindakan
1	Pendanaan	1 Masih terbatasnya anggaran untuk sarana air minum dan untuk perluasan jaringan air minum dari Pemerintah Daerah.	1 Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat	1 Perlunya peningkatan sarana air minum.
		2 Tarif air minum belum Full Cost Recovery (FCR)	2 Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum	2 Meningkatkan alokasi dana tiap tahun untuk sarana dan prasarana air minum
		3 Tingginya biaya operasional pemeliharaan pasca konstruksi	3 Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.	3 Perlu adanya upaya untuk memperoleh dana dari pihak lain yang tidak mengikat atau investasi lainnya dalam penyediaan sarana sarana air minum

		4	Sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan di bidang penyediaan sarana air minum belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target Universal Access.	4	a) Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran b) Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum.	4	a) Mencari dukungan pendanaan dengan sumber dana selain APBD antara lain APBN, Corporate Social Responbility (CSR), dan sumber dana lain b) Menjadikan bagian dari prioritas pendanaan air minum dari sumber - sumber pendaanaan , bak dari pusat, provinsi, daerah, swasta dan masyarakat
		5	Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi	5	Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain dan banyaknya program-prograam AMPL yang memiliki metode pendampingan berbeda-beda.	5	a) Kerjasama pemangku kepentingan dan seluruh tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat komunitas dengan mempertimbangkan keseimbangan jender dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang menyangkut air b) Tersedianya dana untuk pembangunan sumur Bor di setiap desa c) Tersedianya subsidi air minum bagi warga desa yang rawan air c) Anggaran bidang air minum belum menjadi prioritas oleh para pengambil kebijakan
2	Teknis	1	Kualitas sarana air minum masih banyak yang belum memenuhi syarat teknis	1	a) Perkembangan teknologi penyediaan air minum yang semakin maju untuk menilai kualitas air yang dikonsumsi masyarakat	1	a) Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait terus mengembangkan dan menyediakan teknologi untuk memonitor kualitas air yang dikonsumsi masyarakat

					b) Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan c) Beberapa desa tidak terdapat sumber mata air f) Belum adanya Studi tentang Kualitas dan Potensi Air minum di Kabupaten Kutai Timur		b) Tersedianya cadangan air baku berupa embung atau bendungan c) Perluasan jaringan air minum ke daerah rawan air f) Adanya penelitian studi tentang Kualitas dan Potensi Air minum di Kabupaten Kutai Timur
		2	Kesadaran masyarakat terhadap standar jarak pembuangan air limbah dengan sumber air (sumur bor,dll)	2	a) Tidak ada pilihan teknologi untuk mencegah rembesan WC masyarakat ke sumur b) Sebagian sumur dalam airnya mengandung kadar zat besi (fe) diatas ambang batas yang di syaratkan sehingga diperlukan investasi pengolahan c) Kondisi debit sumur dalam terus menurun dari tahun ke tahun	2	a) Pemanfaatan teknologi modern yang bisa dipergunakan untuk menyedot air di musim kemarau b) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mencapai efisiensi penggunaan air c) Tersedianya cadangan air baku berupa embung atau bendungan
3	Kelembagaan	1	Masih rendahnya peran serta masyarakat dan belum mempunyai kelembagan yang mengurusi air	1	Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan	1	PDAM telah memperluas jaringan dan pelayanan penyediaan air.
		2	Belum terkoordinasinya pelaksanaan sektor AMPL dimana pelaksanaannya masih oleh masing-masing Satker/opd yang berhubungan dengan kegiatan AMPL.	2	a) Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan b) Belum adanya BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan	2	a) Kinerja Tim Pokja AMPL telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan sektor air minum. b) Telah terbentuk BPSPAMS/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) di desa-desa lokasi PAMSIMAS untuk mengelola air minum layak

							c) Mengajak masyarakat di desa-desa lokasi penyediaan air minum perdesaan non PAMSIMAS untuk bergabung dalam Asosiasi BPSPAMS d) Pengelolaan air, termasuk pemantauan dan evaluasi, harus diaksanakan di tingkat terbawah
4	Lingkungan	1	Pencemaran lingkungan oleh limbah cair/padat domestik maupun industri yang dibuang ke sungai	1	a) Menetralkan wilayah garis sepadan sungai terhadap aktivitas limbah	1	a) Penyuluhan yang sering dilakukan oleh Tim Pokja tentang bahaya membangun sumur yang terlalu dekat dengan septictank mengubah mindset masyarakat menjadi lebih baik
					b) Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku		b) Dinas Kesehatan selaku anggota tim Pokja AMPL secara optimal melakukan penyuluhan intensif tentang keterkaitan kualitas air dengan lingkungan
		2	Meningkatnya kawasan Rawan Air	1	Menjaga ketersediaan air dengan cara mengawasi secara ketat terhadap penebangan hutan liar dan pembuangan sampah sembarangan ke sungai	1	a) Pemerintah daerah lebih menjaga ketersediaan air dengan cara mengawasi secara ketat terhadap penebangan hutan liar dan pembuangan sampah sembarangan ke sungai karena akan mempengaruhi terhadap simpanan air di dalam tanah dan kualitas air yang dapat digunakan. b) Pembangunan PAH (Penampungan Air Hujan) termasuk sumur resapan dapat dijadikan alternatif mengurangi aliran

							permukaan dan mencegah terjadinya genangan air c) Pada kelerengan yang curam sebaiknya ditanam tanaman yang tetap dan tidak ditebang sehingga dapat memperkecil laju aliran permukaan pada saat hujan terjadi karena akar tanaman akan menahan air di dalam tanah d) Perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder e) Konservasi dan proteksi sumber air dan daerah tangkapan air melalui perencanaan tata ruang
5	Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	1	Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan	1	Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif	1	Membuat Peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum
6	Sosial	1	Masih terdapatnya sarana air minum yang belum memenuhi syarat air minum layak	1	Membuat izin penyediaan air minum isi ulang dan pengecekan kualitas air minum yang disediakan swasta maupun sarana masyarakat	1	Banyak sarana sumur bor untuk masyarakat umum di Kabupaten Kutai Timur baik melalui bantuan Pemerintah maupun swadaya masyarakat.
		2	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat terhadap kelestarian sumber air baku dan kelayakan air minum	2	Mengadakan edukasi kepada masyarakat kesadaran menjaga lingkungan dan sumber air minum	2	Di musim kemarau warga tidak harus mengambil air jauh dari tempat tinggalnya karena telah ada bantuan sarana air minum.
		3	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan sarana air	3	Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum	3	a) Masyarakat mulai sadar untuk menjaga kelestarian

	minum dan penyehatan lingkungan		sumber air dan air minum layak b) Masyarakat telah mempunyai kesadaran tinggi tentang air sebagai benda ekonomi, sehingga lebih bisa berhemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. c) Mengembangkan capacity building melalui pendidikan dan komunikasi kepada masyarakat untuk menyediakan informasi yang relevan demi meningkatkan perhatian masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat terhadap 'nilai' air minum Peningkatan pemahaman terhadap 'nilai' air melalui penyediaan insentif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air
4	Konflik pemanfaatan air untuk air minum dan irigasi pertanian	4	Menjaga kelestarian sumber air baku dan prasarana penampungan cadangan air baku
5	Anggapan masyarakat di perdesaan bahwa air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum	5	Peningkatan pemahaman terhadap 'nilai' air melalui penyediaan insentif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air

Tabel.2.28 Permasalahan dan Solusi Tindakan Isu Sanitasi Kabupaten Kutai Timur

No.	Aspek Berkelanjutan	Permasalahan	Tantangan	Solusi dan Tindakan

1	Pendanaan	1	Masih terbatasnya anggaran untuk sanitasi dari Pemerintah Daerah.	1	Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat	1	Peningkatan sarana sanitasi masyarakat menyeluruh
				2	Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan sanitasi	2	Meningkatkan alokasi dana tiap tahun untuk sarana dan prasarana sanitasi
				3	Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.	3	Perlu adanya upaya untuk memperoleh dana dari pihak lain yang tidak mengikat atau investasi lainnya dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah dan limbah
		2	Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi	4	Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain dan banyaknya program-prograam AMPL dan program-program tersebut memiliki metode pendampingan berbeda-beda.	4	Mencari dukungan pendanaan dengan sumber dana selain APBD antara lain APBN, Corporate Social Responbility (CSR), dan sumber dana lain
		3	Sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan di bidang penyediaan sarana penyehatan lingkungan belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target Universal Access.	5	Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan sanitasi	5	Menjadikan bagian dari prioritas pendanaan penyehatan lingkungan dari sumber - sumber pendanaan , bak dari pusat, provinsi, daerah, swasta dan masyarakat
		4	Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat	6	Anggaran bidang sanitasi belum menjadi prioritas oleh para pengambil kebijakan		
2	Teknologi	1	Distribusi sampah keseluruh akses masyarakat belum terkoordinasi	1	Menyediakan fasilitas mobilisasi distribusi sampah diseluruh akses masyarakat	1	Truck sampah, motor bak sampah jumlahnya mulai ditambah dan pengaturan rute, jadual penmbuangan sampah dimasyarakat
		2	Teknologi bidang sanitasi hanya terbatas pada pembangunan septiktank	2	Memperkenalkan sarana sanitasi komunal dan teknologi sanitasi tepat guna	2	Pilihan teknologi sanitasi sudah dimulai diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten

							terutama melalui Dinas Kesehatan.
						3	Penerapan teknologi open dumping dalam pengolahan sampah
3	Kelembagaan	1	Belum ada peraturan tentang sanitasi	1	Belum ada peraturan tentang sanitasi	1	Penyuluhan tentang pentingnya sanitasi.
		2	Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan	2	Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan	2	Dukungan Pemda yang dicerminkan dengan dibentuknya Tim Pokja dengan SK Bupati dalam pembangunan sektor sanitasi dan penyehatan lingkungan.
		3	Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan	3	Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan	3	Tim Pokja AMPL sering melakukan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan
		4	Belum terkoordinasinya pelaksanaan sektor AMPL dimana pelaksanaannya masih oleh masing-masing Satker/opd yang berhubungan dengan kegiatan AMPL.	4	Belum terbentuknya BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan selain Pamsimas	4	Kinerja Tim Pokja AMPL telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan sektor air minum.
		5	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	5	Mengubah pola hidup masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat dan melestarikan lingkungan	5	Telah terbentuk BPSPAMS/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) di desa-desa lokasi PAMSIMAS untuk mengelola sampah dan limbah
						6	Melibatkan tokoh-tokoh agama dalam sosialisasi kepada masyarakat hidup sehat dan melestariakan lingkungan
4	Lingkungan	1	Lingkungan masih tercemar	1	Memperbaharui lingkungan yang tercermar secara berkelanjutan	1	Membangun TPA di kecamatan-kecamatan padat penduduk
		2	Keterbatasan sarana sanitasi dasar yang layak sehingga masyarakat buang hajat di kebun maupun sungai.	2	Menyediakan sarana sanitasi dan menyadarkan masyarakat fungsi sanitasi bagi lingkungan	2	Penyuluhan secara intensif tentang keterkaitan PHBS masyarakat oleh TUIM Pokja AMPL dan instansi terkait untuk mengubah mindset masyarakat menjadi lebih baik

		3	Pencemaran lingkungan oleh limbah cair/padat domestik maupun industri yang dibuang ke sungai /selokan tanpa diolah.	3	a)Menetralkan wilayah garis sepadan sungai terhadap aktivitas limbah dan membuat inovasi di wilayah pencemaran oleh limbah domestik penduduk padat di kawasan kumuh garis sepadan sungai b)Menjaga fungsi drainase sebagai saluran pembuangan limbah cair dan pencegah banjir	3	a) Program bantuan sarana sanitasi ditambah bagi masyarakat. b) Dinas Kesehatan selaku anggota tim Pokja AMPL secara optimal melakukan penyuluhan intensif tentang keterkaitan kualitas air dengan lingkungan
5	Peraturan Perundangan dan penegakan hukum	1	Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan	1	Merancang dan berlakukan peraturan perundangan terkait ketegasan ketertiban membuang sampah dan pengelolaan lombah baik domestik maupun industri	1	Merancang dan berlakukan Perda bagi seluruh masyarakat tentang ketertiban Pengelolaan Sampah dan limbah
		2	Belum adanya Peraturan perundangan (Perda / Perbup, dll) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman	2	Belum ada peraturan daerah yang mengatur Restribusi Pembuangan Air Limbah Permukiman		
6	Sosial	1	PHBS masyarakat masih sangat rendah	1	Mensosialiasasikan kepada masyarakat sadar akan pentingnya PHBS	1	Sosialisasi dan Penyuluhan secara intensif diharapkan sedikit demi sedikit mulai dapat merubah perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat.
		2	Masih banyak terdapat wilayah yang belum memiliki sanitasi yang layak	2	Membuat izin penyediaan air minum isi ulang dan pengecekan kualitas air minum yang disediakan swasta maupun sarana masyarakat	2	Adanya penghargaan bagi pengelola AMPL yang baik

3	Belum tertariknya swsata untuk melakukan investasi bidang air minum dan sanitasi	3 Mengadakan edukasi kepada masyarakat kesadaran menjaga lingkungan dan sumber air minum	3 Pemasyarakatan AMPL dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat rukun tetangga (RT)
4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat	4 Rendahnya partisipasi aktif masyarakat	4 Setiap rumah, sekolah dan sarana publik memiliki sarana AMPL
5	Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat	5 Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat	5 Pendidikan PHBS sejak usia dini disekolah dan dirumah
6	Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan limbah		6 Adanya pelatihan rutin bagi masyarakat tentang AMPL
			7 Penyuluhan yang berkelanjutan tentang AMPL

Sumber: Hasil Analisa, tahun 2013-2016

2.6.2 Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
2) Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan PDAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.
3) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

   Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.
4) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi *on-site* yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

5) Belum diimbanginya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak. Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (sewerage system) dan skala komunal (communal system).
6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.
7) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.

   Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (*full-cost recovery)*. Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.
8) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi

yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

9) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta. Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET



3.1. ISU STRATEGIS SEKTOR AMPL DALAM PENCAPAIAN TARGET AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2021

Dari permasalahan yang telah diuraikan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu strategis sektor AMPL. Isu strategis merupakan hasil analisis terhadap permasalahan dan tantangan yang ada. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode SWOT. Faktor-faktor yang dianalisis adalah kondisi internal dan eksternal. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.1.1
Analisis Isu Strategis metode SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1 Keberadaan Pokja AMPL **2 Pimpinan daerah yang akomodatif** **3 Motivasi untuk maju**	**1 Pelayanan masyarakat kurang optimal** **2 Anggaran daerah AMPL rendah** **3 Koordinasi antar program AMPL kurang**
KESEMPATAN		
1 Demokratisasi dan desentralisasi	1 Inovasi kebijakan pembangunan AMPL daerah	1 Meningkatkan sinergi partisipasi seluruh pelaku dalam pembangunan AMPL yang efektif dan berkelanjutan
2 Tersedianya potensi pembangunan AMPL daerah	2 Sinkronisasi regulasi kebijakan pembangunan AMPL daerah	2 Mengembangkan prinsip pemulihan biaya dalam pembangunan AMPL daerah
3 Daya dukung lembaga kemasyarakatan	3 Optimalisasi pelayanan dan akses pembangunan sarana dan prasarana AMPL daerah	3 Meningkatkan koordinasi antar program AMPL daerah
4 Kebijakan yang berorientasi pengentasan kemiskinan	4 Efektifitas dan keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana AMPL daerah	4 Peningkatan fasilitas dalam mengembangkan konsep swakelola masyarakat dalam pembangunan AMPL daerah
ANCAMAN		
1 Tercemarnya sumber air baku untuk air minum	1 Meningkatkan sinergi partisipasi elemen pelaku dalam melestarikan sumber air baku	1 Mengelola segala potensi menjadi berkualitas
2 Rendahnya kesadaran tentang PHBS	2 Meningkatkan kampanye dan pendidikan PHBS	2 Membuka ruang partisipasi multi pihak seluas-luasnya untuk peningkatan kualitas SDM
3 Belum sepenuhnya penerimaan kebijakan AMPL daerah oleh seluruh *stakeholders*	3 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan AMPL di daerah 4 Meningkatkan koordinasi Pokja AMPL daerah	3 Kolaborasi Program Multipihak

Sumber: Hasil Analisa, tahun 2013-2017

Hasil formulasi isu strategi dirumuskan dari analisa kondisi eksternal dan internal dengan mempertimbangkan hasil kajian pendalaman kebijakan nasional dan strategi pelaksanaan AMPL Berbasis Masyarakat melalui hasil pelatihan/lokakarya yang telah dilaksanakan serta perumusa permasalahan dan prioritas permasalahan AMPL yang ada.

Formulasi rumusan isu strategi mempunyai hubungan erat atau berpengaruh langsung terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada Empat isu strategis yang berhasil diformulasikan untuk menjadi dasar penyusunan strategi pencapaian RAD AMPL yaitu :

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Kutai Timur dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2021 adalah :

1) Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM dan Non PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
2) Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan;
3) Terbatasnya sumber sumber air baku yang sustainable dan dapat diandalkan;
4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS;
5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan;
6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi;
7) Belum sepenuhnya penerimaan kebijakan AMPL daerah oleh seluruh *stakeholders*

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai target pelayanan sistem perpipaan 40% dan non perpipaan sebesar 30% penduduk, konsep perencanaan dilakukan sebagai berikut:

a. Asumsi pertumbuhan penduduk per tahun adalah 2 %;
b. Sistem pelayanan dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
   1. Melalui PDAM melayani 40 % penduduk yang berdomisili di perkotaan;
   2. Melalui PAMDES melayani 50% penduduk yang berdomisili di pedesaan;
   3. Melalui Pamsimas dilayani 55 lokasi dengan tingkat layanan 10% penduduk;

4. Melalui SPAM IKK yang dibangun pada wilayah pedesaan dan dioperasikan oleh masyarakat dengan tingkat pelayanan 5% penduduk;
5. Melalui sistem non perpipaan atau pelayanan dengan sumur gali, yang berkualitas baik diperkirakan akan mampu melayani penduduk hingga 32%

c. Skenario pencapaian target pelayanan 70% penduduk tahun 2018, dicicil setiap tahun dengan menentukan target tahunan, yaitu tahun 2019 sebesar 20%, tahun 2020 sebesar 20% dan tahun 2021 sebesar 30 %.

3.2 . ARAH KEBIJAKAN AMPL TAHUN 2019 - 2021

Berdasarkan hasil perumusan strategi pembangunan Kabupaten Kutai Timur melalui penggunaan matriks SWOT dan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, diformulasikan strategi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau dimulai masa penyusunan RAD AMPL (2018-2021). Terkait dengan percepatan pencapaian target ke-6 SDGs dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) khususnya pada bidang AMPL sangat terkait dengan strategi pembangunan bidang *'Sumber Daya Alam dan Lingkungan'*, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan) dan kelembagaan lokal untuk pemerataan pengembangan potensi daerah dan antisipasi konflik horizontal dalam masyarakat dengan dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga pembiayaan pemerintah/swasta atau swadaya masyarakat;
2. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan pada perkotaan dan pedesaan;
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi;
4. Menggalakkan program AMPL berbasis masyarakat, seperti: STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), PAMDES, PAMSIMAS bagi desa yang mempunyai tingkat cakupan akses air minum dan sanitasi rendah dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
5. Menggalakkan kampanye Perilaku Hidup Minum dan Sehat (PHBS);

6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Pokja AMPL;
8. Meningkatkan alokasi APBD Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan investasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pencapaian target 6 SDGs dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan mengupayakan dukungan pendanaan dari APBD provinsi, APBN, CSR, dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan delapan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, maka program dan kegiatan prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 - 2021 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel. 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2018 – 2021

No	Sasaran AMPL Tahun 2017-2021	Arah Kebijakan dan Strategi	Program		Kegiatan	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat	Meningkatkan jangkauan layanan air minum dan sanitasi	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
			2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
			3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

			4	Program Pembangunan Infrastruktur AMPL Perkotaan dan Perdesaan	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Perkotaan dan Perdesaan
			5	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	5	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku
					6	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
					7	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
					8	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
					9	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri	1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
			2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
					3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
					4	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

					5	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
					6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3	Meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup	Pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Air
			2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
					3	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
					4	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
					5	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
					6	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
					7	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
					8	Rehabilitasi hutan dan lahan
4	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Pengendalian dampak lingkungan	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura
			2	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	2	Pemantauan kualitas lingkungan

			3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	3	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
					4	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
					5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
					2	Hibah kepada PAMDES
					3	Hibah kepada Pengelola Sarpras Sanitasi Berbasis Masyarakat
6	Meningkatnya koordinasi dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)	Meningkatkan koordinasi dan sinergisasi pembangunan		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Kebijakan pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum di Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, kebijaksanaan SPAM dilakukan sebagai berikut :

1. Pelayanan SPAM adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;
2. Sistem pelayanan untuk daerah perkotaan dilakukan melalui sistem perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan untuk kawasan pedesaan, pelayanan SPAM dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem Perpipaan di pedesaan dibangun dengan investasi pemerintah dan masyarakat dimana pengoperasionalannya melibatkan organisasi kelompok masyarakat.

Sedangkan sistem non perpipaan dilaksanakan secara individu oleh masyarakat dengan bimbingan teknis dari instansi teknis daerah;

3. Target pelayanan SPAM pada tahun 2021, disesuaikan dengan target pelayanan yang disepakati pada SDGs, yaitu mencakup 60 % penduduk;
4. Keterbatasan kemampuan investasi Pemerintah dan PDAM dalam membangun sistem jaringan perpipaan, maka untuk pembangunan WTP dan jaringan distribusi utamadilakukan dengan investasi pemerintah, sedangkan pembangunan jaringan distribusi sekunder sampai ke SR, dilakukan melalui investasi PDAM;
5. Penetapan prioritas pembangunan SPAM ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan air minum tiap-tiap kawasan/nagari;
6. Pelayanan SPAM dilakukan dengan menerapkan prinsip hemat, efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan, baik dalam pemanfaatan air baku, pengolahan air maupun dalam manajemen pendistribusiannya.

3.3 . STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 2018-2021

Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi;
2. Pengembangan pendanaan untuk peningkatan capaian akses air minum dan sanitasi;
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan;
4. Peningkatan penyediaan sumber air baku secara berkelanjutan;
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN



4.1. TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN AMPL JANGKA MENENGAH

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Kutai Timur dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2021 adalah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.2.1
Tujuan dan Sasaran pelayanan AMPL Jangka Menegah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 54,40 % menjadi .....%	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	18,195	25	32,5	40	50
			Tambahan cakupan di perkotaan	27,2	30	35	40	50
			Tambahan cakupan di perdesaan	9,19	20	30	40	50
2	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 10 % menjadi 50%	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan					
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)					
			Tambahan cakupan di perdesaan					
3	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari kapasitas terpasang 100 L/detik menjadi 200/L/detik	Debit pasokan air					

4	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 47,63% menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)					
5	Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan dunia usaha	Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMPL dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.	Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi	1	0	0	0	0

4.2. PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN AMPL TAHUN 2018-2021

1. PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diprioritaskan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, antara lain diarahkan pada:

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Minum
   - Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan IKK

b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Air Baku

1. Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Sumber Air Baku
   a. Pengembangan unit sumber air baku:
      - DED SPAM Regional;
      - UKL/UPL SPAM Regional;
      - Jaringan transmisi dan distribusi air minum SPAM Regional;

- DED SPAM Embung;
- UKL/UPL SPAM;
- Jaringan transmisi air baku dan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM)

b. Pengembangan unit produksi:

1. Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM);
2. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah;
3. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum;
4. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM), jaringan transmisi dan distribusi di Kabupaten Kutai Timur;
5. Jaringan Distribusi Umum (JDU) dan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Regional;
6. Jaringan Distribusi Umum (JDU) dan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Embung;
7. Pengembangan unit distribusi;
8. Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR) SPAM Regional;
9. Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR) SPAM Embung

c. Pengembangan unit pelayanan

- Pemasangan jaringan pipa distribusi DN 50-100 mm

d. Penambahan kapasitas produksi

2. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum

a. Training Staff

b. Pembinaan Penyehatan PDAM (Bantek/Banpro/Bantuan Menejemen)

2. PENGEMBANGAN KAPASITAS SISTEM AIR MINUM

Pengembangan kapasitas sistem air minum diprioritaskan pada Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, serta Program Perencanaan Pengembangan Kota, antara lain diarahkan pada:

a. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin

(a) Pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan (IKK)

- Pembangunan/Peningkatan SPAM IKK Kecamatan dan Kota;
- Pembangunan/Peningkatan SPAM di Kawasan RSH;
- Penyediaan Air Minum di Kawasan Potensial;
- Pembangunan/peningkatan SPAM di Kawasan Kumuh

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(a) Pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan

- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
- Pembangunan/Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air;
- Pengembangan Air Minum di Zona Pedesaan

2. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
   - Penyusunan Data Base Titik Air;
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
   - Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

c. Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan

(a) Pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan;

- Prasarana dan Sarana Air Minum Desa Tertinggal;

- Prasarana dan Sarana Air Minum Desa Berkembang;

d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, yang diarahkan pada Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur;

e. Program Perencanaan Pengembangan Kota yang diarahkan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan;

3.PENURUNAN KEBOCORAN AIRMINUM

Penurunan kebocoran air minum diprioritaskan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, antara lain diarahkan pada :

a. **Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum**

(1) Rehabilitasi jaringan distribusi lama DN. 150-250 mm;

(2) Rehabilitasi jaringan transmisi 350 mm;

(3) Rehabilitasi jaringan tersier DN 40-100 mm

4. PENINGKATAN PENERAPAN PRILAKU HIDUP MINUM DAN SEHAT (PHBS)

Peningkatan penerapan PHBS diprioritaskan pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat, serta Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain diarahkan pada:

a. **Program Pengembangan Lingkungan Sehat**

(1) Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

(a) Penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas;

(b) Pengawasan kualitas air minum perpipaan (PDAM);

(c) Advokasi Pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan kampanye STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan)

(2) Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat ;

(3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat;

(4) Kegiatan Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi

b. **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

(1) Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;

(2) Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;

(3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. PENYEDIAAN KEBUTUHANSANITASI

Penyediaan kebutuhan sanitasi diprioritaskan pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang diarahkan pada :

a. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang diarahkan pada Kegiatan Peningkatan Sanitasi Dasar;

b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang diarahkan pada Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan.

1. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENGELOLAAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (BPSPAMS)

Pengembangan BPSPAMS diprioritaskan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaanan, antara lain diarahkan pada :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

(1) Penguatan kelembagaan BPSPAMS ;

(2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;

(3) Monitoring dan evaluasi kinerja BPSPAMS

2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan diprioritaskan pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, antara lain diarahkan pada :

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;
2. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air;
3. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air;
4. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan;
5. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA;
6. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
7. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1. Rehabilitasi hutan dan lahan.

3. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Program Peningkatan Pengendalian Polusi, antara lain diarahkan pada :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
3. Kegiatan Peningkatan Kinerja Perusahaan (Proper)

b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1. Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 4.1. Matriks Program dan Kegiatan Prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA AWAL 2017	TARGET CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-				PELAKSANA	KET
							2018	2019	2020	2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
A	**BIDANG AIR MINUM**											
1	Tercapainya target pencapaian akses air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum terhadap capaian target air minum layak dan berkelanjutan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Air Minum	Penyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan SPAM	dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Pengembangan SPAM			1 Dokumen Perencanaan			BAPPEDA	
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan IKK	Dokumen rencana Pembangunan Jaringan Air Bersih Kawasan Rawan Air			Perencanaan IPA dan Jaringan Muara Ancalong (DPU)	Perencanaan IPA dan Jaringan (DPU)	Perencanaan IPA dan Jaringan (DPU)	DPU/PDAM	
		Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dari **67,69 %** pada tahun 2017 menjadi **95,32 %** pada tahun 2021	Program Pembangunan Air Minum Perkotaan	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	73,08% (PDAM)	80,62%(PDAM)	88,04% (PDAM)	95,32% (PDAM)	Pembangunan Jaringan Baru 3000 m (DPU)	DPU/PDAM	
				Pembangunan daerah yang belum memiliki layanan air minum	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru perkotaan		17173 SR (PDAM)	19173 SR (PDAM)	21173 SR (PDAM); 200 SR (DPU)	23173 (PDAM; 300 SR (DPU)	DPU/PDAM	
				Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	- Unit IPA dengan kapasitas 430 Liter/Detik dan tambahan 9.127 SL wilayah pelayanan perkotaan pada Tahun 2021	570 SL (PDAM)	570 SL (PDAM)	630 SL (PDAM)	720 SL (PDAM)	720 SL (PDAM); 1. Pembangunan IPA Muara Ancalong (DPU) 2. Pembangunan IPA Muara Wahau (DPU)	DPU/PDAM	
		Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perdesaan dari 51,55 % pada tahun 2017 menjadi ..... % pada tahun 2021	Program Pembangunan Air Minum Pedesaan	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pedesaan				Pembangunan Jaringan Baru5000 m (DPU)	Pembangunan Jaringan Baru 6000 m (DPU)	DPU/PDAM	
				Pembangunan daerah yang belum yang belum memiliki layanan air minum	Cakupan penduduk zona perkotaan yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	67,69% (PDAM)	73,08% (PDAM)	80,62% (PDAM)	88,04% (PDAM); 200 SR (DPU)	95,32% (PDAM), 300 SR (DPU)	DPU/PDAM	
				Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Unit IPA dengan kapasita 290 Liter/Detik dan tambahan 10.137 SL wilayah pelayanan pedesaan pada Tahun 2021	570 SL (PDAM)	570 SL (PDAM)	630 SL (PDAM)	720 SL (PDAM)	720 SL (PDAM)		

			Program Pembangunan Air Minum Berbasis Masyarkat	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun desa berbasis masyarakat	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru	4565 SR (DISPEMAS/ PAMDES)	2044 SR (DISPEMAS/P AMDES); 6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	4831 SR (DIPSEMAS/PAM DES);6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	629 SR(DIPSEMAS/PAM DES); 6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	DINAS PERKIM/DISM PEMAS/PAMD ES/PAMSIMAS	
				Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangundesa berbasis masyarakat	Terbangunnya sarana air bersih di pedesaan; seperti: Unit Intake, Bangunan Perlindungan Mata Air (Broncaptering),Pintu Air, Bar Screen, Pompa Air	11 Desa (DISPEMAS/ PAMDES)	6 Desa (DISPEMAS/ PAMDES)	11 Desa (DISPEMAS/PAM DES)	2 Desa (DISPEMAS/PAMDE S)	11 Desa (DISPEMAS/PAMDES)	DINAS PERKIM/PAM DES/PAMSIMA S	
			Program Pembangunan air minum non-perpipaan	Bantuan stimulant pembangunan desa rawan air	Tambahan SR dengan pembangunan unit sumur bor			100 SR(DISPEMAS/P AMDES)	150 SR(DISPEMAS/PAM DES)	200 SR(DISPEMAS/PAMDES)	DINAS PERKIM/PAM DES/PAMSIMA S	
				Bak Penampungan Air Bersih Masyarakat	Cakupan rumah tangga(Resevoir) terhadap akses berkelanjutan didesa rawan air			200 SR(DISPEMAS/P AMDES)	200 SR(DISPEMAS/PAM DES)	200 SR(DISPEMAS/PAMDES)	DINAS DISPEMAS/PA MDES/PAMSI MAS	
B	**BIDANG SANITASI**											
	Tercapainya target proporsi wilayah genangan terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Berkurangnya wilayah genangan air dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan Sanitasi Kawasan Permukiman	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Perencanaan Penyusunan Dokumen PPSP			1 Dokumen Perencanaan			BAPPEDA	
				Perencanaan teknis pembangunan saluran drainase lingkungan skala kecamatan	Masterplan drainase lingkungan skala kecamatan	1 Dokumen Perencanaa n	-	-		-	DINAS PERKIM	
				Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Kawasan Perumahan dan permukiman	Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)	-	1 Dokumen Perencanaan	-	-	-	DINAS PERKIM	
	Tercapainya target Proporsi rumah tangga dengan akses layak dan berkelanjutan terhadap sanitasi dasar perkotaan	Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar perkotaan dari 42,91% pada tahun 2017 menjadi .....% pada tahun 2021	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Permukiman Perkotaan	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK	Cakupan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak terhadap sanitasi dasar perkotaan	4 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	DINAS PERKIM	
				Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK	Cakupan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak terhadap sanitasi dasar perkotaan	1000 m Drainase	1000 m Drainase	5000 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	DINAS PERKIM	
				Pembangunan/Peningkatan Lingkungan Drainase Zona Perkotaan	cakupan wilayah genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	DINAS PERKIM	

				Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Lingkungan Zona Perkotaan	cakupan wilayah saluran drinase genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	DINAS PERKIM	
			Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Permukiman Perkotaan	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK	cakupan wilayah genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan						DINAS PERKIM	
				Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK	cakupan wilayah saluran drinase genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan						DINAS PERKIM	
	Tercapainya target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar pedesaan	Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar pedesaan dari 57,06% pada tahun 2017 menjadi .....% pada tahun 2021	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Permukiman Perdesaan	Pembangunan tangki septik skala komunal (5 -10)	Jumlahtangkiseptiktank skala komunal yang dibangun						DINAS PERKIM/PAMSIMAS	
				Pembangunan tangki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK	Jumlahtangkiseptiktank skala individual yang dibangun						DINAS PERKIM/PAMSIMAS	
				Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sistem drainase lingkungan mandiri	Jumlah kelompok pengelolaan sistem drainase yang dibentuk						DINAS PERKIM/PAMSIMAS	
			Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Pedesaan	Penyediaan Sarana Sanitas Dasar terutama bagi masyarakat miskin	Cakupan rumah tangga akses tidak layak terhadap kebutuhan santasi layak Pedesaan						DINAS PERKIM/PAMSIMAS	
				Pembangunan/Peningkatan Lingkungan Drainase Zona Pedesaan	cakupan wilayah genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak Pedesaan						DINAS PERKIM	
				Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Lingkungan Zona Pedesaan	cakupan wilayah saluran drinase genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak Pedesaan						DINAS PERKIM	
	Tercapainya target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi sektor persampahan		Program Pengembangan Kinerja Pengembangan Persampahan	Penyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan sampah	dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Ppengelolaan smapah						DINAS LH	

				Perencanaan Jaringan persampahan skala kecamatan	Masterplan jaringan persampahan skala kecamatan						DINAS LH	
				Pelatihan 3R bagi aparat pengelola Persampahan	cakupan pelayanan sanitasi perkecamatan terhadap akses sanitasi layak dan berkelanjutan						DINAS LH	
				Sosialisasi perda pengelolaan sampah pada masyarakat	cakupan jiwa terhadap akses sanitasi layak dan berkelanjutan pada sektor sektor persampahan						DINAS LH	
		Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah terhadap capaian target sanitasi layak dan berkelanjutan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Air Minum	Penyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah	dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Pengelolaan Sampah			1 Dokumen Perencanaan			BAPPEDA	
					Perencanaan Jaringan Pengelolaan Sampah Kecamatan			2 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	1Dokumen Perencanaan	DINAS LH	
		Memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah terhadap volume sampah perhari	Program Pengolahan Sampah dari Sumbernya	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Untuk Rumah Tangga	cakupan jiwa terhadap kebutuhan bak sampah dalam pencapaian akses sanitasi						DINAS LH	
				Pengadaan Gerobak Sampah bersekat	cakupan jiwa terhadap kebutuhan gerobak sampah dalam pencapaian akses sanitasi						DINAS LH	
				Pembangunan TPS dan TPS 3R	cakupan jiwa terhadap kebutuhan TPS dan TPS 3R dalam pencapaian akses sanitasi						DPU	
				Pembangunan TPA Kecamatan	cakupan jiwa terhadap kebutuhan TPA dalam pencapaian akses sanitasi						DPU	
C	**BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN**											
	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS 64% pada tahun 2017 menjadi 78% pada tahun 2021	Penigkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS	45,12%	47,27%	49%	52%	54%	DINKES	

			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	sarana media promosi dan informasi sadar hidup sehat				2 Kecamatan	2 Kecamatan	DINKES	
				Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan	Jumlah tenaga promosi kesehatan yang dilatih	21 Peserta			25 Peserta	25 Peserta	DINKES	
			Kualitas air minum	Peningkatan Pengawasan external PDAM, dan DAMIU	Presentase Sarana Air Minum yang di lakukan pengawasan	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	DINKES	
				Sosialisasi Perda DAMIU No. 10 Tahun 2017	Jumlah Pesertayang mengikutisosialisasi DAMIU		200 Peserta	100 Peserta	200 Peserta		DINKES	
			Penurunan Stunting	Kegiatan Pemantauan Balita Bawah Garis Merah dan Perawatan Balita Gizi Buruk di Zona Perkotaan	Cakupan penderita stunting terhadap akses lingkungan sehat	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	
				Pengadaan PMT BUMIL KEK	Jumlah Unit PMT yang disediakan	32,17%	70,83%	100%	100%	100%	DINKES	
				Pengadaan PMT Bayi/Balita Penduduk Miskin	Jumlah Unit PMT Bayi/Balita Penduduk Miskin yang disediakan	67,72%	87,87%	100%	100%	100%	DINKES	
				Pengadaan Taburia	Jumlah Unit Taburiayang disediakan	100%		100%	100%	100%	DINKES	
				Pengadaan Mineral Mix	Jumlah Unit Mineral Mixyang disediakan	100%		100%	100%	100%	DINKES	
				Pengadaan Obat Cacing	Jumlah tablet Obat Cacing yang disediakan	100%		100%	100%	100%	DINKES	
			Penyehatan Lingkungan	Penyuluhan PHBS & CTPS	Jumlah Kelompok potensial yang mengikuti penyuluhan						DINKES	
				Verifikasi Desa ODF	Jumlah Desa ODF yang diverifikasi	3 Desa	11 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	DINKES	
				Pemicuan Desa terhadap Penyehatan Lingkungan	Jumlah desa yang dilakukan pemicuan STBM	30 Desa (96,6%)	38 Desa (100%)	40 Desa (100%)	40 Desa (100%)	40 Desa (100%)	DINKES	
				Pengawasan dan Pembinaan tempat-tempat umum	Jumlah tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	

				Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas	Jumlah TPS Limbah B3 di Puskesmas yang dibangun				5TPS (100%)	5 TPS (100%)	DINKES	
				Pengadaan Sanitarian Kit	JumlahSanitarianKityang diadakan	5 Sankit (100%)	5 Sankit (100%)	0	5 Sankit (100%)	6 Sankit (100%)	DINKES	
				Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Item Peralatan Laboratorium yang disediakan		100%				DINKES	
	Terpenuhinya kebutuhan air baku terhadap akses air minum layak dan berkelanjutan	Memenuhi kebutuhan sumber air baku untuk akses air minum layak dan berkelanjutan	Pelestarian sumber air baku untuk air minum	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah kawasan hutan daerah tangkapan air	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	DLH	
			Kualitas air minum	Studi tentang Kualitas dan Potensi Air minum di Kabupaten Kutai	Dokumen Kelas Air Sungai	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	DLH	
	Tercapainya akses universal pelayanan dasar di kawasan kumuh 0%	Memenuhi kebutuhan akses air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan di kawasan kumuh	Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh	Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitas Dasar terutama bagi masyarakat kawasan Kumuh	cakupan deliniasi kawasan kumuh perkotaan terhadap rumah tangga akses air minum dan sanitasi layak			15 Ha	15 Ha	15 Ha	OPD TERKAIT	

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI



5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019, SPM, dan SDGs 2030. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangkan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL.

Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut : Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Tabel. 5.1.1
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2017)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi s/d 2021
Jumlah penduduk (Jiwa)	418.625			
- Perkotaan	147.464			
- Perdesaan	271.161			
Jumlah penduduk yang dilayani (Jiwa)	263.909			
- Perkotaan	**147.464**	**5.976**		
a. PDAM	147.464	5.976	Rp. 3.000.000,-	17.928.000.000

b. Berbasis Masyarakat			Per SR Rp. 350.000,- per jiwa	
- Perdesaan	116.445			
a. PDAM	43.344	2.327	Rp. 4.000.000,-	9.307.301.587
b. Berbasis Masyarakat	9.357	28.071	Per SR Rp. 400.000,- per jiwa	11.228.342.857
Cakupan penduduk yang dilayani Wilayah Teknis (%)	57,79%			
- Perkotaan (%)	67,69%			
- Perdesaan (%)	45,26%			
Cakupan penduduk yang dilayani Wilayah Admistrasi (%)	36,43%			
- Perkotaan (%)	67,69%			
- Perdesaan (%)	19,44%			
	TOTAL			38.463.644.444,44

Tabel. 5.1.2
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (Tahun 2017)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi s/d 2021
Jumlah penduduk	418.625			
- Perkotaan	147.464			
- Perdesaan	271.161			
Jumlah penduduk yang dilayani	202.300	130.000		
- Perkotaan	49.636	50.000	Rp.200.000,- Per Jiwa	10.000.000.000,00
- Perdesaan	152.664	80.000	Rp.250.000,- Per Jiwa	20.000.000.000,00
Cakupan penduduk yang dilayani wilayah Teknis (%)	61,78			
- Perkotaan (%)	48,62			
- Perdesaan (%)	57,06			
Total				
Cakupan penduduk yang dilayani wilayah Admintrasi (%)	48,32			
- Perkotaan (%)	33,66			
- Perdesaan (%)	56,30			
Total				30.000.000.000

BAB V Kebutuhan Investasi

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2016 , target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2021 Kabupaten diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Kutai Timur menunjukkan perlunya:

1. Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan dan Pedesaan

5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel. 5.2.1
Matrix Program dan Kegiatan AMPL Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA AWAL 2017	TARGET CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-				PENDANAAN (RP.-)				SUMBER PENDANAN	PELAKSANA	KET
							2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
A	**BIDANG AIR MINUM**																
1	Tercapainya target pencapaian akses air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum terhadap capaian target air minum layak dan berkelanjutan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Air Minum	Penyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan SPAM	dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Pengembangan SPAM			1 Dokumen Perencanaan			900.000.000				APBD II	BAPPEDA	
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan IKK	Dokumen rencana Pembangunan Jaringan Air Bersih Kawasan Rawan Air			Perencanaan IPA dan Jaringan Muara Ancalong (DPU)	Perencanaan IPA dan Jaringan (DPU)	Perencanaan IPA dan Jaringan (DPU)		350.000	400.000	500.000	APBD II	DPU/PDAM	
		Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dari 67,69 % pada tahun 2017 menjadi 95,32 % pada tahun 2021	Program Pembangunan Air Minum Perkotaan	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	73,08% (PDAM)	80,62%(PDAM)	88,04% (PDAM)	95,32% (PDAM)	Pembangunan Jaringan Baru 3000 m (DPU)	Rp. 47.965.021.000 (PDAM)	Rp. 3.499.481.579 (PDAM)	Rp. 4.101.285.783 (PDAM); 2.000.000 (DPU)	3.000.000 (DPU)	DAK, APBN, APBD I, APBD II, BANKEU-P	DPU/PDAM	
				Pembangunan daerah yang belum memiliki layanan air minum	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru perkotaan		17173 SR (PDAM)	19173 SR (PDAM)	21173 SR (PDAM); 200 SR (DPU)	23173 (PDAM; 300 SR (DPU)			600.000 (DPU)	750.000 (DPU)	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DPU/PDAM	

				Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	- Unit IPA dengan kapasitas 430 Liter/Detik dan tambahan 9.127 SL wilayah pelayanan perkotaan pada Tahun 2021	570 SL (PDAM)	570 SL (PDAM)	630 SL (PDAM)	720 SL (PDAM)	720 SL (PDAM); 1. Pembangunan IPA Muara Ancalong (DPU) 2. Pembangunan IPA Muara Wahau (DPU)			10.000.000.000 (DPU)	15.000.000.000 (DPU)	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DPU/PDAM	
		Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perdesaan dari 51,55 % pada tahun 2017 menjadi ..... % pada tahun 2021	Program Pembangunan Air Minum Pedesaan	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pedesaan				Pembangunan Jaringan Baru 5000 m (DPU)	Pembangunan Jaringan Baru 6000 m (DPU)			5.000.000.000 (DPU)	6.000.000.000 (DPU)	DAK, CSR, APBD II	DPU/PDAM	
				Pembangunan daerah yang belum yang belum memiliki layanan air minum	Cakupan penduduk zona perkotaan yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	67,69% (PDAM)	73,08% (PDAM)	80,62% (PDAM)	88,04% (PDAM); 200 SR (DPU)	95,32% (PDAM), 300 SR (DPU)			600.000.000 (DPU)	900.000.000 (DPU)	DAK, CSR, APBD II	DPU/PDAM	
				Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun	Unit IPA dengan kapasita 290 Liter/Detik dan tambahan 10.137 SL wilayah pelayanan pedesaan pada Tahun 2021	570 SL (PDAM)	570 SL (PDAM)	630 SL (PDAM)	720 SL (PDAM)	720 SL (PDAM)					DAK, APBN, APBD I, APBD II		
			Program Pembangunan Air Minum Berbasis Masyarakat	Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun desa berbasis masyarakat	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru	4565 SR (DISPEMAS/PAMDES)	2044 SR (DISPEMAS/PAMDES); 6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	4831 SR (DIPSEMAS/PAMDES);6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	629 SR(DIPSEMAS/PAMDES); 6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	6700 jiwa pemanfaat (PAMSIMAS)	2.759.400.000 (PAMDES/DISPEMAS);3.600.000(PAMSIMAS)	6.521.850.000 (PAMDES/DISPEMAS);7.500.000(PAMSIMAS)	8.491.500.00 (PAMDES/DISPEMAS);7.500.000(PAMSIMAS)	7.500.000 (PAMSIMAS)	DAK, CSR, APBD II	DINAS PERKIM/DISMPEMAS/PAMDES/PAMSIMAS	
				Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangundesa berbasis masyarakat	Terbangunnya sarana air bersih di pedesaan; seperti: Unit Intake, Bangunan Perlindungan Mata Air (Broncaptering),Plnt	11 Desa (DISPEMAS/PAMDES)	6 Desa (DISPEMAS/PAMDES)	11 Desa (DISPEMAS/PAMDES)	2 Desa (DISPEMAS/PAMDES)	11 Desa (DISPEMAS/PAMDES)	3.474.893.260(DISPEMAS/PAMDES)	7.620.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	2.000.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	11.550.000.000 (DISPEMAS/PAMDES)	DAK, CSR, APBD II	DINAS PERKIM/PAMDES/PAMSIMAS	

					u Air, Bar Screen, Pompa Air												
			Program Pembangunan air minum non-perpipaan	Bantuan stimulant pembangunan desa rawan air	Tambahan SR dengan pembangunan unit sumur bor			100 SR(DISPEMAS/PAMDES)	150 SR(DISPEMAS/PAMDES)	200 SR(DISPEMAS/PAMDES)		350.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	270.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	400.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	DAK,CSR, APBD II, MASYARAKAT	DINAS PERKIM/PAMDES/PAMSIMAS	
				Bak Penampungan Air Bersih Masyarakat	Cakupan rumah tangga(Resevoir) terhadap akses berkelanjutan didesa rawan air			200 SR(DISPEMAS/PAMDES)	200 SR(DISPEMAS/PAMDES)	200 SR(DISPEMAS/PAMDES)		500.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	520.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	560.000.000(DISPEMAS/PAMDES)	DAK,CSR, APBD II, MASYARAKAT	DINAS DISPEMAS/PAMDES/PAMSIMAS	
B	**BIDANG SANITASI**																
	Tercapainya target proporsi wilayah genangan terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Berkurangnya wilayah genangan air dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan Sanitasi Kawasan Permukiman	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Perencanaan Penyususnan Dokumen PPSP			1 Dokumen Perencanaan			400.000.000				APBD II	BAPPEDA	
				Perencanaan teknis pembangunan saluran drainase lingkungan skala kecamatan	Masterplan drainase lingkungan skala kecamatan	1 Dokumen Perencanaan	-	-		-	-	-	-	-	APBD II	DINAS PERKIM	
				Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Kawasan Perumahan dan permukiman	Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)	-	1 Dokumen Perencanaan	-	-	-	600.000.000	-	-	-	APBD II	DINAS PERKIM	
	Tercapainya target Proporsi rumah tangga dengan akses layak dan berkelanjutan terhadap sanitasi dasar perkotaan	Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar perkotaan dari 42,91% pada tahun 2017 menjadi .....% pada tahun 2021	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Permukiman Perkotaan	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK	Cakupan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak terhadap sanitasi dasar perkotaan	4 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	1.002.500.000	1.207.756.500	1.200.000.000	1.200.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINAS PERKIM	

				Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK	Cakupan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak terhadap sanitasi dasar perkotaan	1000 m Drainase	1000 m Drainase	5000 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINAS PERKIM	
				Pembangunan/Peningkatan Lingkungan Drainase Zona Perkotaan	cakupan wilayah genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	2 IPAL Komunal	1.002.500.000	1.207.756.500	1.200.000.000	1.200.000.000	APBN, APBD II	DINAS PERKIM	
				Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Lingkungan Zona Perkotaan	cakupan wilayah saluran drinase genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	2500 m Drainase	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	APBN, APBD II	DINAS PERKIM	
			Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Permukiman Perkotaan	Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK	cakupan wilayah genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan										DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINAS PERKIM	
				Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK	cakupan wilayah saluran drinase genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak perkotaan										DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINAS PERKIM	
	Tercapainya target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar pedesaan	Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar pedesaan dari 57,06% pada tahun 2017 menjadi .....% pada tahun 2021	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD -T) Skala Permukiman Perdesaan	Pembangunan tangki septik skala komunal (5 -10)	Jumlah tangki septik tank skala komunal yang dibangun										DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINAS PERKIM/PAMSIMAS	

				Pembangunan tangki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK	Jumlah tangki septik tank skala individual yang dibangun										DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINAS PERKIM/PAM SIMAS	
				Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sistem drainase lingkungan mandiri	Jumlah kelompok pengelolaan sistem drainase yang dibentuk										APBD II, CSR	DINAS PERKIM/PAM SIMAS	
			Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Pedesaan	Penyediaan Sarana Sanitas Dasar terutama bagi masyarakat miskin	Cakupan rumah tangga akses tidak layak terhadap kebutuhan santasi layak Pedesaan										APBN, APBD I, APBD II, CSR	DINAS PERKIM/PAM SIMAS	
				Pembangunan/Peningkatan Lingkungan Drainase Zona Pedesaan	cakupan wilayah genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak Pedesaan										APBN, APBD I, APBD II, CSR	DINAS PERKIM	
				Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Lingkungan Zona Pedesaan	cakupan wilayah saluran drinase genangan air dan kawasan permukiman terhadap akses sanitasi layak Pedesaan										APBN, APBD I, APBD II, CSR	DINAS PERKIM	
	Tercapainya target Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi sektor persampahan		Program Pengembangan Kinerja Pengembangan Persampahan	Penyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan sampah	dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Ppengelolaan smapah										APBD II	DINAS LH	
				Perencanaan Jaringan persampahan skala kecamatan	Masterplan jaringan persampahan skala kecamatan										APBD II, CSR	DINAS LH	
				Pelatihan 3R bagi aparat pengelola Persampahan	cakupan pelayanan sanitasi perkecamatan terhadap akses sanitasi layak dan berkelanjutan										APBD II, CSR	DINAS LH	
				Sosialisasi perda pengelolaan sampah pada masyarakat	cakupan jiwa terhadap akses sanitasi layak dan berkelanjutan pada sektor sektor persampahan										APBD II, CSR	DINAS LH	
		Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah terhadap capaian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Air Minum	Penyusun dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah	dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)Pengelolaan Sampah			1 Dokumen Perencanaan			900.000.000				APBD II	BAPPEDA	

		target sanitasi layak dan berkelanjutan															
					Perencanaan Jaringan Pengelolaan Sampah Kecamatan			2 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	1Dokumen Perencanaan	150.000.000	100.000.000	100.000.000		APBD II	DINAS LH	
		Memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah terhadap volume sampah perhari	Program Pengolahan Sampah dari Sumbernya	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Untuk Rumah Tangga	cakupan jiwa terhadap kebutuhan bak sampah dalam pencapaian akses sanitasi										APBN, APBD II	DINAS LH	
				Pengadaan Gerobak Sampah Roda 3	cakupan jiwa terhadap kebutuhan gerobak sampah dalam pencapaian akses sanitasi										APBN, APBD II	DINAS LH	
				Pembangunan TPS dan TPS 3R	cakupan jiwa terhadap kebutuhan TPS dan TPS 3R dalam pencapaian akses sanitasi										APBN, APBD II	DPU	
				Pembangunan TPA Kecamatan	cakupan jiwa terhadap kebutuhan TPA dalam pencapaian akses sanitasi										APBN, APBD I	DPU	
C	**BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN**																
	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS 64% pada tahun 2017 menjadi 78% pada tahun 2021	Penigkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS	45,12%	47,27%	49%	52%	54%	217.591.400	247.100.000	257.850.000	268.600.000	APBD II	DINKES	
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	sarana media promosi dan informasi sadar hidup sehat				2 Kecamatan	2 Kecamatan			600.000.000	600.000.000	APBD II	DINKES	

				Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan	Jumlah tenaga promosi kesehatan yang dilatih	21 Peserta			25 Peserta	25 Peserta			150.000.000	150.000.000	APBD II	DINKES	
			Kualitas air minum	Peningkatan Pengawasan external PDAM, dan DAMIU	Presentase Sarana Air Minum yang di lakukan pengawasan	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	12 IPA PDAM	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD II	DINKES	
				Sosialisasi Perda DAMIU No. 10 Tahun 2017	JumlahPesertayang mengikutisosialisasi DAMIU		200 Peserta	100 Peserta	200 Peserta			50.000.000	40.000.000	50.000.000	APBD II	DINKES	
			Penurunan Stunting	Kegiatan Pemantauan Balita Bawah Garis Merah dan Perawatan Balita Gizi Buruk di Zona Perkotaan	Cakupan penderita stunting terhadap akses lingkungan sehat	100%	100%	100%	100%	100%	50.000.000	75.000.000	235.000.000	235.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINKES	
				Pengadaan PMT BUMIL KEK	Jumlah Unit PMT yang disediakan	32,17%	70,83%	100%	100%	100%	480.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINKES	
				Pengadaan PMT Bayi/Balita Penduduk Miskin	Jumlah Unit PMT Bayi/Balita Penduduk Miskin yang disediakan	67,72%	87,87%	100%	100%	100%	480.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINKES	
				Pengadaan Taburia	Jumlah Unit Taburia yang disediakan	100%		100%	100%	100%		25.000.000	50.000.000	50.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINKES	
				Pengadaan Mineral Mix	Jumlah Unit Mineral Mixyang disediakan	100%		100%	100%	100%	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINKES	
				Pengadaan Obat Cacing	Jumlah tablet Obat Cacing yang disediakan	100%		100%	100%	100%		20.000.000	20.000.000	20.000.000	DAK, APBN, APBD I, APBD II	DINKES	
			Penyehatan Lingkungan	Penyuluhan PHBS & CTPS	Jumlah Kelompok potensial yang mengikuti penyuluhan										DAK, APBD II	DINKES	
				Verifikasi Desa ODF	Jumlah Desa ODF yang diverifikasi	3 Desa	11 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	22.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	DAK, APBD II	DINKES	
				Pemicuan Desa terhadap Penyehatan Lingkungan	Jumlah desa yang dilakukan pemicuan STBM	30Desa (96,6%)	38 Desa (100%)	40 Desa (100%)	40 Desa (100%)	40 Desa (100%)	279.362.900	300.000.000	300.000.000	300.000.000	DAK, APBD II	DINKES	
				Pengawasan dan Pembinaan tempat-tempat umum	Jumlah tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	101.490.000	100.000.000	75.000.000	75.000.000	DAK, APBD II	DINKES	
				Pembangunan TPS Limbah B3 di Puskesmas	Jumlah TPS Limbah B3 di Puskesmas yang dibangun				5TPS (100%)	5 TPS (100%)			1.000.000.000	1.000.000.000	DAK, APBD II	DINKES	

				Pengadaan Sanitarian Kit	Jumlah Sanitarian Kit yang diadakan	5 Sankit (100%)	5 Sankit (100%)	0	5 Sankit (100%)	6 Sankit (100%)	394.453.335	0	500.000.000	600.000.000	DAK, APBD II	DINKES	
				Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Item Peralatan Laboratorium yang disediakan		100%				213.750.000				APBD II	DINKES	
	Terpenuhinya kebutuhan air baku terhadap akses air minum layak dan berkelanjutan	Memenuhi kebutuhan sumber air baku untuk akses air minum layak dan berkelanjutan	Pelestarian sumber air baku untuk air minum	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	Jumlah kawasan hutan daerah tangkapan air	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan					APBD II	DLH	
			Kualitas air minum	Studi tentang Kualitas dan Potensi Air minum di Kabupaten Kutai	Dokumen Kelas Air Sungai	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	1 Dokumen (6 Sungai)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD II	DLH	
	Tercapainya akses universal pelayanan dasar di kawasan kumuh 0%	Memenuhi kebutuhan akses air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan di kawasan kumuh	Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh	Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitas Dasar terutama bagi masyarakat kawasan Kumuh	cakupan deliniasi kawasan kumuh perkotaan terhadap rumah tangga akses air minum dan sanitasi layak			15 Ha	15 Ha	15 Ha		15.000.000.000	18.000.000.000	22.500.000.000	APBD I, APBDII	OPD TERKAIT	

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL TAHUN 2018 -2021

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kabupaten Kutai Timur Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 dilakukan oleh Organiasai Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 - 2021 untuk kemudian dilaporkan kepada Kutai Timur melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2018-2021 Kabupaten Kutai Timur di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Kabupaten Kutai Timur maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target SDGS, RPJMN 2019, DAN SPM.

Tujuan pemantauan dan evaluasi program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau yang seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Secara garis besar, tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut :

a. Menilai kemajuan pelaksanaan program percepatan pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi;
b. Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi;
c. Mengukur keluaran, hasil, manfaat, dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi;
d. Sebagai umpan balik untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Kutai Timur untuk periode sekarang maupun yang akan datang
e. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019.
f. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya;
g. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

Ada dua manfaat utama dilakukannya pemantauan dan evaluasi program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi yaitu :

1. Manfaat terkait dengan operasional adalah sebagai berikut:
   a. Dapat digunakan untuk mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi yang dikehendaki dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menghambat keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi yang dilakukan;
   b. Dapat digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program percepatan pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi yang dilaksanakan;
   c. Dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.
2. Manfaat terkait dengan kebijakan adalah sebagai berikut :
   a. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dirumuskan kembali, strategi percepatan pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi, pendekatan, serta asumsi-asumsi yang digunakan;

b. Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hu-bungan antar program dan kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan di masa-masa mendatang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, yaitu:

1. Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target SDGs 2030, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi di Kabupaten Kutai Timur. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM di Kabupaten Kutai Timur adalah pemantau bagi dirinya sendiri dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pokja Sanitasi/AMPL bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders*/OPD.
2. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terkait, dan dilakukan oleh seluruh *stakeholders* di Kabupaten Kutai Timur;
3. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para *stakeholders* dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama sebagai dasar perbaikan dan program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi selanjutnya;
4. Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pencapai-an target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-

masing dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi yang sedang berjalan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program pencapaian target SDGs, RPJMN 2019, dan SPM bidang air minum dan sanitasi ini dapat dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemantauan pada saat program berjalan, kegiatan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun;
3. Evaluasi akhir (*summative evaluation*), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2021.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
   a. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
   b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
   a. Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
   b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
   a. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;

b. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
d. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
e. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
g. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2. FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL TAHUN 2018 -2021

No	Sasaran AMPL2018	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahun ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun ke-								OPD
							2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-12		-13		-14		-15		-17		-18		-19		-20		-22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SR	A	%	70	100	7	85	700																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat kinerja																															
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																															
Faktor penghambat:																															
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																															

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran
Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri N0 54/2010

....., tanggal .....
Kepala Bappeda
Kabupaten .....

( )

Menyetujui
....., tanggal .....
Bupati .....

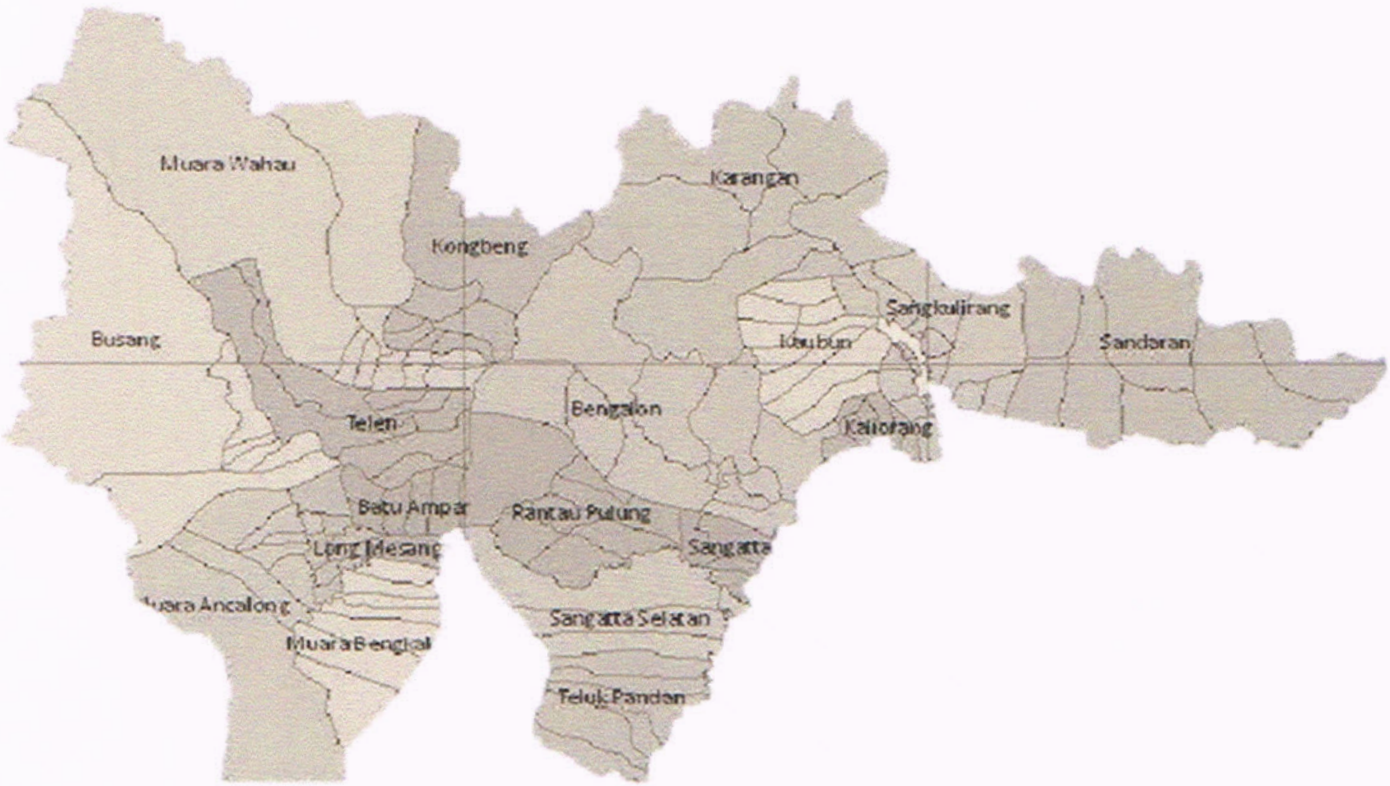
( )

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kabupaten s.d. 2021
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2019.
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
   Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
   Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
    Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.

16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada OPD berikutnya" diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada OPD berikutnya

BAB VII
PENUTUP



BAB VII PENUTUP

Tujuan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2021 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saja, tetapi juga oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang menjadi sasaran pencapaian target.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya mendukung dan melaksanakan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan baik langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan memberikan pemahaman dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program dan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan rencana aksi daerah air minum

dan penyehatan lingkungan ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPR/DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta serta lembaga lainnya. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL tahun 2018-2021. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target AMPL Kabupaten Kutai Timur.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kutai Timur merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2021 mendatang. Dokumen RAD AMPL Kabupaten Kutai Timur tahun 2018-2021 ini terbuka untuk perubahan atau penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menuju sasaran yang disepakati selama 2018-2021 bersama *stakeholders*.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR